



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

2025



Prepared for :
SAKIP 2025



ditpraska



Dit Prasarana KA



djka.kemenuhub.go.id/ditprasaranaka

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.

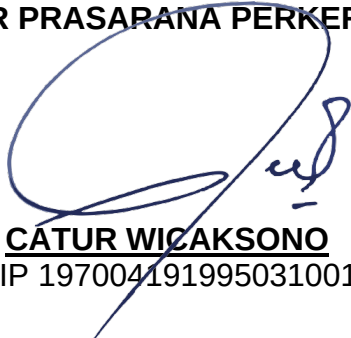
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Prasarana Perkeretaapian diharapkan dapat menjadi informasi capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan sebagai bahan referensi dalam rangka melakukan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Tahun Anggaran 2025.

Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas publik kepada para *stakeholder*.

Semoga Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan peran institusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Januari 2026

Plt. DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN


CATUR WICAKSONO

NIP 197004191995031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai unit kerja penunjang pembangunan nasional mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi di bidang prasarana perkeretaapian. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta fasilitas operasi kereta api.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api,



fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan

- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Untuk memastikan terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian diatas, maka telah ditetapkan 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dan 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi Terakhir) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Target Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Revisi Ke-1	Revisi Ke-2	Revisi Ke-3
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	64,54	64,54	64,54	24,14
	Jalur KA yang Beroperasi	Km	-	-		6.928
Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	-	-	-	32,20
	Kondisi Jalur KA sesuai Dengan TQI Kategori 1 Dan 2	%	95,02	95,02	95,02	95,02
	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,27	65,27	65,27	65,21
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89
Meningkatnya Keandalan Prasarana	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,34	50,34	50,34	50,58

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Revisi Ke-1	Revisi Ke-2	Revisi Ke-3
Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,48	90,48	90,48	79,55
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,20	83,20	83,20
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,00	15,00	15,00	19,00
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,76	85,76	85,76	85,75
	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100	100	100,00
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,00	79,00	79,00	78,56

Adapun hasil pengukuran kinerja tahun 2025 tergambar dalam grafik perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :



Tabel 2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian		
Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>REALISASI KINERJA: 24,14</p> <p>TARGET KINERJA: 24,14</p>	100
Jalur KA yang Beroperasi (Km)	<p>REALISASI KINERJA: 6915,12</p> <p>TARGET KINERJA: 6928,00</p>	99,81
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian		
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>REALISASI KINERJA: 33,90</p> <p>TARGET KINERJA: 32,20</p>	105,28



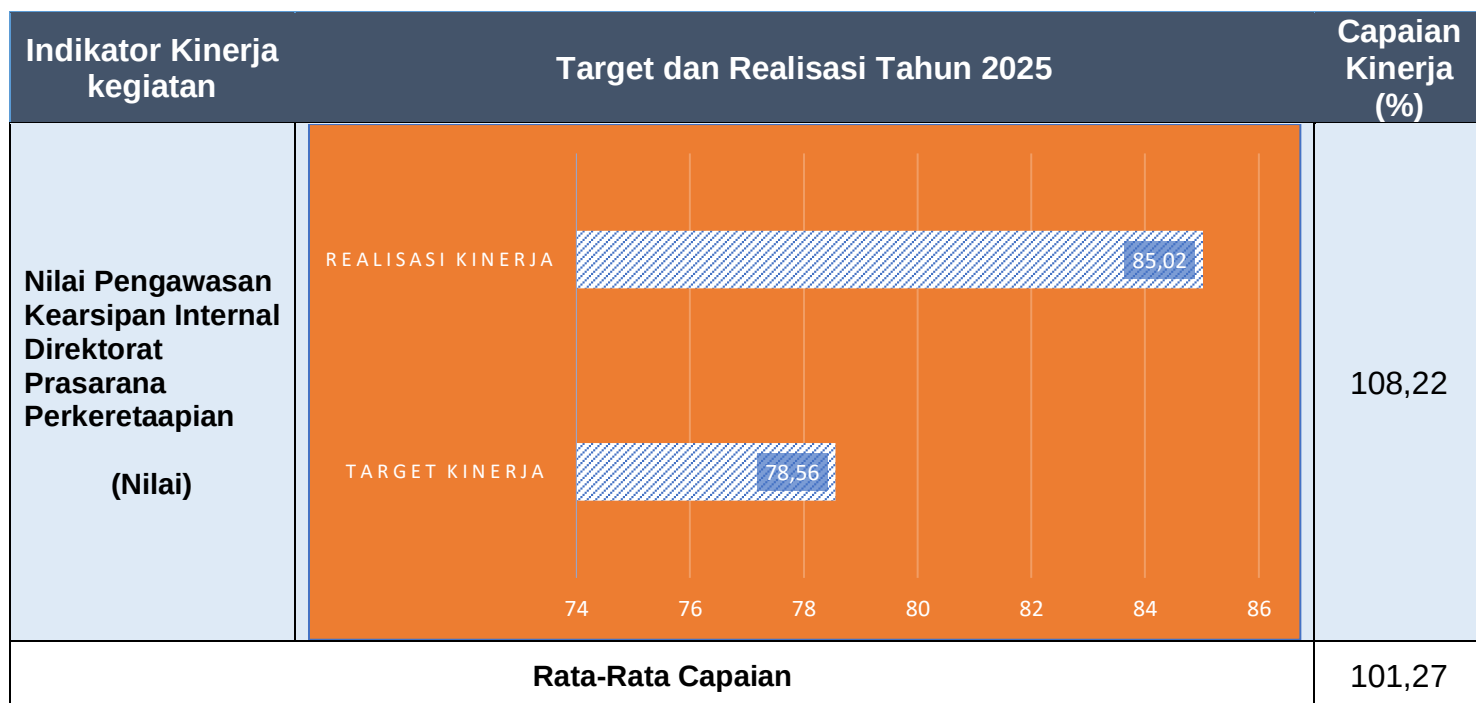
Indikator Kinerja kegiatan		Target dan Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
Kondisi Jalur KA sesuai Dengan TQI Kategori 1 Dan 2 (%)	REALISASI KINERJA	<div><div></div></div>		99,60
	TARGET KINERJA	<div><div></div></div>		
Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (%)	REALISASI KINERJA	<div><div></div></div>		100
	TARGET KINERJA	<div><div></div></div>		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	REALISASI KINERJA	<div><div></div></div>		100,26
	TARGET KINERJA	<div><div></div></div>		
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kehandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian				



Indikator Kinerja kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
<div>Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian</div> <div>(%)</div>	<div>REALISASI KINERJA</div> <div>TARGET KINERJA</div>	<div>50,85</div> <div>50,58</div>	100,53
<div>Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian</div> <div>(%)</div>	<div>REALISASI KINERJA</div> <div>TARGET KINERJA</div>	<div>79,55</div> <div>79,55</div>	100
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian			
<div>Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian</div> <div>(Nilai)</div>	<div>REALISASI KINERJA</div> <div>TARGET KINERJA</div>	<div>83,20</div> <div>83,2</div>	100



Indikator Kinerja kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>REALISASI KINERJA: 20,00</p> <p>TARGET KINERJA: 19</p>	105,26
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>REALISASI KINERJA: 83,66</p> <p>TARGET KINERJA: 85,75</p>	97,56
Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>REALISASI KINERJA: 100,00</p> <p>TARGET KINERJA: 100</p>	100



Selain Itu, terkait realisasi pelaksanaan anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan DIPA serta POK awal dengan pagu sebesar Rp. 508.529.636.000,- dengan kebijakan efisiensi sehingga untuk pagu efektif Direktorat Prasarana Perkeretaapian menjadi sebesar Rp. 396.604.292.000,- dan pagu efektif sebesar Rp. 111.925.344.000,-. Terdapat perubahan anggaran sebesar Rp 459.815.773.000,- dan kebijakan blokir Rp. 396.604.292.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp. 111.925.344.000. pada periode Triwulan IV terdapat perubahan anggaran sesuai dengan DIPA/POK Revisi 14 sebesar Rp. 2.552.579.217.000. Realisasi anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian s.d Triwulan IV (Bulan Desember 2025) sebesar Rp 2.394.248.414.418,- atau sebesar 93,79% dan Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 LATAR BELAKANG	I-1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-1
I.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN ...	I-2
I.4 STRUKTUR ORGANISASI	I-4
I.5 SUMBER DAYA MANUSIA	I-7
I.6 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	I-8
I.7 SISTEMATIKA PELAPORAN.....	I-12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 RENCANA STRATEGIS	II-1
II.1. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung RPJMN 2025-2029.....	II-1
II.1. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	II-3
II.1. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian....	II-13
II.1. 4 Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.....	II-17
II.1. 5 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.....	II-18
II.1. 6 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2025-2029.....	II-29
II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	II-3
II.1. 1 Perjanjian Kinerja Awal	II-47
II.1. 2 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-49
II.1. 3 Revisi Ke-II Perjanjian Kinerja Tahun Perkeretaapian	II-53
II.1. 4 Revisi Ke-II Perjanjian Kinerja Tahun Perkeretaapian.....	II-56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025.....	III-1
III.2 KESIMPULAN.....	III-11
III.3 REKOMENDASI	III-18
BAB IV PENUTUP	
III.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	III-1
III.2 KESIMPULAN.....	III-11
III.3 REKOMENDASI	III-15



Lampiran-Lampiran :

Lampiran I :

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Lampiran II :

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Lampiran III :

Komitmen Rekomendasi Peningkatran Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Lampiran IV :

Monitoring Rencana Aksi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Lampiran V :

Data Dukung Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja

Lampiran VI :

Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja dan Internal Unit Kerja



BAB I

PENDAHULUAN

MERANGKAI REL, MENGHUBUNGKAN INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Direktorat Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian di bidang prasarana perkeretaapian dengan kualitas dan kinerja instansi pemerintah yang baik, termasuk didalamnya aspek pertanggungjawaban (*Accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah baik secara administratif maupun secara manajerial kepemimpinan, sebagaimana diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka memenuhi peraturan-peraturan terkait tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut, maka dilaksanakan monitoring capaian kinerja triwulanan pada Tahun 2025.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Monitoring capaian kinerja di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian antara lain :

- a. Memantau kemajuan pelaksanaan/progres indikator kinerja di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian per triwulan sehingga tujuan sasaran dapat tercapai dengan baik;



- b. Mengidentifikasi kendala/hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja per triwulan sehingga dapat disusun upaya guna mencapai target yang telah ditetapkan.

I.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dipimpin oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapia mempunyai struktur organisasi terdiri dari :



SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA **WILAYAH I**

SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA **WILAYAH II**

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG JALUR DAN BANGUNAN KERETA API SERTA STASIUN KERETA API.



JALAN REL

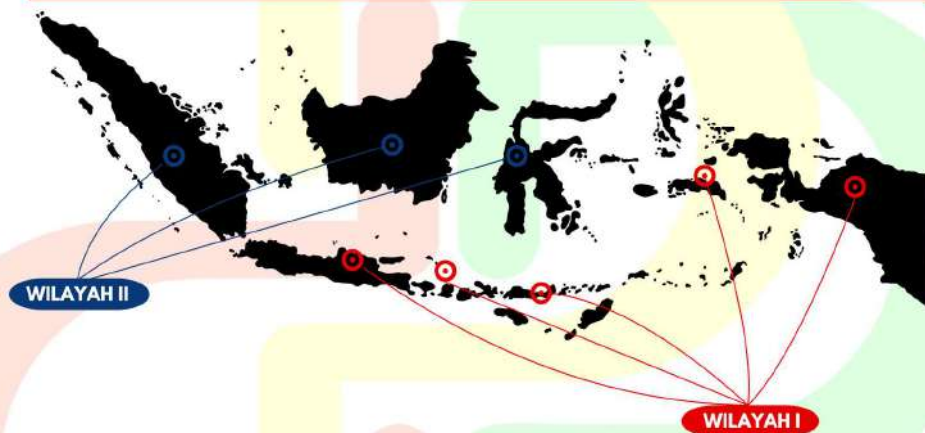


JEMBATAN/TEROWONGAN



BANGUNAN (STASIUN/DEPO)

- WILAYAH I : PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA
- WILAYAH II : PULAU SUMATERA, KALIMANTAN DAN SULAWESI



SUBDIREKTORAT FASILITAS OPERASI KA

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG FASILITAS OPERASI KERETA API.



PERSINYALAN



TELEKOMUNIKASI



PELISTRIKAN



**BANGUNAN PENDUKUNG
FASILITAS OPERASI**



SUBDIREKTORAT KELAIKAN JALUR DAN BANGUNAN KA

SUBDIREKTORAT KELAIKAN FASILITAS OPERASI KA

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KELAIKAN JALUR DAN BANGUNAN KA SERTA FASILITAS OPERASI KA

KELAIKAN JALUR DAN BANGUNAN KA



JALAN REL



JEMBATAN/TEROWONGAN



BANGUNAN (STASIUN/DEPO)

KELAIKAN FASILITAS OPERASI



PERSINYALAN



TELEKOMUNIKASI



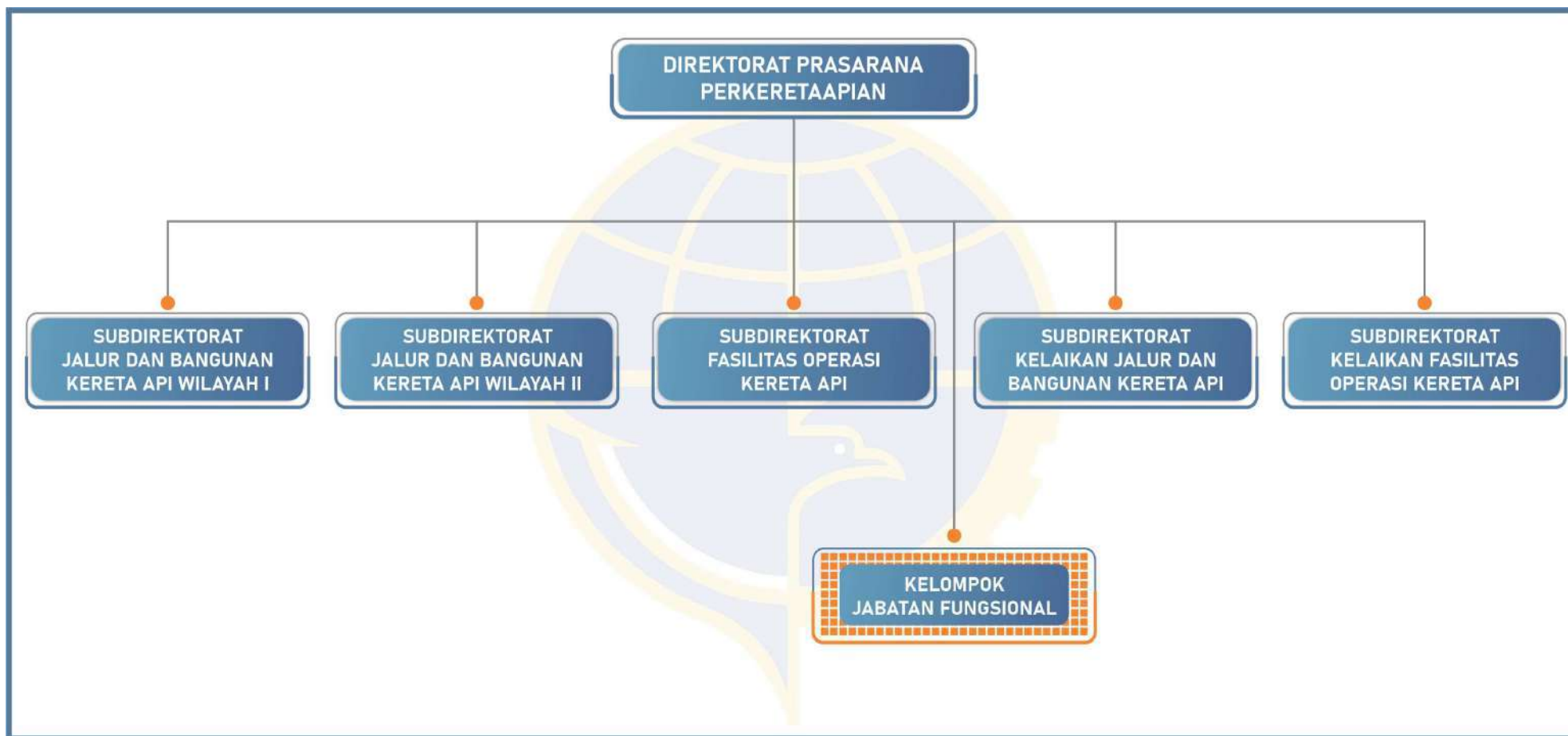
PELISTRIKAN



**BANGUNAN PENDUKUNG
FASILITAS OPERASI**

I.4 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan penetapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibentuk Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang terdiri dari jabatan tinggi pratama (Eselon 2) dan terdapat 5 jabatan administrator (Eselon 3) serta kelompok jabatan fungsional. guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang penunjukan koordinator kelompok, telah terdapat 10 pegawai yang ditunjuk sebagai koordinator tim di Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Gambaran secara jelas Struktur Organisasi sebagaimana digambarkan pada gambar dibawah ini :



Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025

Gambar I. 1
Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian



Gambar I. 2
Struktur Pejabat Eselon II, Eselon II dan Koordinator/Ketua Tim Kelompok Direktorat Prasarana Perkeretaaa



I.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara keseluruhan Tahun 2025 berjumlah sebanyak 251 orang dengan rincian sebagai berikut :

SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	0
SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA WILAYAH I	49
SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA WILAYAH II	43
SUBDIREKTORAT FASILITAS OPERASI KA	42
SUBDIREKTORAT KELAIKAN JALUR DAN BANGUNAN KA	39
SUBDIREKTORAT KELAIKAN FASILITAS OPERASI KA	45
KELOMPOK TATA USAHA	33
TOTAL	251

JENJANG

PELAKSANA	ESELON II (DIREKTUR)	0
	ESELON III (KASUBDIT)	4
FUNGSIONAL	AHLI MADYA	6
	AHLI MUDA	27
	AHLI PERTAMA	34
	TERAMPIL	15
PELAKSANA		165
TOTAL		251





TINGKAT PENDIDIKAN

S2	34	
S-1/D-IV	120	
D-III	86	
SLTA/SMK	11	
TOTAL		251



GOLONGAN/KEPANGKATAN

PNS	GOLONGAN IV/B	5
	GOLONGAN IV/A	6
	GOLONGAN III/D	26
	GOLONGAN III/C	7
	GOLONGAN III/B	35
	GOLONGAN III/A	15
	GOLONGAN II/D	23
	GOLONGAN II/C	40
PPPK	IX	65
	VII	17
	V	9
	PARUH WAKTU	3
TOTAL		251

PNS		155
PPPK		93
CPNS		3
TOTA EKSISTING		251

I.6 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1.6.1. Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

1. Target panjang rel kereta api di dalam RIP Nasional cukup tinggi yang mana ditargetkan sampai tahun 2030 sudah terbangun 10.524 km (termasuk kereta api apierkotaan 3.755 km);
2. Pembangunan jalur kereta api di Sumatera dalam menghubungkan jalur kereta api di Sumatera bagian selatan dengan Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian utara masih terkendala dan belum optimal;

1.6.2. Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian

1. Kondisi dan keterbatasan prasarana kereta api yang sudah berumur;
2. Kondisi jalur rel yang andal menjadi faktor utama dalam menjamin keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan perjalanan kereta. Untuk itu, pengukuran TQI diperlukan sebagai dasar pemantauan Kesehatan jalur secara objektif dan terukur. Tanpa data TQI, perawatan rel cenderung reaktif, tidak tepat sasaran, dan berpotensi melewatkan kerusakan dini yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan atau bahkan kecelakaan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem database dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian. Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi masalah integrasi, data yang tidak akurat. Peluang dalam peningkatan pemanfaatan teknologi melalui pemanfaatan analitik data besar, pengembangan aplikasi berbasis AI dan integrasi sistem informasi yang lebih luas.
4. Masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2024 mencapai 3,88 dan pada tahun 2025 mencapai 3,89. Kepuasan masyarakat, juga dapat dilihat dari penilaian publik terhadap kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam penerbitan izin pembangunandan izin perpotongan dan/atau persinggungan dengan prasarana perkeretaapian.

1.6.3. Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

1. Kecelakaan kereta api masih ada (belum Zero Accident), khususnya yang melibatkan kondisi prasarana perkeretaapian;
2. Masih terbatas jumlah sumber daya manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi bidang prasarana perkeretaapian. Beberapa kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang prasarana perkeretaapian antara lain: belum optimalnya sistem diklat dan sertifikasi sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas lembaga diklat dan sertifikasi. Perlu adanya dorongan lembaga profesi untuk melakukan kegiatan sertifikasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan/diklat dan bimbingan teknis terkait teknologi perkeretaapian;

3. Pada dasarnya anggaran IMO digunakan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara untuk meningkatkan daya saing dan keselamatan kereta api. Selama ini, alokasi anggaran IMO belum sesuai kebutuhan dan belum dapat dipenuhi oleh pemerintah sesuai kebutuhan karena keterbatasan dana APBN.

1.6.4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

1. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian selaku regulator penyelenggara prasarana perkeretaapian. Perubahan dan penguatan kelembagaan dan organisasi di Direktorat Prasarana perlu didukung dengan adanya penyiapan berbagai regulasi terkait dengan bisnis proses, struktur organisasi tata kerja, peta jabatan, dan regulasi pendukung lainnya. Dukungan regulasi yang kuat diharapkan dapat memberikan kepastian dan arah perubahan kelembagaan yang tepat dengan memperhatikan berbagai ketentuan teknis dan administratif yang ada;
2. Kebutuhan terhadap norma, standarisasi teknis pedoman dan kriteria terhadap penerapan teknologi prasarana perkeretaapian yang cepat sehingga dapat mengantisipasi penerapan teknologi perkeretaapian terbaru. Perlu diperhatikan juga terkait dengan peningkatan pengendalian bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan;
3. Pembangunan perkeretaapian selama ini masih dominan didanai dari APBN, sehingga ketergantungan APBN masih cukup besar. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran APBN, pembangunan perkeretaapian masih belum mampu mewujudkan jaringan kereta api sesuai dengan harapan di dalam dokumen RIP Nasional 2030. Beberapa capaian pembangunan jalur kereta api masih kurang dibandingkan target;
4. Potensi dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang prasarana perkeretaapian yang belum sepenuhnya tergali sebagai sumber pendanaan alternatif;
5. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang prasarana perkeretaapian untuk peningkatan pelayanan dan keselamatan kereta api yang belum optimal. Pembaruan teknologi baik di sarana maupun prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengoperasian kereta api akan menjadi salah satu penentu daya saing dan kualitas layanan moda kereta api di masa

yang akan datang. Informasi yang tepat, cepat dan akurat akan memberikan penekanan yang lebih baik dalam menunjang perkeretaapian yang sudah bertransformasi menjadi lebih modern, efisien dan berkelanjutan.

1.6.5. Tindak lanjut yang telah dilakukan :

1. Penyesuaian target Panjang jalur berdasarkan target RPJMN 2025-2029 sesuai dengan perpres 12 tahun 2025 dimana sampai dengan tahun 2029 sepanjang 6.985 Km sebagaimana peneraan pada Renstra Direktorat Prasarana 2025-2029.
2. Program pembangunan jalur kereta api di pulau Sumatera mengikuti kebijakan sesuai dengan RPJMN 2025-2029 dan kegiatan prioritas sebagaimana penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode 2025-2029;
3. Akan dilakukan penyusunan kajian prasarana kereta api untuk dilakukan penggantian/peningkatan sebagai factor utama menjamin keselamatan;
4. Monitoring dan evaluasi jalur kereta api dengan pelaksanaan pengukuran jalan rel dengan menggunakan kereta ukur serta pelaksanaan evaluasi hasil pengukuran serta pemberian rekomendasi untuk perbaikan/perawatan jalan rel kedepan
5. Telah dilaksanakan digitalisasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan salah satunya telah dilakukan launching penggunaan aplikasi perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebagai pelaksanaan proses bisnis pelayanan pemanfaatan jalur kereta api; selain itu untuk digitalisasi data prasarana perkeretaapian secara bertahap dilakukan update data dengan menggunakan aplikasi data prasarana perkeretapien
6. Pelayanan publik sampai dengan tahun 2025, indeks capaian kinerja kepuasan pelayanan public yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian mencapai 3,90 atau kategori Sangat Baik.
7. Sebagai upaya mengurangi kecelakaan kereta api yang diakibatkan oleh kondisi prasarana perkeretaapian telah dilakukan upaya yaitu melaksanakan pengukuran TQI serta evaluasi hasil pengukuran dan memberikan rekomendasi kepada Balai Teknik Perkeretaapian serta Badan Penyelenggara Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk melakukan perawatan secara berkala serta melakukan penanganan berupa perawatan terhadap temuan hasil pengukuran lokasi-lokasi yang mengalami penurunan ketegori TQI.



8. Akan diusulkan kajian terhadap kebutuhan NSPK dengan penerapan teknologi prasarana perkeretaapian terbaru, selain itu Direktorat prasarana perkeretaapian secara bertahap melaksanakan penyusunan Revisi NSPK Teknik dibidang Prasarana Perkeretaapian diantaranya Revisi Permenhub 60 Tahun 2011 dan penyusunan Standar TQI untuk kebutuhan NSPK sebagaimana telah ditetapkan didalam Kerangka Regulasi Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029
9. Untuk penguatan kelembagaan dan organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menyusun Kamus Kompetensi Jabatan, Analisa Beban Kerja, analisa uraian jabatan sebagai acuan pelaksanaan tugas fungsi Direktorat prasarana Perkeretaapian, serta pengcascadingan indikator kinerja berjenjang. Selain itu untuk telah dilaksanakan pembentukan tim untuk beberapa tugas-tugas penting sebagai upaya penguatan kelembagaan.
10. Akan dilakukan usulan penggunaan dana anggaran yang bersumber dari PNPB untuk tugas fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
11. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara bertahap telah dilaksanakan pada tahun 2026 akan dilaksanakan lanjutan pembangunan aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian sesuai dengan proses bisnis yang akan dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian.

I.7 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 melaporkan pencapaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian selama Tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian berserta perubahannya Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2025 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar I. 5
Bagan Sistematika Pelaporan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

MERANGKAI REL, MENGHUBUNGKAN INDONESIA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

II.2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung RPJMN 2025-2029

Sesuai arahan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkeretaapian dalam RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, dilakukan inventarisasi arah kebijakan dan strategi utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain:

1. Pengembangan kereta api penumpang antar kota

Jaringan kereta api dalam pengembangan jaringan transportasi antar kota dalam pulau berperan sebagai moda utama jarak jauh. Jaringan utama (*trunk line*) adalah jaringan jalur kereta api nasional sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dengan jaringan pengumpan (*feeder line*) adalah jaringan jalur kereta api provinsi/kabupaten/kota sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi/Kabupaten/Kota. Jaringan kereta api dapat dikembangkan jaringan menuju simpul bandara dan pelabuhan. Strategi implementasi yang dilakukan antara lain:

- a. Menyiapkan dokumen perencanaan (*readiness criteria*) pembangunan jalur kereta api antar kota.
- b. Melanjutkan pembangunan jalur kereta Trans Sumatera dalam rangka menyambungkan jaringan jalur kereta api Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian utara dalam rangka meningkatkan konektivitas kawasan di Pulau Sumatera.
- c. Melanjutkan pengembangan kereta api cepat (*high speed train*) Jakarta - Surabaya untuk peningkatan efisiensi integrasi ekonomi dan pengembangan kawasan pusat kegiatan.
- d. Pengembangan dan penataan stasiun kereta api kelas besar sebagai pusat *hub* dan stasiun kereta api kelas sedang/kecil sebagai *spoke* yang terintegrasi dengan simpul bandara dan pelabuhan.



- e. Reaktivasi jalur kereta api dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel maupun berbasis otonom terintegrasi dan berkelanjutan, melalui strategi:
 - a. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit-Oriented Development/TOD*).
 - b. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan dengan teknologi sesuai dengan kondisi wilayah dan kemampuan fiskal daerah, antara lain kereta api massal, kereta api ringan, kereta gantung.
 - c. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan berbasis otonom dengan memanfaatkan teknologi.
 - d. Pengembangan simpul dan jaringan pendukung kawasan Ibukota Negara (IKN).
3. Pengembangan kereta api angkutan barang pendukung logistik
 - a. Pengembangan jaringan kereta api barang di Sumatera bagian selatan dan Lampung dalam rangka mendukung efisiensi distribusi angkutan barang komoditas utama dan logistik.
 - b. Pengembangan jaringan kereta api barang di Kalimantan dan Sulawesi dalam rangka mendukung efisiensi distribusi angkutan barang komoditas utama dan logistik.
 - c. Pengembangan jaringan kereta api menuju kawasan ekonomi/strategis/pusat komoditas utama dan simpul outlet distribusi angkutan barang komoditas utama dalam rangka penguatan sistem distribusi koridor utama mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi/strategis dengan pelabuhan/bandara) dan perluasan jaringan kereta api untuk efisiensi logistik.
 - d. Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas jalur rel ganda/double track untuk logistik angkutan khusus.
 - e. Pengembangan stasiun barang/dry port dalam mendistribusikan logistik barang.



4. Pengembangan jaringan kereta api di Ibukota Negara sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel maupun berbasis otonom terintegrasi dan berkelanjutan, melalui strategi:
 - a. Pengembangan jaringan kereta api dalam mendukung konektivitas Ibukota Negara dengan kawasan pusat kegiatan di Kalimantan
 - b. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis otonom dan berbasis teknologi lainnya yang ramah lingkungan dalam rangka mendukung konektivitas di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah dan kawasan di dalam Ibukota Negara.
 - c. Pengembangan simpul transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

II.2.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk setiap Sasaran Program (SP) berdasarkan hasil analisis yang memetakan perkembangan isu dan lingkungan strategis menjadi elemen kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan yang perlu diantisipasi oleh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui identifikasi risiko pada setiap Sasaran Program dan pelaksanaan arah kebijakan strategis.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan serta mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (T.1) Terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan, yakni:
 - a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota sesuai RIP Nasional, peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati.
 - b) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api, peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan



perawatan perkeretaapian, peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian.

- c) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting, peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api, peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian, peningkatan subsidi pelayanan kereta api, peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender, peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api, peningkatan aspek keselamatan perlintasan sebidang serta peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.
2. Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran adalah peningkatan pencapaian nilai AKIP, peningkatan pencapaian nilai kinerja anggaran, peningkatan pencapaian realisasi PNBPD Direktorat Jenderal Perkeretaapian, peningkatan pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medium speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
		AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang



Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK3. Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
	SP2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan peremajaan jalur kereta api yang telah usang Peningkatan pada prasarana, pesinyalan dan fasilitas operasi keamanan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan
		AK6 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan konsep transportasi perkeretaapian yang ramah lingkungan Pengembangan manajemen berbasis teknologi informasi untuk mengatur jadwal, pemeliharaan, dan distribusi tiket secara otomatis termasuk sistem pemantauan kereta secara real-time Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan start-up untuk mengadopsi inovasi terbaru dalam sistem perkeretaapian, seperti kecerdasan buatan dan analitik data



Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK7 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
		AK8 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pengadaan sarana kereta api perintis • Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
		AK9 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus • Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus • Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api • Penyediaan kereta khusus wanita



Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK10 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu • Penyediaan park and ride di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas non-motorized (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
		AK11 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/<i>early warning system</i> dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang
		AK12 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan • Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
	SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK13 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan self-assessment keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian



Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian
		AK14 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian • Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian • Keberlanjutan skema IMO dan TAC
		AK15 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian • Pengembangan workshop laboratorium dan simulator • Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
		AK16 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian



Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
		AK17 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian
		AK18 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
		AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian Monitoring capaian realisasi output kegiatan



Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPDJKA	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pembayaran <i>Track Access Charge</i> • Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBPDJKA atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
		AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian • Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan • Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		AK23 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Pengelolaan kegiatan konseling pegawai • Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. • Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital • Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian



Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			<ul style="list-style-type: none">Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber: Renstra DJKA Tahun 2025-2029



II.2.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:





Tabel II.2
Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Tujuan 1 (T1) Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional (AK1), Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan (AK2), Reaktivasi jalur kereta api mati (AK4), dan Mendukung Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan Perkeretaapian (AK7)	1. Penyusunan Survey Invetigasi Desain/Basic Engineering Design dan Detail Engineering Design yang mendukung konektivitas 2. Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana perkeretaapian 3. Bimbingan Teknis bidang Prasarana Perkeretaapian
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan Perkeretaapian (AK7)	1. Pengukuran kualitas jalur rel KA menggunakan hasil pengukuran kereta api ukur 2. Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana perkeretaapian 3. Penyusunan Survey Invetigasi Desain/Basic Engineering Design dan Detail Engineering Design yang mendukung pelayanan 4. Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan 5. Pelayanan bidang Prasarana Perkeretaapian
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)	Mendukung Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian (AK14),	1. Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian



Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian (AK17), dan Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian (AK18)	2. Peningkatan sertifikasi sistem dan komponen peralatan prasarana perkeretaapian 3. Penyusunan NSPK
Tujuan 2 (T2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan pencapaian nilai AKIP (AK19), Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (AK20), Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPDJKA (AK21), dan Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (AK23)	1. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Evaluasi Penyelenggaraan AKIP 3. Penyelenggaraan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian 4. Evaluasi Manajemen Risiko 5. Penyusunan review dan penyempurnaan dokumen perencanaan secara berkelanjutan 6. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Ditpraska 7. Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran (e-monitoring) di lingkungan Ditpraska 8. Peningkatan penatausahaan serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Ditpraska 9. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian



Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			10. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian 11. Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis 12. Peningkatan Sumberdaya Kerasipan 13. Evaluasi Kearsipan

II.2.4 Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempertimbangkan sasaran program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mana sasaran menggambarkan fokus utama menyelesaikan isu strategis dan permasalahan perkeretaapian berkaitan dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan prasarana perkeretaapian.

Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

- 1) Sasaran Kegiatan 1 (SK 1)
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian
- 2) Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)
Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian
- 3) Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)
Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
- 4) Sasaran Kegiatan 4 (SK 4)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Berikut disampaikan penjelasan masing-masing sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kegiatan 1 (SK1), Sasaran Kegiatan 2 (SK2) dan Sasaran Kegiatan 3 (SK3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan konektivitas, pelayanan dan keselamatan transportasi perkeretaapian. SK1, SK2 dan SK3 ini merupakan penurunan langsung dari Sasaran Program (SP) di level Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

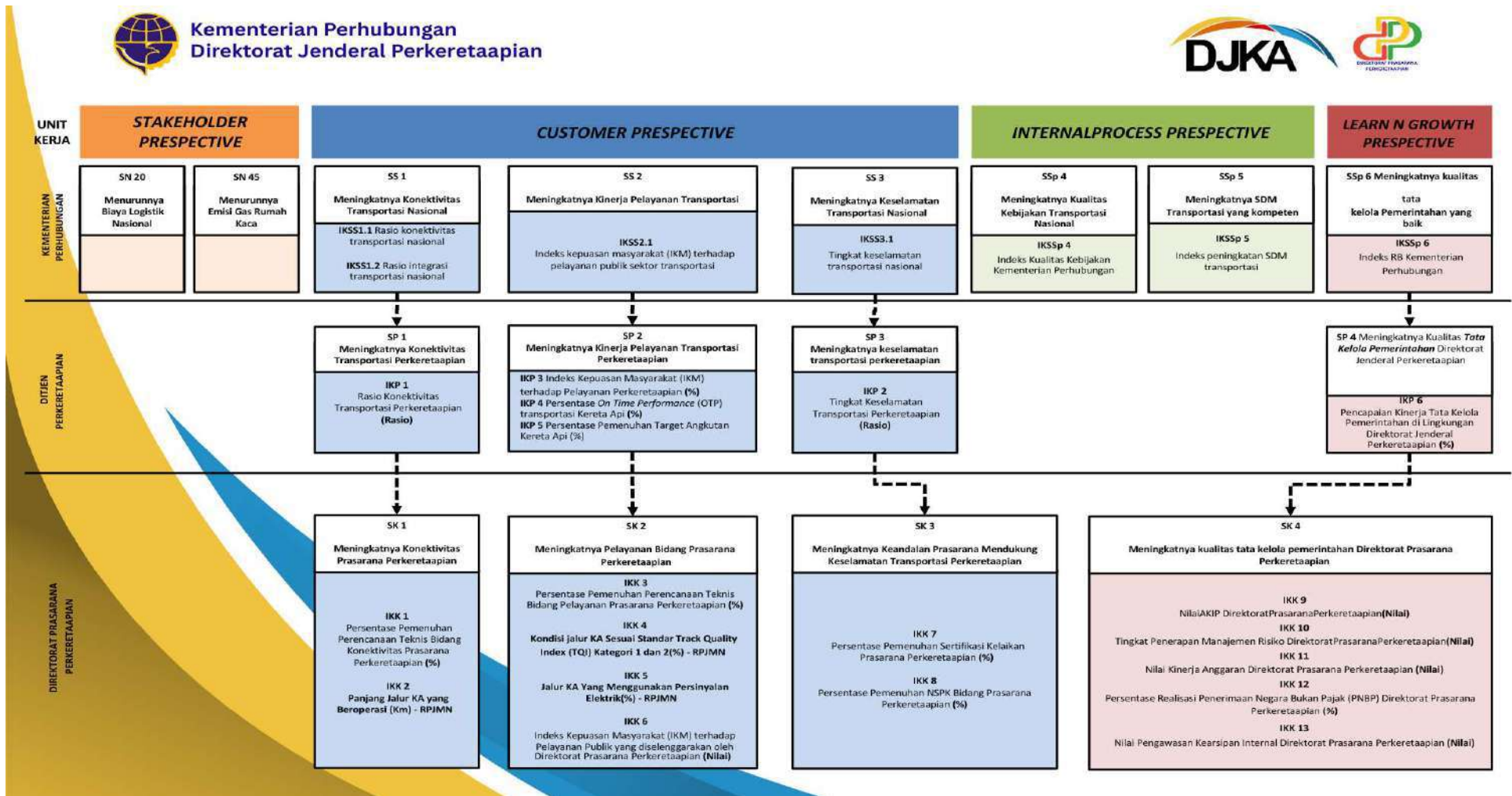
Sasaran Kegiatan 4 (SK4) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan Internal *Business Perspectives* dan Learning and Growth Perspectives yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan prasarana



perkeretaapian yang berupa keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan/anggaran, aset, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

II.2.5 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2025-2029. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut disampaikan keselarasan antara Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan pada level Kepala Sub Direktorat dan Direktur Prasarana Perkeretaapian terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada level Direktur Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Kementerian Perhubungan.



Gambar II.1
Diagram Cascading Indiator Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian



Dalam penentuan Indikator Kinerja, telah memenuhi kriteria SMART yaitu *Spesific* (Tujuan Jelas dan Fokus), *Measurable* (terukur/jelas dan dapat dihitung); *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Sesuai Kenyataan), *Time-Bound* (untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu). Secara jelas untuk analisis indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:





Tabel II.3
Analisa SMART Indiaktor Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Pengesahan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung konektivitas (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029</p> <p>Tata Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan Perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029.	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Panjang Jalur KA yang Beroperasi (Km)	Pembangunan Panjang Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Jalur yang di reaktivasi	<p>Satuan: Km</p> <p>Definisi: Penjumlahan secara kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi. panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi dan semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat</p> <p>Tata Cara Perhitungan :</p> $\text{Panjang Jalur KA yang Beroperasi} = \text{Panjang jalur KA (sampai dengan Tahun Berjalan-1)} + \text{Panjang jalur KA yang di bangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi}$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian /baseline tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029.	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	Pengesahan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung pelayanan (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan pelayanan pada periode Renstra 2025-2029</p> <p>Tata Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d. Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d tahun 2029}}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan Perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029.	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	Jalur Kereta Api yang sesuai dengan Kategori 1 dan 2 (kecepatan > 80 Km/Jam)	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori 1 dan 2 (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\frac{\text{Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2}}{\frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori 1 dan 2 pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia.	Selaras dengan Target RPJMN dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan pemberian Bimbingan Teknsi dan Supervisi dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	Fasilitas operasi kereta api (<i>Interlocking</i> sistem persinyalan kereta api elektrik diwilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi)	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Jumlah unit fasilitas operasi berupa interlocking sistem persinyalan kereta api yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking sistem persinyalan kereta api existing dan periode Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> <div><div>Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik</div><div>=</div><div><div>Jumlah Unit <i>Interlocking</i> Sistem Persinyalan Kereta Api berbasis Elektrik s.d Tahun berjalan</div><div>Jumlah Unit <i>Interlocking</i> Sistem Persinyalan Kereta Api pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029</div></div><div>X 100%</div></div> <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Target RPJMN dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan pemberian Bimbingan Teknsi dan Supervisi dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Survey Aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)</p> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,524 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table> <p>Sumber data: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> <div><div>IKM Per Bulan</div><div>=</div><div><div>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</div><div>Total Unsur yang Terisi</div></div><div>x</div><div>Nilai Penimbang</div></div>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia.	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian).	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																										



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		$IKM = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM s.d Bulan ke - } n}{n}$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi</p>			
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Prasarana Perkeretaapian (Jalur dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi) yang sudah disertifikasi/ memiliki sertifikat kelaikan prasarana	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan dan kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada tahun berjalan sampai dengan tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dan kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian)	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Pemenuhan Kebutuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK yang telah ditetapkan/ diusulkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri Jalur dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi serta Kelaikan Jalur dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029.</p> <p>Tata cara perhitungan:</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia.	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian).	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		<p>Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan</p> $= \frac{\text{Jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}}{\text{Jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>			
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Merupakan Hasil Penilaian AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian oleh Evaluator (Nilai skala 1-100)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> <p>Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x 15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Inspektorat Jenderal</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat).	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Merupakan Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan,	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																						
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																		
	Perkeretaapian (Nilai 0 – 30)	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Total Skor Manajemen Risiko</th><th>Simpulan Level</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0 – 7</td><td>Initial</td></tr><tr><td>2</td><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td></tr><tr><td>3</td><td>15 – 20</td><td>Defined</td></tr><tr><td>4</td><td>21 – 25</td><td>Managed</td></tr><tr><td>5</td><td>26 - 30</td><td>Optimised</td></tr></tbody></table> <p>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian:</p> $= \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 1}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 1}} + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 2}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 2}} + \dots + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 15}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 15}}$ <p>Sumber Data: Inspektorat Jenderal</p>	No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	1	0 – 7	Initial	2	8 – 14	Repeatable	3	15 – 20	Defined	4	21 – 25	Managed	5	26 - 30	Optimised	realisasi tahun sebelumnya	analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat).	
No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level																					
1	0 – 7	Initial																					
2	8 – 14	Repeatable																					
3	15 – 20	Defined																					
4	21 – 25	Managed																					
5	26 - 30	Optimised																					
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi:</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;• 80% - 90%: Kategori Baik;• 60% - 80%: Kategori Cukup;• 50% - 60%: Kategori Kurang;• Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia dan megacu kepada nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data,	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029.																		



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		<p>Tata cara perhitungan:</p> $NKA = \frac{\text{Nilai Kinerja Atas Perencanaan Anggaran} + \text{Nilai Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran}}{2}$ <p>Sumber data: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Aplikasi Monev Kemenkeu</p>	pelaksanaan anggaran.	dan rumah tangga Direktorat).	
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan.	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian pada tahun berjalan</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\text{Persentase Realisasi PNBP} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan}}$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Aplikasi Omspan Kemenkeu</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada perhitungan target rencana penyelesaian perizinan dan Sertifikasi dibidang prasarana perkeretaapian	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat).	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029.
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Direktorat Prasarana	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2023 tentang</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029.



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																
	Perkeretaapian (skala 0-100)	<div>Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan</div> <table><tr><td colspan="2">KETERANGAN KATEGORI</td></tr><tr><td>> 90 – 100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 80 -90</td><td>A (Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 70 – 80</td><td>BB (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>> 60 – 70</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>> 50 – 60</td><td>CC (Cukup)</td></tr><tr><td>> 30 – 50</td><td>C (Kurang)</td></tr><tr><td>> 0 – 30</td><td>D (sangat Kurang)</td></tr></table> <div>Tata cara perhitungan: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian: $= (\text{Nilai pengelolaan arsip dinamis} \times 70\%) + (\text{Nilai sumber daya kearsipan} \times 30\%)$ Sumber Data: Sekretariat Jenderal Perhubungan (Kepala Biro Umum)/ Setditjen Perkeretaapian</div>	KETERANGAN KATEGORI		> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)	> 80 -90	A (Memuaskan)	> 70 – 80	BB (Sangat Baik)	> 60 – 70	B (Baik)	> 50 – 60	CC (Cukup)	> 30 – 50	C (Kurang)	> 0 – 30	D (sangat Kurang)	sebesar realisasi tahun sebelumnya nilai pengaawasan kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian .	(penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat).	
KETERANGAN KATEGORI																					
> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)																				
> 80 -90	A (Memuaskan)																				
> 70 – 80	BB (Sangat Baik)																				
> 60 – 70	B (Baik)																				
> 50 – 60	CC (Cukup)																				
> 30 – 50	C (Kurang)																				
> 0 – 30	D (sangat Kurang)																				

II.2.6 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2025-2029

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2025-2029 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020-2024, telah ditetapkan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sasaran untuk periode Renstra 2025- 2029 sebagaimana disampaikan berikut:

Tabel II.4
Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi
	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian
		Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2
		Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian



TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Prasarana Perkeretaapian	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk dapat menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada setiap tahun anggaran untuk akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian untuk terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) harus dapat terukur dan dilaporkan secara berkala. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan bidang prasarana perkeretaapian, juga digunakan sebagai alat evaluasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya.

Target indikator kinerja kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 disampaikan sebagai berikut :



Tabel II.5
Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	24,14	31,03	44,83	100,00
		IKK 2	Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km	6.928	6.928	6.937	6.937	6.985
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	32,20	33,90	44,07	98,31	100,00
		IKK 4	Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
		IKK 5	Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	65,53	66,34	67,96	70,23
		IKK 6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
SK 3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 7	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,58	62,79	76,47	86,50	100,00
		IKK 8	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	79,55	86,36	93,18	100,00
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK 9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,50	84,40	85,45	86,40
		IKK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	19	20	21	22	23
		IKK 11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	85,75	85,75	85,85	85,95	86,05
		IKK 12	Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000
		IKK 13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	78,56	78,56	80,19	81,70	83,03



Dalam rangka mencapai tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dari berbagai sumber daya seperti regulasi pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Tabel II.6
Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berdasarkan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
Kode	Nama	2025	2026	2027	2028	2029
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	469.346.402	186.230.651	164.514.900	1.740.127.561	1.713.119.165
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	93.279.566	82.550.000	80.000.000	2.500.000	0
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.430.411	12.673.453	2.940.797	3.234.877	3.558.365
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	373.636.425	91.007.198	81.574.103	1.734.392.684	1.709.560.800
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	39.183.234	57.796.807	58.437.131	71.115.932	77.548.413
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	0	0	5.670.113	6.128.703	6.611.046
4601	Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum <i>Lanjutan....</i> Transportasi Perkeretaapian	39.183.234	57.796.807	48.922.710	70.142.322	66.381.375
4602	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	0	0	2.610.174	2.828.683	3.064.791
4603	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	0	0	223.312	253.739	268.107
4604	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	0	0	1.010.821	1.111.904	1.223.094
Jumlah		508.529.636	244.027.458	222.952.030	1.811.243.493	1.790.667.578

Sumber: Kerangka Pendanaan Renstra 2025-2029 Direktorat Prasarana Perkeretaapian



Tabel II.7
Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
Kode IKK	Nomenklatur IKK	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	365.045.861	50.000.000	51.950.000	1.711.800.000	1.684.700.000
IKK 2	Panjang Jalur KA yang Beroperasi	3.986.970	7.699.544	10.005.950	7.671.391	7.003.985
IKK 3	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	100.396.955	82.550.000	80.000.000	2.500.000	0
IKK 4	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	504.059	1.014.410	1.115.851	1.227.436	1.350.180
IKK 5	Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	885.110	6.431.332	1.367.782	1.504.560	1.655.016
IKK 6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	1.000.000	2.195.412	2.323.049	2.444.348
IKK 7	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	4.528.574	18.854.582	10.300.510	11.175.609	12.205.469
IKK 8	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	853.638	36.487.281	25.490.821	21.439.904	25.083.894
IKK 9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	970.144	1.393.180	3.027.998	3.036.753	3.262.634
IKK 10	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	230.000	1.424.614	1.567.075	1.709.537	1.851.998
IKK 11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	31.128.325	34.115.004	32.562.268	43.150.057	47.034.337
IKK 12	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	1.410.000	1.551.000	1.706.100	1.876.710
IKK 13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	1.647.511	1.817.362	1.999.098	2.199.008
Jumlah		508.529.636	244.027.458	222.952.030	1.811.243.493	1.790.667.578

Sumber: Kerangka Pendanaan Renstra 2025-2029 Direktorat Prasarana Perkeretaapian



Berdasarkan Penetapan Target Kinerja Rencana Strategis Direktorat Prasarana Periode 2025-2029 terdapat hubungan kinerja dengan bidang lain (*Crosscutting*) dalam pelaksanaan target kinerja rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian antara lain:

Tabel II.8
Hubungan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Bidang Lain/Unit Kerja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/Unit Kerja
1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja :</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja menyediakan Dokumen Perencanaan Teknis Konektivitas berupa DED/BED/SID yang telah disahkan</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas 2. Menelaah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas 3. Melakukan Penandatanganan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas 	<p>Kinerja :</p> <p>1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api:</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dengan hasil kinerja Menyediakan Dokumen Study Feasibility Study (FS) dan Penetapan Trase serta Penetapan Pola Operasi Jalur Kereta Api.</p> <p>2. Balai Teknik Perkeretaapian</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api.</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat/Balai Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dokumen perencanaan teknis bidang konektivitas



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
			<p>b. Melakukan Pembahasan dokumen perencanaan</p> <p>c. Menerima dokumen perencanaan teknis yang telah disahkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api</p>
2	Panjang Jalur KA yang Beroperasi	<p>Kinerja :</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur KA yang Beroperasi dengan hasil kinerja Jumlah kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi</p> <p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengawasan Pembangunan dan pengembangan jaringan jalur kereta api di Indonesia 2. Melakukan Pengawasan kelaikan jalur kereta api yang telah selesai dibangun, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi 3. Memberikan rekomendasi atas temuan pengawasan 4. Melaksanakan Pembinaan Bidang Jalur dan Bangunan KA kepada Balai di Lingkungan 	<p>Kinerja:</p> <p>1. Balai Teknik Perkeretaapian</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api.</p> <p>2. Balai Pengujian Perkeretaapian</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja melakukan proses pengujian jalur kereta api yang telah terbangun</p> <p>Aktivitas:</p> <p>1. Balai Teknik Perkeretaapian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		DJKA serta Badan Usaha terkait	<p>konektivitas jaringan kereta api.</p> <p>b. Melakukan Pengawasan Bidang Prasarana Perkeretaapian.</p> <p>c. Menyampaikan rekomendasi atas temuan pengawasan kepada Badan Usaha penyelenggara</p> <p>2. Balai Pengujian Perkeretaapian</p> <p>Melaksanakan proses pengujian jalur kereta api sampai dengan penyampaian hasil pengujian kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>3. Badan Usaha Penyelenggara (PT.KAI, dll) /Kontraktor</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan terkait operasional perkeretaapian</p> <p>b. Melakukan Perbaikan Atas rekomendasi yang diberikan</p> <p>c. Pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas jaringan kereta api dengan skema kerja sama/investasi</p>
3	Persentase Pemenuhan Teknis Bidang Pelayanan	<p>Kinerja :</p> <p>Indikator kinerja kegiatan</p> <p>Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang</p>	<p>Kinerja :</p> <p>Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api: Indikator kinerja kegiatan Persentase</p>



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
	Prasarana Perkeretaapian	<p>Pelayanan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja menyediakan Dokumen Perencanaan Teknis Konektivitas berupa DED/BED/SID yang telah disahkan</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyiapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian Menelaah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian Melakukan Penandatanganan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian 	<p>Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dengan hasil kinerja Menyediakan Dokumen Study Feasibility Study (FS) dan Penetapan Trase serta Penetapan Pola Operasi Jalur Kereta Api.</p> <p>Aktivitas :</p> <p>Direktorat/Balai Terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyiapan dokumen perencanaan teknis bidang konektivitas Melakukan Pembahasan dokumen perencanaan Menerima dokumen perencanaan teknis yang ditelaah disahkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan mendukung pelayanan prasarana perkeretaapian
4	Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	<p>Kinerja :</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dengan hasil kinerja Pelaksanaan Evaluasi dari Hasil Pengukuran TQI oleh Badan Usaha.</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengawasan dalam pengukuran jalur KA 	<p>Kinerja :</p> <p>Balai Teknik Perkeretaapian:</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 pada wilayah BTP terkait dengan hasil kinerja Pengelolaan pelaksanaan Perawatan dan Peningkatan Jalur Kereta api</p> <p>Aktivitas :</p> <p>1. Balai Teknik Perkeretaapian</p>



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		2. Menerima hasil pengukuran TQI yang dilaksanakan badan usaha 3. Melaksanakan Evaluasi dari hasil pengukuran TQI oleh Badan Usaha 4. Memberikan Rekomendasi atas hasil pengukuran jalur KA	a. Melaksanakan Pengawasan Perawatan dan Peningkatan Jalur Kereta api. b. Ikut serta dalam pelaksanaan evaluasi hasil pengukuran TQI c. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi 2. Badan Usaha (PT.KAI Persero, dll) a. Pengukuran kualitas jalur kereta api/Track Quality Indeks serta pengolahan data hasil pengukuran. b. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi
5	Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	Kinerja : Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik dengan hasil kinerja penambahan jumlah persinyalan elektrik. Aktivitas: 1. Pengendalian perizinan Pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus 2. pelaksanaan monitoring dan, evaluasi pembangunan/ peningkatan fasilitas operasi kereta api. 3. Melaksanakan Pembinaan Bidang Fasilitas Operasi KA	Kinerja: 1. Balai Teknik Perkeretaapian/Badan Usaha (PT.KAI Persero, dll) Indikator kinerja kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan Pembangunan/ peningkatan sistem persinyalan elektrik 2. Balai Pengujian Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		kepada Balai di Lingkungan DJKA serta Badan Usaha terkait	<p>Perkeretaapian dengan hasil kinerja melakukan proses pengujian Fasilitas Operasi kereta api yang telah terbangun.</p> <p>Aktivitas:</p> <p>1. Balai Teknik Perkeretaapian</p> <p>a. Melaksanakan Pembangunan/ peningkatan fasilitas operasi kereta api.</p> <p>b. Melakukan Pengawasan Bidang Prasarana Perkeretaapian.</p> <p>c. Menyampaikan rekomendasi atas temuan pengawasan kepada Badan Usaha penyelenggara</p> <p>2. Balai Pengujian Perkeretaapian</p> <p>Melaksanakan proses pengujian fasilitas operasi sampai dengan penyampaian hasil pengujian kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>3. Badan Usaha Penyelenggara (PT.KAI, dll) /Kontraktor</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan terkait operasional perkeretaapian</p>



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
			<p>b. Mengajukan perizinan Pembangunan prasarana perkeretaapian</p> <p>c. Melakukan Perbaikan Atas rekomendasi yang diberikan</p> <p>d. Melaksanakan Pembangunan/ peningkatan sistem persinyalan elektrik dengan skema investasi/kerjasama</p>
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja:</p> <p>Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>Aktivitas:</p> <p>1. Penyelesaian pelayanan dibidang prasarana perkeretaapian untuk izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan Bangunan lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional;</p> <p>2. Melakukan verifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan serta penetapan gambar desain perizinan;</p>	<p>Aktivitas:</p> <p>1. Balai Teknik Perkeretaapian</p> <p>a. Melaksanakan pemeriksaan persetujuan gambar Teknik</p> <p>b. Melaksanakan tinjauan lapangan terkait kesesuaian rencana Pembangunan dengan kondisi nyata di lapangan.</p> <p>2. Sekretariat Ditjen Perkeretaapian</p> <p>Melaksanakan proses penyusunan dan pemeriksaan perizinan yang akan ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian</p> <p>3. PPTB (Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan)</p> <p>Melakukan evaluasi secara berkala hasil pelaksanaan SKM dari unit kerja di lingkungan kemenhub.</p>



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		3. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	
7	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja :</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan</p> <p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Verifikasi kelengkapan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian 2. Pengawasan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian 3. Menerbitkan sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus Uji 4. Melaksanakan Pembinaan Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian kepada Balai di Lingkungan DJKA serta Badan Usaha terkait 	<p>Kinerja:</p> <p>Balai Pengujian Perkeretaapian</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja melakukan proses pengujian Prasarana Perkeretaapian yang telah terbangun</p> <p>Aktivitas:</p> <p>1. Balai Pengujian Perkeretaapian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan permohonan pengujian baik uji pertama prasarana perkeretaapian maupun uji berkala prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan kereta api serta fasilitas operasi kereta api) b. Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil pengujian prasarana perkeretaapian <p>2. Balai Terkait/Badan Usaha (PT.KAI, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permohonan pengujian



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
			<p>b. Penyiapan dokumen teknis kelengkapan permohonan pengujian</p> <p>c. Menindaklanjuti hasil temuan pengujian</p>
8	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja:</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja penetapan dokumen NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian</p> <p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan penyusunan/ revisi dokumen teknis bidang prasarana perkeretaapian 2. Menyiapkan perumusan konsep NSPK dibidang Prasarana Perkeretaapian 3. Melakukan sosialisasi terhadap NSPK yang telah ditetapkan 	<p>Kinerja:</p> <p>Sekretariat Ditjen Perkeretaapian</p> <p>Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan hasil kinerja Penetapan regulasi dan kebijakan</p> <p>Aktivitas:</p> <p>Sekretariat Ditjen Perkeretaapian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen NSPK yang sebelumnya telah disusun 2. Melakukan proses penetapan legislasi dan pembahasan sesuai dengan proses bisnis legislasi peraturan
9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja:</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Nilai hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I</p>	<p>Aktivitas:</p> <p>1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian</p> <p>Melakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penilaian mandiri yang telah dilakukan sebelumnya oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berupa Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja Melakukan penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menyiapkan data dukung yang diperlukan 	2. Inspektorat II Kementerian Perhubungan Melakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penilaian mandiri yang telah dilakukan sebelumnya oleh sampel dari DJKA
10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kinerja: Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan Manajemen Risiko sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko Mengidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja 	Aktivitas: Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan <ol style="list-style-type: none"> Melaksanaan Penilaian dan Evaluasi Manajemen Risiko pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Melakukan Pengawasan Internal



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		kegiatan Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian 3. Mengelola, melakukan pemantauan, dan pelaporan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko	
11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja : Indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran</p> <p>Aktivitas: Melaksanakan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pagu efektif pada rencana aksi atas perjanjian kinerja</p>	<p>Aktivitas: 1. Kementerian Keuangan Melakukan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh KPPN Tipe A1 Jakarta 1 dan Nilai Perencanaan Anggaran melalui aplikasi SMART oleh Direktorat Jenderal Anggaran</p> <p>2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran/Audit pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>
12	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja: Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>Aktivitas:</p>	<p>Aktivitas: 1. Kementerian Keuangan Memverifikasi penyetoran PNBP dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan PNBP pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian pelayanan dibidang prasarana perkeretaapian untuk izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan Bangunan lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional;2. Melakukan verifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan serta penetapan gambar desain perizinan;3. Menerbitkan billing pembayaran PNB4. Melakukan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan penyetoran PNB	
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Prasarana Perkeretaapian	Aktivitas : Melakukan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Aktivitas: Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penilaian pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian2. Melaksanakan kegiatan penyusutan arsip direktorat prasarana perkeretaapian

II.2. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian disusun berdasarkan konsep rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 dan kinerja yang akan dicapai ditahun 2024 serta ketersediaan anggaran alokasi anggaran sesuai dengan DIPA/POK Tahun Anggaran 2025 nomor : SP DIPA- 022.08.1.467484/2025, kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel II.9
Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapain	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	%	64,540
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	%	95,020
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	65,270
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,890
3	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,340
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,480
4	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,200
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,000



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target
	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,760
		Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,000

Dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025, telah terdapat pengalokasian perencanaan anggaran yang mendukung kinerja sebagaimana didalam DIPA Awal Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp.508.529.636.000,- Dengan rincian Anggaran permasing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.10
Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025

No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Anggaran PK Awal 2025 (Rp.)
1.	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Transportasi Kereta Api	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	373.636.425.000
2.	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Transportasi Kereta Api	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	3.017.854.000
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	94.164.676.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-
3.		Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	4.528.574.000



No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Anggaran PK Awal 2025 (Rp.)
	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	853.638.000
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	970.144.000
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	230.000.000
		Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1.128.325.000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-
TOTAL			508.529.636.000

II.2.2 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020, Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 disusun berdasarkan adanya kondisi pergantian/mutasi Direktur Prasarana Perkeretaapian dan adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan yaitu adanya perubahan anggaran pagu efektif sesuai dengan penetapan DIPA/POK Rev-4 Tahun Anggaran 2025 nomor : SP DIPA – 022.08.1.467484/2025 sebesar Rp. 111.925.344.000,00 dari pagu awal sebesar Rp. 508.529.636.000,00. Revisi Perjanjian Kinerja sebagai tindaklanjut dari hasil monitoring pengukuran dan pelaporan kinerja periode triwulan I tahun 2025 dimana terdapat rekomendasi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja serta rencana aksi kinerja.

Pada setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan perlu ditetapkan target kinerja sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja sehingga kinerja di tahun 2025 dapat dicapai dengan baik atau masih *on the right track*, dengan rincian dan target sebagai berikut :

Tabel II. 11
Perubahan Target Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Revisi Target
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	64,540	64,540
	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	%	95,020	95,020
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	65,270	65,270
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,890	3,890
	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,340	50,340
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,480	90,480
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,200	83,200
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,000	15,000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,760	85,760
		Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100,000	100,000*



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Revisi Target
		Direktorat Prasarana Perkeretaapian			
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,000	79,000

Dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025, telah terdapat pengalokasian perencanaan anggaran yang mendukung kinerja sebagaimana didalam DIPA Awal Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 508.529.636.000,-. Terdapat kebijakan efisiensi sehingga untuk pagu efektif Direktorat Prasarana Perkeretaapian menjadi sebesar Rp. 111.925.344.000 Dengan rincian Anggaran permasing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 12
Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025

No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Anggaran Rev PK 2025 (Rp.)	BLOKIR/ EFISIENSI (Rp.)	PAGU EFEKTIF
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	372.536.425.000	370.979.565.000	1.556.860.000
2.	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	3.017.854.000	2.373.076.000	644.778.000
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	94.164.676.000	618.233.000	93.546.443.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh	-	-	-



No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Anggaran Rev PK 2025 (Rp.)	BLOKIR/ EFISIENSI (Rp.)	PAGU EFEKTIF
		Direktorat Prasarana Perkeretaapian			
3.	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	4.528.574.000	1.493.356.000	3.035.218.000
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	1.953.638.000	1.905.994.000	47.644.000
4.	Meningkatnya KUALITAS Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	970.144.000	767.064.000	203.080.000
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	230.000.000	195.425.000	34.575.000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	31.128.325.000	18.271.579.000	12.856.746.000
		Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-
TOTAL			508.529.636.000	396.604.292.000	111.925.344.000

II.2.3 Revisi Ke-II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020, Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 disusun berdasarkan adanya pergantian/mutasi pejabat eselon II yaitu Direktur Prasarana Perkeretaapian dan rekomendasi **penyesuaian strategi/aktivitas** yang mempengaruhi pencapaian tujuan pada laporan monitoring kinerja triwulan II dengan melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan pagu efektif (sisa anggaran setelah efisiensi) sesuai DIPA nomor : SP DIPA – 022.08.1.467484/2025 dari pagu awal sebesar Rp. 508.529.636.000,00 dan terdapat blokir/efisiensi sebesar Rp. 396.604.292.000,- sehingga pagu efektif (sisa anggaran setelah efisiensi) sebesar Rp. 111.925.344.000,00.

Pada setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan perlu disesuaikan target kinerja guna sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja sehingga kinerja di tahun 2024 dapat dicapai dengan baik atau masih on the right track, perubahan dengan rincian dan target sebagai berikut :

Tabel II. 13
Perubahan Target Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Revisi Ke-1	Revisi Ke-2
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	64,54	64,54	64,54
Meningkatnya Kapasitas Prasarana	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	%	95,02	95,02	95,02
Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	65,27	65,27	65,27
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	Nilai	3,89	3,89	3,89



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Revisi Ke-1	Revisi Ke-2
	Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian				
Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,34	50,34	50,34
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,48	90,48	90,48
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,20	83,20
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,00	15,00	15,00
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,76	85,76	85,76
	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00*	100,00*
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,00	79,00	79,00

Dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana ditetapkan didalam Revisi Ke-II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025, telah terdapat pengalokasian perencanaan anggaran yang mendukung kinerja sebagaimana didalam DIPA Rev-8 Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 459.815.773.000,00 Terdapat kebijakan efisiensi sehingga untuk pagu efektif Direktorat Prasarana Perkeretaapian menjadi sebesar Rp. 111.925.344.000 Dengan rincian



Anggaran permasing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 14
Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025

No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Anggaran Rev PK 2025 (Rp.)	BLOKIR/ EFISIENSI (Rp.)	PAGU EFEKTIF (Rp.)
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	323.822.562.000	322.265.702.000	1.556.860.000
2.	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	3.010.354.000	2.373.076.000	637.278.000
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	94.164.676.000	618.233.000	93.546.443.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-
3.	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	4.528.574.000	1.493.356.000	3.035.218.000
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	1.936.996.000	1.905.994.000	31.002.000
4.	Meningkatnya KUALITAS Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1.005.811.000	767.064.000	238.747.000
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	218.475.000	195.425.000	23.050.000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	31.128.325.000	18.271.579.000	12.856.746.000
		Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-



No.	Sasaran	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Anggaran Rev PK 2025 (Rp.)	BLOKIR/ EFISIENSI (Rp.)	PAGU EFEKTIF (Rp.)
		Direktorat Prasarana Perkeretaapian			
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-
TOTAL			459.815.773.000	347.890.429.000	111.925.344.000

II.2.4 Revisi Ke-III Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020, Revisi Ke-III Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 disusun berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 dan rekomendasi **penyesuaian strategi/aktivitas dan rencana tindak lanjut periode bulan November** serta penyesuaian anggaran berdasarkan pagu efektif (siswa anggaran setelah efisiensi) sesuai DIPA nomor : SP DIPA – 022.08.1.467484/2025 dari pagu efektif sesuai dengan Revisi POK ke-8 sebesar Rp. 167.064.995.000,- berubah menjadi pagu efektif sesuai dengan Revisi POK ke-14 sebesar Rp. 2.545.070.915.000,-

Pada setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan perlu disesuaikan target kinerja guna sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja sehingga kinerja di tahun 2025 dapat dicapai dengan baik atau masih *on the right track*, perubahan target perindikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada justifikasi perubahan target sebagai berikut:



Tabel II. 15
Perubahan Target Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Revisi Ke-1	Revisi Ke-2	Revisi Ke-3
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	64,54	64,54	64,54	24,14
	Jalur KA yang Beroperasi	Km	-	-		6.928
Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	-	-	-	32,20
	Kondisi Jalur KA sesuai Dengan TQI Kategori 1 Dan 2	%	95,02	95,02	95,02	95,02
	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,27	65,27	65,27	65,21
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89
Meningkatnya Kehandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,34	50,34	50,34	50,58
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,48	90,48	90,48	79,55
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,20	83,20	83,20
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,00	15,00	15,00	19,00



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Revisi Ke-1	Revisi Ke-2	Revisi Ke-3
Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kinerja Anggaran					
	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,76	85,76	85,76	85,75
	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100	100	100,00
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,00	79,00	79,00	78,56



Tabel II.16
Target Perjanjian Kinerja Per Triwulan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET KINERJA TRIWULAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapain	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	17,34	17,34	17,34	24,14
		Jalur KA yang Beroperasi	Km	6928	6880	6880	6880	6928
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	32,20	20,34	20,34	23,37	32,20
		Kondisi Jalur KA sesuai Dengan TQI Kategori 1 Dan 2	%	95,02	95,02	95,02	95,02	95,02
		Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	64,40	64,40	64,40	65,21
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,87	3,87	3,87	3,89



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET KINERJA TRIWULAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,58	47,59	47,67	48,22	50,58
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	72,73	75,00	77,27	79,55
4	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,200	-	-	-	83,200
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15,000	-	-	-	15,000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,760	45,817	59.723	67.061	85.760
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,000	12,029	26,865	42.995	100.000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,000	-	-	-	79.000



Tabel II.17
Tabel Anggaran Masing - Masing Indikator Kinerja Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	POK Ke-8		POK Ke-14	
			PAGU (Rp.)	PAGU EFEKTIF (Rp.)	PAGU (Rp.)	PAGU EFEKTIF (Rp.)
1.	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	323.822.562.000	56.696.511.000	60.476.841.000	55.239.651.000
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi	-	-	587.278.000	587.278.000
2.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	-	-	93.279.566.000	93.279.566.000
		Kondisi Jalur KA Sesuai Standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) Kategori 1 dan 2	3.010.354.000	637.278.000	50.000.000	50.000.000
		Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	94.164.676.000	93.546.443.000	316.877.000	316.877.000
3.	Meningkatnya Keandalan Prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang	-	-	-	-



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	POK Ke-8		POK Ke-14	
			PAGU (Rp.)	PAGU EFEKTIF (Rp.)	PAGU (Rp.)	PAGU EFEKTIF (Rp.)
	mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian				
		Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	4.528.574.000	3.035.218.000	2.301.004.513.000	2.301.004.513.000
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	1.936.996.000	31.002.000	28.244.000	28.244.000
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1.005.811.000	238.747.000	203.747.000	203.747.000
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	218.475.000	23.050.000	58.050.000	58.050.000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	31.128.325.000	12.856.746.000	96.574.101.000	94.302.989.000
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-
		Total	459.815.773.000	167.064.995.000	2.552.579.217.000	2.545.070.915.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan kinerja instansi pemerintah ini menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan **tidak tercapai sesuai dengan target**, formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan **tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran**, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

1. Perhitungan Capaian Kinerja sesuai dengan formulasi perhitungan penetapan indikator kinerja;
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap Revisi Ke-III Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, permasalahan serta alternatif solusi/upaya yang akan dilaksanakan terhadap pencapaian indikator tahun 2025;
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 s/d 2025 terhadap target kinerja tahun 2022 s/d 2025;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target Renstra tahun 2025 dan perbandingan target akhir periode Renstra 2025-2029;
5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (*Benchmarking* Kinerja);

6. Capaian Lainnya di tahun 2025;
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi Anggaran dan Efisiensi Sumber daya Manusia);
8. Realisasi anggaran unit kerja dan Realisasi Anggaran Per indikator kinerja serta pelaksanaan progress fisik pekerjaan Tahun Anggaran 2025.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor : Nomor : HUB-13.02.CFM.01.SOP.01.03 Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Periode Tahunan secara berkesinambungan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja berkala yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara periodik melalui monitoring triwulan dan tahunan. Pada tahun 2025 untuk pengukuran dan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Tahun 2025 beserta dokumen perubahan dokumen perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025. Salah satu penggunaan instrumen pengukuran dan pengelolaan kinerja secara elektronik menggunakan sistem aplikasi *E – Performance* dan aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja (SILAKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sesuai penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian nomor : KP-K3DJKA 74.1 Tahun 2025 telah ditetapkan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian memiliki 4 (Empat) sasaran dan 13 (Tigas Belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang ingin dicapai melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian sebagai berikut yaitu :

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2025 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Perjanjian Kinerja beserta perubahannya dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.

Pada tahun 2025 periode triwulan IV sesuai dengan hasil pembahasan evaluasi target dan penyesuaian target kinerja pada perjanjian kinerja dan rencana aksi

tahun 2025 telah ditetapkan Revisi ke 3 (tiga) Perjanjian Kinerja dengan pertimbangan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 dan rekomendasi **penyesuaian strategi/aktivitas dan rencana tindak lanjut periode bulan November** serta penyesuaian anggaran berdasarkan pagu efektif (sisa anggaran setelah efisiensi) sesuai DIPA nomor : SP DIPA – 022.08.1.467484/2025 dari pagu efektif sesuai dengan Revisi POK ke-8 sebesar Rp. 167.064.995.000,- berubah menjadi pagu efektif sesuai dengan Revisi POK ke-14 sebesar Rp. 2.545.070.915.000,-.

Pengukuran capaian kinerja tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana ditetapkan target kinerja berdasarkan pada Revisi ke-III Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 dengan pengukuran capaian kinerja permasing-masing Sasaran Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

III.2. 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Sesuai Revisi ke-III Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana terdapat perubahan target kinerja dari target awal 64,54% menjadi 24,14%, sesuai dengan penetapan rencana strategis untuk perencanaan teknis bidang prasarana perkeretaapian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu bidang konektivitas dan pelayanan.

Perencanaan teknis yang menjadi target kinerja tahun 2025 adalah *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung Elektrifikasi Jalur KA Lintas Padalarang – Cicalengka dan *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan MRT Jakarta Utara – Selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

2.1.1 Analisis Capaian Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian sebesar 24,14% atau capaian sesuai dengan target tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025

dengan telah disahkan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung Elektrifikasi Jalur KA Lintas Padalarang – Cicalengka dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan MRT Jakarta Utara – Selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota). Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ke-III Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{\% Pemenuhan} \\ \text{Perencanaan Teknis} \\ \text{Bidang Konektivitas} \\ \text{Prasarana} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis} \\ \text{Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian} \\ \text{s.d Tahun Berjalan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis} \\ \text{Bidang Konektivitas s.d. Tahun berjalan dan Jumlah} \\ \text{Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan} \\ \text{Teknis Bidang Konektivitas s.d tahun 2029} \end{array}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan Capaian Kinerja sebagai berikut :

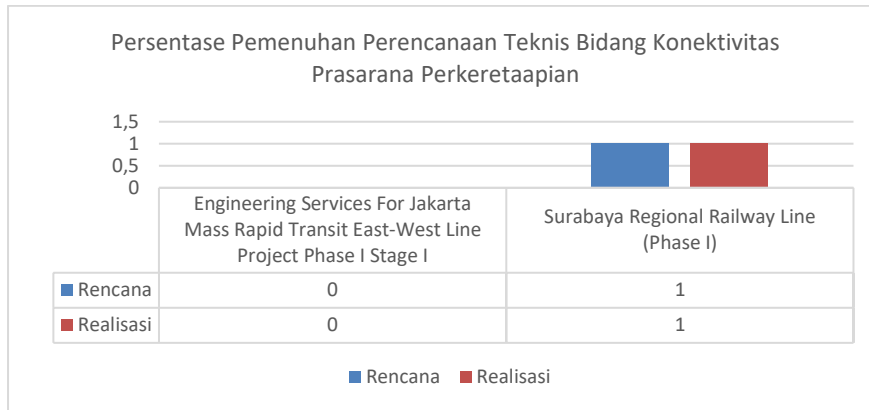
$$\begin{array}{l} \text{\% Pemenuhan} \\ \text{Perencanaan Teknis} \\ \text{Bidang Konektivitas} \\ \text{Prasarana} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{(5+2) \text{ Detail Engineering Design (DED)}}{29 \text{ Basic Engineering Design (BED) /} \\ \text{Detail Engineering Design (DED)}} \times 100\% = 24,14\%$$

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja Triwulan IV/ tahun 2025 sebesar 24,14 % dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 24,14% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 100% (on the right track).

Selain itu Untuk pelaksanaan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian telah ditetapkan kegiatan pendukung indikator kinerja pada tahun anggaran 2025, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I
- 2) Surabaya Regional Railway Line (Phase I)

Dengan Realisasi kegiatan pendukung sebagaimana tergambar didalam grafik dibawah ini :



Gambar III. 1

Grafik Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat indikasi anggaran tidak terserap yaitu Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East West Line Project Phase I Stage II dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,- (PHLN) karena menunggu Slicing anggaran dan Surabaya Regional Railway Line (Phase I) dengan pagu sebesar Rp. 60.376.841.000,-.

Detail pencapaian kinerja indikator kinerja berjenjang dari pelaksanaan kegiatan pendukung tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada lampiran Laporan Kinerja Tahun 2025.

2.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan yaitu untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 100%.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 100%.

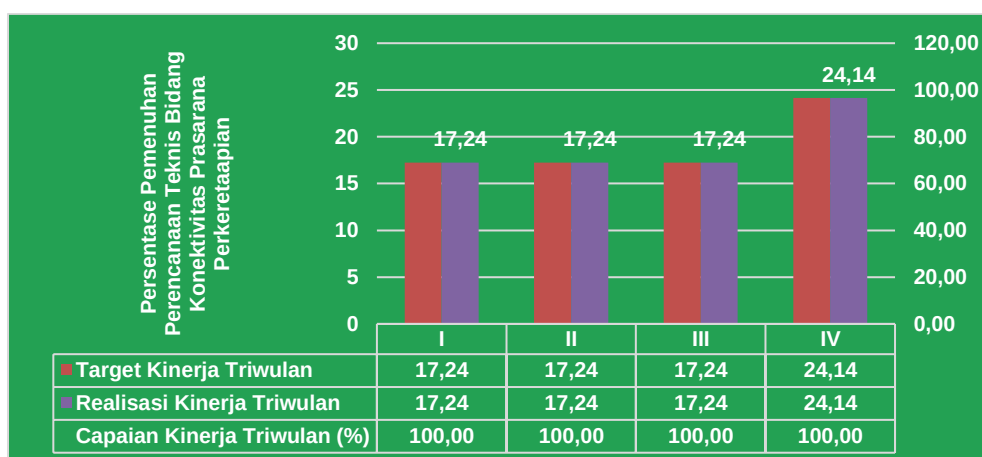
Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 1

Perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan Indikator kinerja kegiatan
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana
Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	17,24	17,24	17,24	24,14	17,24	17,24	17,24	24,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 2

Grafik Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

2.1.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah - langkah telah dilakukan yaitu penetapan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 24,14% mengacu kepada penetapan target 2025 mengacu kepada target Rencana Strategis Direktorat

Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan rangkaian proses bisnis penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) dan telah disahkan 2 DED yaitu *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung Elektrifikasi Jalur KA Lintas Padalarang – Cicalengka dan *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan MRT Jakarta Utara – Selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Untuk mendukung keberhasilan dalam pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian yang ditargetkan pada tahun 2025 telah dilakukan **penyesuaian strategi** yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja perencanaan teknis bidang konektivitas dan menetapkan **aktivitas**/kegiatan penanganan risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penyampaian jadwal asistensi *Detail Engineering Design*;
2. *Transfer of Knowledge/Sharing knowledge* teknis jalur dan bangunan kereta api antar pegawai;
3. Penambahan poin pada Risalah Rapat/Berita Acara terkait deadline penyampaian perbaikan oleh konsultan;
4. Pengawasan kepada konsultan terhadap proses perbaikan gambar desain hasil asistensi.

Selain itu keberhasilan capaian kinerja dengan telah dilakukan **penyesuaian aktivitas** yaitu percepatan proses pengecekan gambar desain dan pelaksanaan asistensi lanjutan Desain Engineering Desain secara berkala sebagai langkah percepatan pengesahan *Detail Engineering Design* (DED). **Penyesuaian Jabatan/pegawai** yaitu dengan penambahan SDM sebagai *Person In Charge* (PIC) yang menangani pemeriksaan gambar desain semula 1 orang menjadi 3 orang. Selain itu pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai

untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III. 3
 Sebaran Pegawai Indikator Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang
 Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	2
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	8
3	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1
4	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	2
5	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	1
6	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
7	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	1
8	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	2

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 pada kegiatan pendukung indikator kinerja pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian anggaran** telah dilakukan usulan buka blokir untuk kegiatan lain yaitu pembayaran kekurangan perawatan prasarana perkeretaapian tahun 2024 (Backlog IMO) sesuai dengan penetapan Revisi DIPA/POK ke 14 TA 2025.

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Sebagai pelaksanaan Indikator Kinerja yang mendukung kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan tugas dan fungsi serta proses bisnis sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian terdapat **crosscutting aktivitas** yaitu dalam penyusunan DED bidang konektivitas prasarana perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian Stakeholder/

Pemerintah Daerah/Konsultan perencana menyusun dan memperbaiki DED dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan pengecekan dan koreksi, asistensi serta pengesahan dokumen DED. Sesuai dengan proses bisnis penyusunan DED bagian/proses dari proses bisnis HUB-09.01.01.CFM.01 Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, dimana tercapat **crosscutting kinerja** dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yaitu Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dengan hasil kinerja menyediakan dokumen Study Feasibility Study (FS) dan Penetapan Trase serta Penetapan Pola Operasi Jalur Kereta Api dan Balai Teknik Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api, selanjutnya dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian serta untuk pengawasan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Untuk mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan **Manajemen Risiko** sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 26 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 9 risiko diatas selera risiko dan 17 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 9 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 15 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 15 kegiatan penanganan sebanyak 14 kegiatan penanganan yang telah selesai dan sebanyak 1 Kegiatan penanganan belum selesai yaitu kegiatan penanganan penyusunan KAK dan RAB MRT East West dikarenakan terdapat slicing loan.

2.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian periode 2022 sampai dengan 2025 belum bisa dilakukan perbandingan, dikarenakan indikator kinerja ini baru dan belum terakomodir di Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024. Penjelasan Tabel perbandingan periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III. 2

Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	-	-	-	24,14	-	-	17,24*	24,14

Keterangan : * Baseline kinerja yang ditetapkan didalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 4

Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2022 – 2005 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

2.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA Periode Tahun 2025 - 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 3
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	24,14	31,03	44,83	100,00	24,14	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Keterangan : Target Renstra berdasarkan penyesuaian target kinerja Perjanjian Kinerja pertahun

Gambar III. 5

Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Renstra 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III. 4

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	24,14	100%

*) Penyesuaian target berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Renstra 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 6

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Renstra 2025

2.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (*Benchmarking* Kinerja)

Untuk laporan kinerja periode triwulan IV perbandingan kinerja level internasional Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas

Prasarana dengan *Ministry Of Transportation* Malaysia dengan perbandingan (*benchmarking*) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel II. 2
 Perbandingan (*Benchmarking*) kinerja Desain Mendukung Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan MoT Malaysia

Aspek utama	Penjelasan	Indonesia	Malaysia
Desain	Dasar Desain	Desain prasarana perkeretaapian yang saat ini telah dibangun, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM No 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur KA dan Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor SK-K3DJKA 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Spesifikasi Teknik Jalur dan Bangunan Ka	Desain prasarana perkeretaapian di Malaysia mengacu pada pedoman Department of Railways (DOR) di bawah Ministry of Transport Malaysia (MOT), yang menetapkan standar teknis melalui dokumen Guidelines for Rail Infrastructure and Facilities Design. Standar ini memastikan kesesuaian dengan Public Transport Policy Framework serta integrasi dengan National Transport Policy 2019–2030.
	Desain Inklusifitas / aksesibilitas fisik	<p>Desain Prasarana Perkeretaapian yang memperhatikan inklusifitas dan aksesibilitas berdasarkan Permenhub 98 Tahun 2017 Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan PM. No. 69 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api.</p> <p>Beberapa penyelenggara perkeretaapian (LRT, MRT, KCIC) telah menyesuaikan design yang ada dengan mempertimbangkan inklusifitas. Saat ini karena terbatasnya anggaran, masih banyak stasiun yang belum dilakukan revitalisasi dengan mempertimbangkan aspek aspek inklusifitas guna mendukung Transportasi Berkelanjutan.</p> <p>Penerapan desain Inklusifitas pada beberapa stasiun di Indonesia seperti dengan penyediaan <i>guiding block</i> dan penyediaan lift serta akses khusus bagi difabel.</p>	<p>Malaysia menerapkan prinsip Universal Design berdasarkan Malaysian Standard MS 1184:2014 – Universal Design and Accessibility in the Built Environment – Code of Practice, yang mengatur dimensi dan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penerapannya diwajibkan pada seluruh proyek perkeretaapian baru (MRT, LRT, ETS) dan rehabilitasi stasiun lama oleh MRT Corp dan Rapid Rail Sdn. Bhd.</p> <p>Implementasi nyata mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan ramp, lift, tactile paving, signage Braille, dan toilet aksesibel di seluruh stasiun MRT Putrajaya Line. - Konsultasi desain dilakukan bersama organisasi disabilitas seperti Malaysian Association for the Blind (MAB) untuk memastikan standar kenyamanan pengguna. - Pemerintah melalui MOT juga sedang meningkatkan fasilitas lama seperti LRT Kelana Jaya Line dan KL Monorail dengan lift upgrades dan platform barriers agar lebih aman bagi difabel.
Desain	Integrasi Antarmoda dan Intermoda	Integrasi antar moda diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mana didalamnya terdapat asas	Malaysia memiliki sistem integrasi antarmoda yang komprehensif melalui Transit-Oriented Development (TOD) Strategy yang dikembangkan oleh

Aspek utama	Penjelasan	Indonesia	Malaysia
		<p>keterpaduan (integrasi) yang sudah diimplementasikan dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang mana didalamnya terdapat sasaran dan kebijakan integrasi transportasi jabodetabek.</p> <p>Beberapa penyelenggara perkeretaapin (LRT, MRT, KCIC) telah menyesuaikan desain yang ada dengan mempertimbangkan aspek integrasi antarmoda dan intermoda. Namun saat ini untuk wilayah diluar Jabodetabek masih perlu peraturan lebih lanjut terkait integrasi antar moda.</p> <p>Penerapan desain integrasi antarmoda pada beberapa stasiun di Indonesia antara lain dengan memperhatikan fasilitas pedestrian agar masih dalam jarak kemauan orang berjalan untuk berpindah mada moda lain.</p>	<p>Land Public Transport Agency (APAD) dan diatur dalam National Physical Plan 3 (NPP-3) serta Greater Kuala Lumpur/Klang Valley Public Transport Master Plan</p> <p>Implementasi integrasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interkoneksi langsung antar moda (MRT, LRT, KTM Komuter, Monorail, dan Bus Rapid Transit). - Sistem ticketing terintegrasi dengan kartu Touch 'n Go untuk seluruh moda transportasi publik. - Penerapan konsep Seamless Mobility di hub utama seperti KL Sentral dan Pasar Seni Integrated Hub yang berfungsi sebagai pusat perpindahan antarmoda. - Pembangunan Transit Plaza yang menggabungkan jalur pejalan kaki, area komersial, dan akses ke transportasi publik.

*sumber data dapat diakses pada link <https://s.id/DakungBenchmarkDesain>

2.1.7 Kendala/Hambatan Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2025 indikator kinerja kegiatan terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan penanganan/pengendalian sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian yaitu, telah dilakukan buka blokir anggaran untuk pekerjaan Surabaya Regional Railway Line (Phase I) lingkup pekerjaan Railway Design Consultan sebesar Rp. 15.000.000.000,- namun tidak bisa terserap dikarenakan pada bulan Desember 2025 proses untuk pelaksanaan kontrak masih berproses.

2.1.8 Upaya Peningkatan Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Sebagai untuk mencapai/peningkatan kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi/aktivitas/anggaran serta jabatan/pegawai sebagai berikut :

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian.
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian;
4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan pendapat hukum terhadap draft kontrak *Railway Design Consultant* (RDC) antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Biro Hukum;
2. Penandatanganan Kontrak Railway Design Consultant (RDC) antara konsultan terpilih dengan PPK MRT SRRL

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Perkeretaapian;
2. Penetapan Tim Pengelola Anggaran TA 2026;
3. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan pegawai.

III.2. 2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 terdapat indikator kegiatan prioritas yang menjadi penugasan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sebagaimana penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 dan Revisi ke-III Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 terdapat penambahan indikator kinerja yang menjadi penugasan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi (Km) dengan target 6.928 Km.

2.2.1 Analisis Capaian Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi sepanjang 6.915 Km atau capaian 99,81% dari target kinerja tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 dengan penambahan penyelesaian pembangunan jalur ganda KA Kiaracandong – Cicalengka sepanjang 9,1 Km dari Km 159+500 s.d Km 164+500 serta 182+600 s.d 178+500 pada tahun 2024 dan telah dilakukan *Switch Over*/beroperasi pada awal Tahun 2025.

Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Panjang Jalur KA yang Beroperasi	=	Panjang jalur KA (sampai dengan Tahun Berjalan-1)	+	Panjang jalur KA yang di bangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi
----------------------------------	---	---	---	---

Sehingga perhitungan Capaian Kinerja sebagai berikut :

$$\text{Panjang Jalur KA yang Beroperasi (Km)} = 6.915 + 0^* = 6.915 \text{ Km}$$

* Pekerjaan selesai di tahun 2027 (MYC)

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja Triwulan IV/ tahun 2025 sebesar 6.195 Km dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 6.928 Km, didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 99,81% (on the right track).

Selain itu untuk pelaksanaan indikator kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi telah ditetapkan kegiatan pendukung indikator kinerja pada tahun anggaran 2025, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
- 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Detail pencapaian kinerja indikator kinerja berjenjang dari pelaksanaan kegiatan pendukung tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada lampiran Laporan Kinerja Tahun 2025.

2.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan yaitu untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 99,81%.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 99.81%.

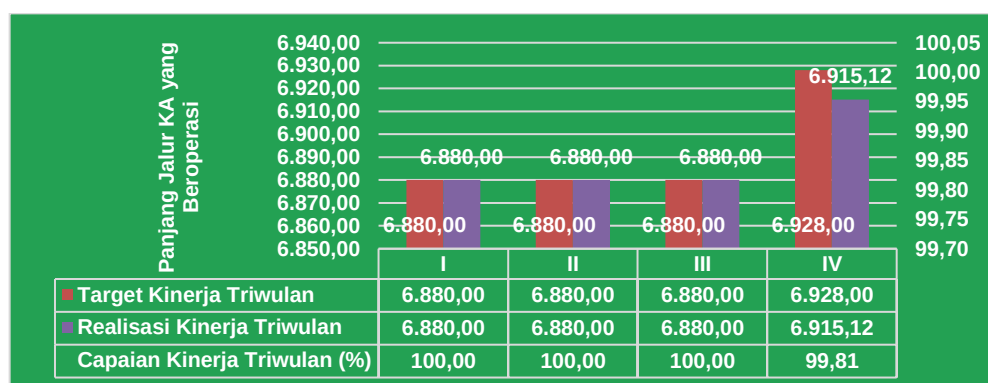
Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 5

Perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan Indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Panjang Jalur KA yang Beroperasi	%	6.928,00	6.880	6.880	6.880	6.928	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.915,12	100,00	100,00	100,00	99,81	99,81

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 7

Grafik Capaian Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi per triwulan

2.2.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

Analisis Keberhasilan pada Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 telah diselesaikan pekerjaan pembangunan jalur kereta api dan telah dioperasikan Km 159+500 – Km 164+500 segmen Kiarcondong - Gedebage dan Km 178+500 - Km 182+600 segmen Haurpugur - Cicalengka lintas Kiarcondong – Cicalengka secara total antara Kiarcondong – Cicalengka lintas Bogor – Yogyakarta sepanjang 9,1 Km, terdapat peningkatan kapasitas dan waktu tempuh yang semula jalur tunggal menjadi jalur ganda. Selain itu keberhasilan capaian kinerja dengan telah dilakukan **penyesuaian aktivitas** Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi pada tahapan pembangunan sampai dengan pengopersasian jalur ganda kereta api antara Kiarcondong - Cicalengka.

Selain pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Panjang jalur KA yang Beroperasi telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III. 8

Sebaran Jabatan Indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	2
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	8
3	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1
4	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	1
5	Perekayasa Ahli Pertama	4
6	Pranata Komputer Ahli Pertama	3
7	penata laksana jalan dan jembatan terampil	3
8	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	32
9	Petugas Transportasi	4

Sebagai pelaksanaan Indikator Kinerja yang mendukung kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan tugas dan fungsi serta proses bisnis sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian terdapat **crosscutting aktivitas** yaitu dalam penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) bidang konektivitas dan pelayanan prasarana perkeretaapian. Stakeholder/ Pemerintah Daerah/Konsultan perencana menyusun dan memperbaiki *Detail Engineering Design* (DED) dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan pengecekan dan koreksi, asistensi serta pengesahan dokumen DED. Sesuai dengan proses bisnis penyusunan DED bagian/proses dari proses bisnis HUB-09.01.01.CFM.01 Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, dimana tercapat **crosscutting kinerja** dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yaitu Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dengan hasil kinerja menyediakan dokumen Study Feasibility Study (FS) dan Penetapan Trase serta Penetapan Pola Operasi Jalur Kereta Api dan Balai Teknik

Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api, selanjutnya dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian serta untuk pengawasan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Penyusunan piagam manajemen risiko tahun 2025 berdasarkan konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan penetapan perjanjian kinerja tahun 2025 dimana pada konsep Rencana Strategis dan penetapan perjanjian kinerja awal tahun 2025 belum mengakomodir indikator kinerja penugasan dari RPJMN Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi.

2.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi periode 2022 sampai dengan 2025 belum bisa dilakukan perbandingan, dikarenakan indikator kinerja ini baru dan belum terakomodir di Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024. Penjelasan Tabel perbandingan periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III. 6
Indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi	%	-	-	-	6.195	-	-	6.915	6.915

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 9

Perbandingan Target dan Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

2.2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA Periode Tahun 2025 - 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 7

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi	Km	6.928	6.928	6.937	6.937	6.985	6.915	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Keterangan : Target Renstra berdasarkan penyesuaian target kinerja Perjanjian Kinerja pertahun
Gambar III. 10

Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi

Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Renstra 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

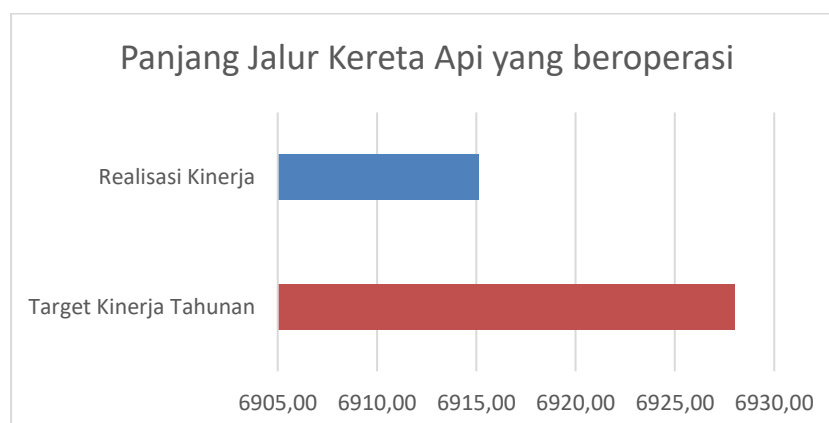
Tabel III. 8

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi	Km	6.928	6.915	99,81%

*) Penyesuaian target berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Renstra 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 11

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Periode Renstra 2025

2.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (*Benchmarking* Kinerja)

Dari hasil perbandingan kinerja level nasional untuk indikator kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi diketahui bahwa kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Panjang Jalur Kereta Api negara india (benchmarking) kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 9
Benchmarking Kinerja Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

NEGARA	PANJANG JALUR (KM)
INDONESIA	6.915,12
INDIA	106.493

Sumber Data : Annual Report Indian Railways Years book 2022-2022
<https://www.thehinducentre.com/resources/69007872-Year-Book-2022-23-English.pdf>

2.2.7 Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 Indikator Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi

Sebagai pelaksanaan penugasan Prioritas Nasional melalui RPJMN 2025-2029 Kegiatan Prioritas Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan AK Antar Barang, Direktorat Prasarana Perkeretapihan mengampu penugasan dari Indikator KP1 : Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi dengan target RPJMN tahun 2025 sebesar 6.928 Km dan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 6.915 Km, perbandingan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Tabel III. 10

 Tabel Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi **Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi**

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi	Km	6.928	6.915	99,81%

Dari gambar diagram diatas perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Nasional/RPJMN tahun 2025 dengan hasil capaian kinerja 99,81%.

2.2.8 Kendala/Hambatan Pada Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 indikator kinerja kegiatan terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan penanganan/ pengendalian sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi yaitu :

1. Untuk indikator Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi masih belum terintegrasi dengan Manajemen Risiko pada tahun 2025, dikarenakan penetapan piagam manajemen risiko pada awal tahun 2025 berdasarkan konsep Rencana Strategis dan perjanjian kinerja awal tahun 2025, yang belum mengakomodir indikator kinerja penugasan dari RPJMN Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi;
2. Terdapat perubahan Km pada lintas yang dapat mempengaruhi perhitungan Panjang Jalur Kereta Api;
3. Masih terdapat permohonan perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang belum selesai dikarenakan masih terdapat kekurangan data dukung perizinan.

2.2.9 Upaya Peningkatan Kinerja pada Indikator Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang beroperasi

Sebagai untuk mencapai/peningkatan kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi/aktivitas/anggaran serta jabatan/pegawai sebagai berikut :

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi;

3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi;
 4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.
- b. Penyesuaian Aktivitas :**
1. Sinkronisasi data prasarana dengan Balai Teknik Perkeretaapian/Satuan Pelayanan dan pengembalian data primer di lokasi-lokasi yang mengalami perubahan pada GAPEKA.
 2. Pengawasan kegiatan pendukung RPJMN Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi secara berkala.
- c. Penyesuaian Anggaran :**
1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
 2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
 3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.
- d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :**
1. Pembentukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Perkeretaapian;
 2. Penetapan Tim Pengelola Anggaran TA 2026;
 3. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan pegawai.

III.2. 3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan proses bisnis dan implementasi dukungan peningkatan pelayanan transportasi perkeretaapian sebagaimana dituangkan didalam

Penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Revisi ke-III Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025, terdapat penambahan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana dengan target 32,20%.

Perencanaan teknis yang menjadi target kinerja tahun 2025 adalah sebanyak 7 *Basic Engineering Design (BED)/Detail Engineering Design (DED)* yaitu BED Stasiun Padalarang, BED Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap II, DED Penanganan Daerah Rawan Banjir Jalur Kereta Api Lintas Bandung-Banjjar, DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam, Reviu DED Fasilitas Operasi Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I, DED Stasiun Tenjo Baru, Reviu DED Fasilitas Operasi Kereta Api Stasiun Rangkasbitung.

2.3.1 Analisis Capaian Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian sebesar 33,90% atau capaian 105,28% dari target tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 dengan telah disahkan sebanyak 8 (delapan) *Basic Engineering Design (BED)/Detail Engineering Design (DED)* yaitu BED Stasiun Padalarang, BED Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap II, DED Penanganan Daerah Rawan Banjir Jalur Kereta Api Lintas Bandung-Banjjar, DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam, Reviu DED Fasilitas Operasi Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I, DED Stasiun Tenjo Baru, Reviu DED Fasilitas Operasi Kereta Api Stasiun Rangkasbitung dan BED Jabodetabek *Railway Capacity Enhancement*.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ke-III Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

% Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan	Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan
---	--

$$\text{Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d. Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d tahun 2029}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d. Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d tahun 2029}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan Capaian Kinerja sebagai berikut :

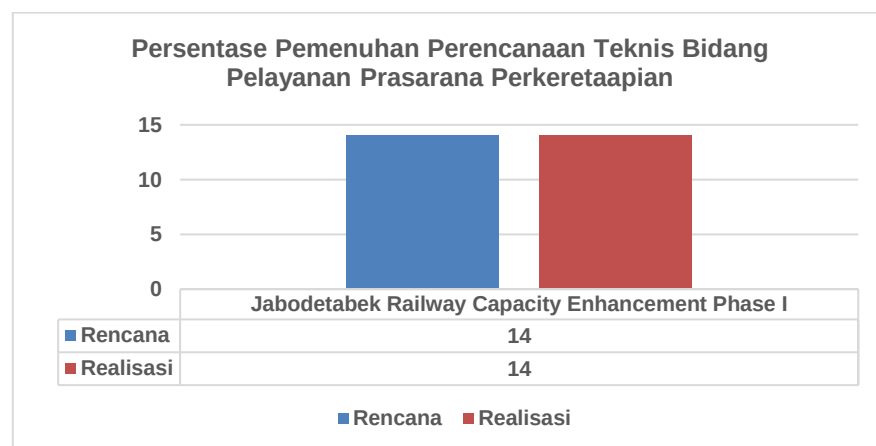
$$\begin{array}{l} \text{\% Pemenuhan} \\ \text{Perencanaan Teknis} \\ \text{Bidang Pelayanan} \\ \text{Prasarana} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{(12+8) \text{ Detail Engineering Design (DED)}}{59 \text{ Basic Engineering Design (BED) / Detail Engineering Design (DED)}} \times 100\% = 33,90\%$$

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja Triwulan IV/tahun 2025 sebesar 38,90% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 32,20% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 105,27% (*on the right track*).

Selain itu Untuk pelaksanaan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian telah ditetapkan kegiatan pendukung indikator kinerja pada tahun anggaran 2025, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I.

Dengan Realisasi kegiatan pendukung sebagaimana tergambar didalam grafik dibawah ini:



Gambar III. 32

Grafik Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat kegiatan yang masih dalam blokir anggaran (*) dan indikasi anggaran tidak terserap yaitu Jabodetabek

Railway Capacity Enhancement Phase I dengan Pagu TA 2025 sebesar Rp. 93.279.566.000,- (PHLN).

Detail pencapaian kinerja indikator kinerja berjenjang dari pelaksanaan kegiatan pendukung tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada lampiran Laporan Kinerja Tahun 2025.

2.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

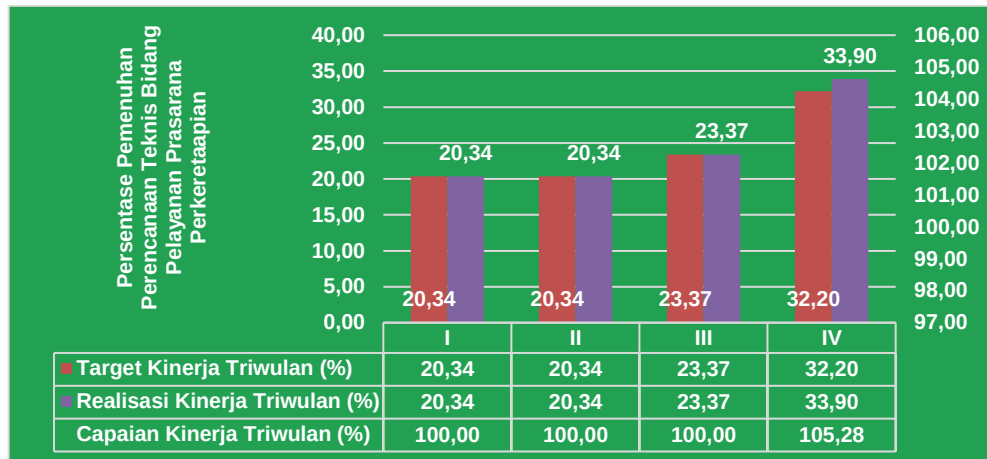
Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan yaitu untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 101,31%.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 105,27%. Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 41
 Perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	32,20	20,34	20,34	23,37	32,20	20,34	20,34	23,37	33,90	100,00	100,00	100,00	105,28	105,28

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 13

Grafik Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian per triwulan

2.3.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah - langkah telah dilakukan yaitu penetapan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 32,20% mengacu kepada penetapan target 2025 mengacu kepada target Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan rangkaian proses bisnis penyusunan *Basic Engineering Design* (BED)/ *Detail Engineering Design* (DED) dan telah disahkan 8 DED yaitu BED Stasiun Padalarang, BED Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap II, DED Penanganan Daerah Rawan Banjir Jalur Kereta Api Lintas Bandung-Banjarnegara, DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam, Reviu DED Fasilitas Operasi Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I, DED Stasiun Tenjo Baru, Reviu DED Fasilitas Operasi Kereta Api Stasiun Rangkasbitung dan BED Jabodetabek *Railway Capacity Enhancement* dengan realisasi kinerja 33,90%.

Untuk mendukung keberhasilan dalam pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian yang ditargetkan pada tahun

2025 telah dilakukan **penyesuaian strategi** yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target pengesahan BED/DED, dimana identifikasi dan penilaian risiko masih tergabung Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dan telah ditetapkan **aktivitas**/kegiatan penanganan risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penyampaian jadwal asistensi *Detail Engineering Design*;
2. *Transfer of Knowledge/Sharing knowledge* teknis jalur dan bangunan kereta api antar pegawai;
3. Penambahan poin pada Risalah Rapat/Berita Acara terkait deadline penyampaian perbaikan oleh konsultan;
4. Pengawasan kepada konsultan terhadap proses perbaikan gambar desain hasil asistensi.

Selain itu keberhasilan capaian kinerja dengan telah dilakukan **penyesuaian aktivitas** yaitu percepatan proses pengecekan gambar desain dan pelaksanaan asistensi lanjutan Desain Engineering Desain secara berkala sebagai langkah percepatan pengesahan *Detail Engineering Design* (DED). **Penyesuaian Jabatan/pegawai** yaitu dengan penambahan SDM sebagai *Person In Charge* (PIC) yang menangani pemeriksaan gambar desain semula 1 orang menjadi 3 orang. Selain pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III. 52

Sebaran Jabatan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	2
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	8
3	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1

4	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	1
5	Perekayasa ahli Pertama	3
6	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
7	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	1
8	penata laksana jalan dan jembatan terampil	2
9	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	18
10	Penata Layanan Operasional	4
11	Petugas Transportasi Perkeretaapian	6

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 pada kegiatan pendukung indikator kinerja pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian anggaran** telah dilakukan usulan buka blokir untuk kegiatan lain yaitu pembayaran kekurangan perawatan prasarana perkeretaapian tahun 2024 (Backlog IMO) sesuai dengan penetapan Revisi DIPA/POK ke 14 TA 2025.

Sebagai pelaksanaan Indikator Kinerja yang mendukung kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan tugas dan fungsi serta proses bisnis sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian terdapat **crosscutting aktivitas** yaitu dalam penyusunan DED bidang konektivitas prasarana perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian Stakeholder/ Pemerintah Daerah/Konsultan perencana menyusun dan memperbaiki DED dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan pengecekan dan koreksi, asistensi serta pengesahan dokumen DED. Sesuai dengan proses bisnis penyusunan DED bagian/proses dari proses bisnis HUB-09.01.01.CFM.01 Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, selain itu Balai Teknik Perkeretaapian melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung pelayanan transportasi kereta api, selanjutnya dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian serta untuk pengawasan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

2.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian periode 2022 sampai dengan 2025, belum bisa dilakukan perbandingan pada tahun 2022 s.d 2024 dikarenakan indikator kinerja ini baru dan belum terakomodir di Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024. Penjelasan Tabel perbandingan periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III. 13

Indikator kinerja kegiatan persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	-	-	-	32,20	-	-	20,34*	33,90

Keterangan : * Baseline kinerja yang ditetapkan didalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 14

Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

2.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA Periode Tahun 2025 - 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 14
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	32,20	33,90	44,07	98,31	100,00	33,90	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 15

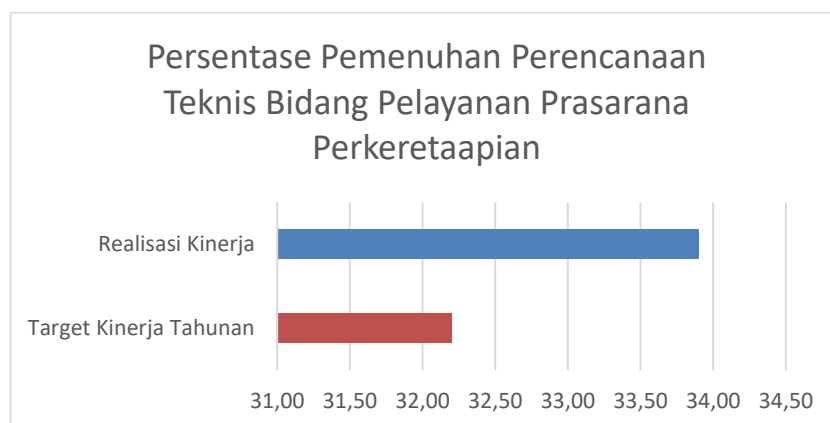
Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Renstra 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III. 5
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	32,20	33,90	105,27%

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Renstra 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 16
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Periode Renstra 2025

2.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Untuk laporan kinerja periode triwulan IV perbandingan kinerja level internasional Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana dengan *Ministry Of Transportation* Malaysia dengan perbandingan (*benchmarking*) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel III. 15
Perbandingan (*Benchmarking*) kinerja Desain Mendukung Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan MoT Malaysia

Aspek utama	Penjelasan	Indonesia	Malaysia
Desain	Dasar Desain	Desain prasarana perkeretaapian yang saat ini telah dibangun, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM No 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur KA dan Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor SK-K3DJKA 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Spesifikasi Teknik Jalur dan Bangunan Ka	Desain prasarana perkeretaapian di Malaysia mengacu pada pedoman Department of Railways (DOR) di bawah Ministry of Transport Malaysia (MOT), yang menetapkan standar teknis melalui dokumen Guidelines for Rail Infrastructure and Facilities Design. Standar ini memastikan kesesuaian dengan Public Transport Policy Framework serta integrasi dengan National Transport Policy 2019–2030.
	Desain Inklusifitas / aksesibilitas fisik	<p>Desain Prasarana Perkeretaapian yang memperhatikan inklusifitas dan aksesibilitas berdasarkan Permenhub 98 Tahun 2017 Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan PM. No. 69 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api.</p> <p>Beberapa penyelenggara perkeretaapian (LRT, MRT, KCIC) telah menyesuaikan design yang ada dengan mempertimbangkan inklusifitas. Saat ini karena terbatasnya anggaran, masih banyak stasiun yang belum dilakukan revitalisasi dengan mempertimbangkan aspek aspek inklusifitas guna mendukung Transportasi Berkelanjutan.</p> <p>Penerapan desain Inklusifitas pada beberapa stasiun di Indonesia seperti dengan penyediaan <i>guiding block</i> dan penyediaan lift serta akses khusus bagi difabel.</p>	<p>Malaysia menerapkan prinsip Universal Design berdasarkan Malaysian Standard MS 1184:2014 – Universal Design and Accessibility in the Built Environment – Code of Practice, yang mengatur dimensi dan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penerapannya diwajibkan pada seluruh proyek perkeretaapian baru (MRT, LRT, ETS) dan rehabilitasi stasiun lama oleh MRT Corp dan Rapid Rail Sdn. Bhd.</p> <p>Implementasi nyata mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan ramp, lift, tactile paving, signage Braille, dan toilet aksesibel di seluruh stasiun MRT Putrajaya Line. - Konsultasi desain dilakukan bersama organisasi disabilitas seperti Malaysian Association for the Blind (MAB) untuk memastikan standar kenyamanan pengguna. - Pemerintah melalui MOT juga sedang meningkatkan fasilitas lama seperti LRT Kelana Jaya Line dan KL Monorail dengan lift upgrades dan platform barriers agar lebih aman bagi difabel.
Desain	Integrasi Antarmoda dan Intermoda	Integrasi antar moda diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mana didalamnya terdapat asas keterpaduan (integrasi) yang sudah diimplementasikan dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang mana didalamnya	Malaysia memiliki sistem integrasi antarmoda yang komprehensif melalui Transit-Oriented Development (TOD) Strategy yang dikembangkan oleh Land Public Transport Agency (APAD) dan diatur dalam National Physical Plan 3 (NPP-3) serta Greater Kuala Lumpur/Klang Valley Public Transport Master Plan

Aspek utama	Penjelasan	Indonesia	Malaysia
		<p>terdapat sasaran dan kebijakan integrasi transportasi jabodetabek.</p> <p>Beberapa penyelenggara perkeretaapin (LRT, MRT, KCIC) telah menyesuaikan desain yang ada dengan mempertimbangkan aspek integrasi antarmoda dan intermoda. Namun saat ini untuk wilayah diluar Jabodetabek masih perlu peraturan lebih lanjut terkait integrasi antar moda.</p> <p>Penerapan desain integrasi antarmoda pada beberapa stasiun di Indonesia antara lain dengan memperhatikan fasilitas pedestrian agar masih dalam jarak kemauan orang berjalan untuk berpindah mada moda lain.</p>	<p>Implementasi integrasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interkoneksi langsung antar moda (MRT, LRT, KTM Komuter, Monorail, dan Bus Rapid Transit). - Sistem ticketing terintegrasi dengan kartu Touch 'n Go untuk seluruh moda transportasi publik. - Penerapan konsep Seamless Mobility di hub utama seperti KL Sentral dan Pasar Seni Integrated Hub yang berfungsi sebagai pusat perpindahan antarmoda. - Pembangunan Transit Plaza yang menggabungkan jalur pejalan kaki, area komersial, dan akses ke transportasi publik.

*sumber data dapat diakses pada link <https://s.id/DakungBenchmarkDesain>

2.3.7 Kendala/Hambatan Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2025 indikator kinerja kegiatan terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan penanganan/pengendalian sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian yaitu masih dibutuhkan pembahasan terkait DED Jabodetabek Railway Capacity Enhancement yang direncanakan sampai dengan Juni 2026.

2.3.8 Upaya Peningkatan Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Sebagai untuk mencapai/peningkatan kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi/aktivitas/anggaran serta jabatan/pegawai sebagai berikut :

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Pelayanan Prasarana Perkeretaapian;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian;
4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Pembahasan pengecekan dan asistensi lanjutan DED Jabodetabek *Railways Enhancement*;
2. Pengawasan perbaikan hasil asistensi DED Jabodetabek *Railways Capacity Enhancement*.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Perkeretaapian;
2. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;

3. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan pegawai.

III.2. 4. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai dengan Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator Kinerja Kegiatan terdapat perubahan nomenklatur Indikator Kinerja, yang semula Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II berubah nomenklatur menjadi Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai dengan Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2, perubahan berdasarkan arahan sebagaimana rapat sinkronisasi Kementerian Perhubungan dengan Bappenas serta penetapan rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian, target pada tahun 2025 sebesar 95%. Penetapan target kinerja berdasarkan RPJMN periode 2025 – 2029 dan penetapan target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029.

Untuk pengukuran kinerja indikator Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II periode Triwulan IV menggunakan data pengukuran TQI periode III tahun 2025.

2.4.1 Analisis Capaian Kinerja Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai dengan Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan IV tahun 2025 berdasarkan laporan hasil pengukuran Track Quality Index periode 3 tahun 2025 oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) didapatkan hasil realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai dengan Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 sebesar 94,64% atau capaian kinerja dengan jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II sepanjang 5.686,18 Km terdiri dari Kategori I (kecepatan >100 s.d 120 Km/Jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 3,900,059 Km dan Kategori II (kecepatan > 80 s.d 100 Km/jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 1.786,116 Km.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

$$\text{Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang telah diukur dengan hasil TQI Kategori 1 dan 2 pada tahun 2025}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada tahun 2025}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III. 16

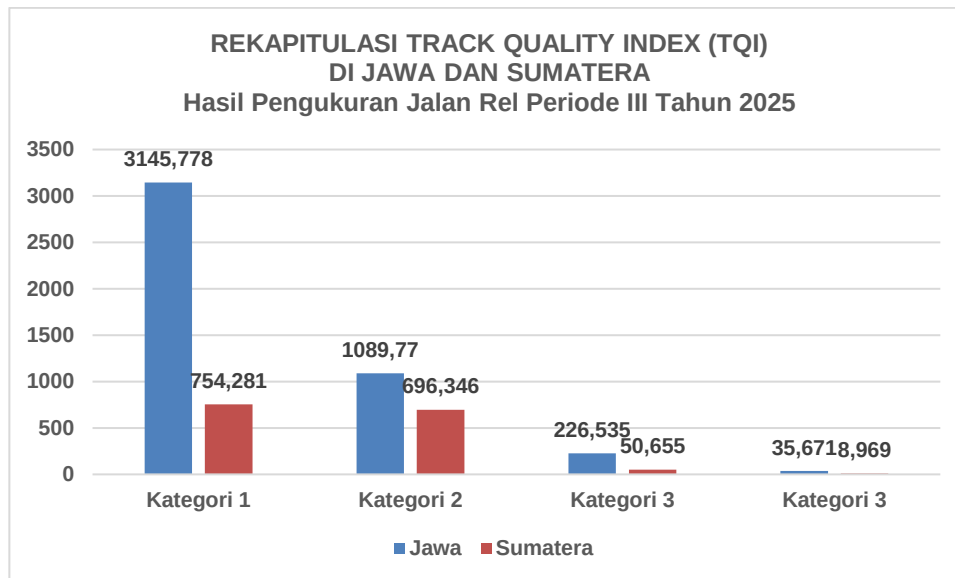
Perhitungan Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Klasifikasi TQI	Kualifikasi		Panjang Jalur (Km)	Jalur Terukur Periode III Tahun 2025 (Km)		
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan : 100 s.d 120 km/jam	6.008,01	6.008,01	5.686,18	94,64%
		Kondisi : Nyaman				
	Kategori 2	Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam			321,83	5,36%
		Kondisi : Aman				
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan : 60 s.d 80 km/jam				
		Kondisi : Waspada				
	Kategori 4	Kecepatan : 40 s.d 60 km/jam				
		kondisi : Bahaya				

Sumber data: Laporan hasil pengukuran dengan menggunakan kereta ukur PT.KAI Periode III tahun 2025

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV/Tahun 2025 sebesar 94,64% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 95,02% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 99,60% (*on the right track*).

Diagram hasil pengukuran periode III tahun 2025 sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar III.17

Rekapitulasi Hasil Pengukuran TQI di wilayah Jawa dan Sumatera periode III tahun 2025

Rincian perbandingan hasil pengukuran per masing-masing wilayah DAOP dan DIVRE periode II dan III tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel III. 17

Perhitungan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori II dan III

No	Wilayah	Panjang Track Periode II 2025 (km)	Panjang Terukur Periode II 2025 (km)	Panjang Track Periode III 2025 (km)	Panjang Terukur Periode III 2025 (km)	Kat.1 (Q<20)			Kat.2 (20<Q<35)			Kat.3 (35<Q<50)			Kat.4 (Q>50)		
						Realisasi periode II 2025	Realisasi periode III 2025	(meningkat/m enurun)	Realisasi periode II 2025	Realisasi periode III 2025	(meningkat/m enurun)	Realisasi periode II 2025	Realisasi periode III 2025	(meningkat/m enurun)	Realisasi periode II 2025	Realisasi periode III 2025	(meningkat/ menurun)
						(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)	
1	DAOP I JAKARTA	732,291	732,291	732,291	732,291	327,022	335,149	↑ 8,13	304,981	301,835	↓ -3,15	84,500	84,320	↓ -0,18	15,788	10,987	↓ -4,80
2	DAOP II BANDUNG	415,235	415,235	415,235	415,235	125,938	125,950	↑ 0,01	166,893	168,266	↑ 1,37	103,409	101,863	↓ -1,55	18,995	19,156	↑ 0,16
3	DAOP III CIREBON	548,320	548,320	548,320	548,320	467,727	476,583	↑ 8,86	79,418	71,252	↓ -8,17	1,175	0,485	↓ -0,69	-	-	↑ 0,00
4	DAOP IV SEMARANG	660,888	660,888	660,888	660,888	507,442	515,148	↑ 7,71	142,719	137,308	↓ -5,41	9,458	6,775	↓ -2,68	1,269	1,657	↑ 0,39
5	DAOP V PURWOKERTO	477,942	477,942	477,942	477,942	358,627	362,799	↑ 4,17	116,762	113,414	↓ -3,35	2,545	1,729	↓ -0,82	0,008	-	↓ -0,01
6	DAOP VI YOGYAKARTA	392,972	392,972	429,639	429,639	332,323	366,263	↑ 33,94	58,554	57,824	↓ -0,73	1,760	4,484	↑ 2,72	0,335	1,068	↑ 0,73
7	DAOP VII MADIUN	422,579	422,579	422,579	422,579	382,410	390,728	↑ 8,32	38,925	31,691	↓ -7,23	1,244	0,160	↓ -1,08	-	-	↑ 0,00
8	DAOP VIII SURABAYA	549,757	549,757	549,757	549,757	390,745	391,593	↑ 0,85	135,975	136,732	↑ 0,76	20,468	18,898	↓ -1,57	2,569	2,534	↓ -0,04
9	DAOP IX JEMBER	261,103	261,103	261,103	261,103	178,408	181,565	↑ 3,16	72,010	71,448	↓ -0,56	10,491	7,821	↓ -2,67	0,194	0,269	↑ 0,08
Jumlah Rata-Rata		4.461,087	4.461,087	4.497,754	4.497,754	3.070,642	3.145,778	↑ 75,14	1.116,237	1.089,770	↓ -26,47	235,050	226,535	↓ -8,51	39,158	35,671	↓ -3,49
1	DIVRE I SUMATERA UTARA	456,656	456,656	467,856	467,856	176,042	256,875	↑ 80,83	255,391	192,030	↓ -63,36	20,425	12,822	↓ -7,60	9,300	6,129	↓ -3,17
2	DIVRE II SUMATERA BARAT	107,044	107,044	108,227	108,227	14,078	15,423	↑ 1,35	76,203	79,101	↑ 2,90	15,288	12,005	↓ -3,28	2,045	1,698	↓ -0,35
3	DIVRE III PALEMBANG	485,989	485,989	485,989	485,989	268,752	345,658	↑ 76,91	200,890	133,693	↓ -67,20	15,304	6,322	↓ -8,98	2,089	0,316	↓ -1,77
4	DIVRE IV TANJUNG KARANG	448,179	448,179	448,179	448,179	74,810	136,325	↑ 61,52	331,144	291,522	↓ -39,62	40,516	19,506	↓ -21,01	0,882	0,826	↓ -0,06
Jumlah Rata-Rata		1.497,868	1.497,868	1.510,251	1.510,251	533,682	754,281	↑ 220,60	863,628	696,346	↓ -167,28	91,533	50,655	↓ -40,88	14,316	8,969	↓ -5,35
Jumlah Total		5.958,955	5.958,955	6.008,005	6.008,005	3.604,324	3.900,059	↑ 295,74	1.979,865	1.786,116	↓ -193,75	326,583	277,190	↓ -49,39	53,474	44,640	↓ -8,83

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Jalur Kereta Api oleh PT.Kereta Api Indonesia periode II dan III Tahun 2025

Dari hasil pengukuran TQI sebagaimana Tabel III.17 dilakukan perbandingan kinerja pengukuran TQI periode I tahun 2024 dan kinerja pengukuran TQI periode III tahun 2025 didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Perbandingan Capaian Kinerja Berdasarkan periode II tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Berdasarkan periode III tahun 2025 sebagaimana pada Tabel II.6 dengan peningkatan kinerja sebesar 0,93% dari semula 93,71% pada pengukuran periode II tahun 2025 meningkat menjadi 96,64% pada pengukuran periode III tahun 2025;
- b. Sedangkan panjang jalur kereta api yang terukur periode II tahun 2025 dengan panjang 5.958,96 Km dan periode III tahun 2024 dengan panjang 6.008,01 Km (lebih panjang jalur yang terukur periode III Tahun 2025 sepanjang 49,05 Km);
- c. Dari hasil pengukuran per kategori perbandingan periode II tahun 2025 dan periode III tahun 2025 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Kategori I : Realisasi Periode II tahun 2025 sepanjang 3.604,32 Km dan Realisasi Periode III tahun 2025 sepanjang 3.900,06 Km (terdapat peningkatan panjang TQI Kategori I di periode III tahun 2025 sepanjang +295,735 Km);
 - Kategori II : Realisasi Periode II tahun 2025 sepanjang 1.979,87 Km dan Realisasi Periode III tahun 2025 sepanjang 1.786,12 Km (terdapat penambahan panjang TQI Kategori II di periode III tahun 2025 sepanjang -193,75 Km);
 - Kategori III : Realisasi Periode II tahun 2025 sepanjang 326,58 Km dan Realisasi Periode III tahun 2025 sepanjang 277,19Km (terdapat penurunan panjang TQI Kategori III di periode III tahun 2025 sepanjang – 49,39 Km);
 - Kategori IV : Realisasi Periode II tahun 2025 sepanjang 53,47 Km dan Realisasi Periode III tahun 2024 sepanjang 44,64 Km (terdapat penurunan panjang TQI Kategori IV di periode III tahun 2025 sepanjang – 8,83 Km);

- d. Dari hasil perbandingan periode II dan periode III tahun 2025 terdapat penurunan pada Kategori III dan Kategori IV yaitu sepanjang 58,227 Km atau 0,93%.

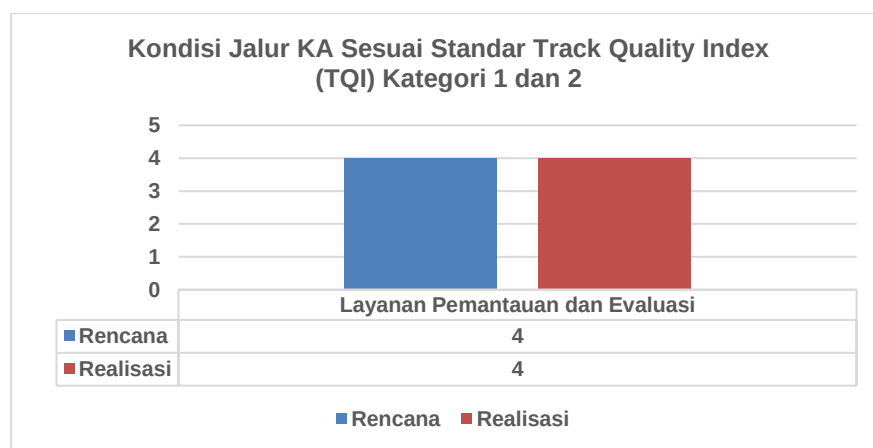
Data perbandingan per wilayah DAOP/DIVRE sebagaimana dijelaskan didalam Tabel III.17.

Untuk pengukuran kinerja pada triwulan IV tidak menggunakan data pengukuran TQI periode IV Tahun 2025 dikarenakan pengukuran jalur kereta api dilaksanakan di bulan November - Desember 2025 dan masih perlu dilakukan pengolahan data hasil pengukuran serta evaluasi hasil pengukuran jalur kereta api TQI periode IV akan dilaksanakan pada awal bulan tahun 2026.

Sesuai dengan penetapan kegiatan pendukung tahun anggaran 2024 Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi pendukung Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori 1 dan 2 diantaranya sebagai berikut:

1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Progres pelaksanaan kegiatan pendukung yang menjadi indikator kinerja berjenjang Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai dengan Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 sebagaimana tergambar di grafik dibawah ini :



Gambar III.18

Grafik Capaian Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori 1 dan 2

Detail pencapaian kinerja indikator kinerja berjenjang dari pelaksanaan kegiatan pendukung tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada lampiran Laporan Kinerja Tahun 2025.

2.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 99,19%.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 99,60%.

Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 18

Perbandingan capaian kinerja per triwulan Indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai dengan Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	Nilai	95,02	95,02	95,02	95,02	95,02	95,44	93,02	93,71	94,64	100,00	100,00	100,00	99,60	99,60

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 19

Diagram Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 per triwulan dan Tahunan

2.4.3 Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Analisis Keberhasilan kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2 sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2 dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** yaitu dilakukan pengukuran pada periode bulan Agustus s.d September 2025 dan telah selesai dilakukan pengolahan data hasil kereta ukur periode III tahun 2025 oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero). **Penyesuaian organisasi** tahun 2025 yaitu dengan telah dilakukan pembentukan tim evaluasi hasil pengukuran indeks kualitas jalan rel (*Track Quality Index*) dengan Kereta ukur melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor SK-K3DJKA 11 Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil pengukuran TQI. **Perubahan budaya kinerja** sebagai tindaklanjut penetapan Tim Evaluasi TQI tahun 2025 telah dilakukan evaluasi hasil pengukuran TQI periode ke-3 tahun 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, PT. Kereta Api Indonesia (persero) dan Balai dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel III.19
Perbandingan Ketagori I dan Kategori II per periode I s.d Periode III Tahun 2025

No	WILAYAH		NILAI TQI KATEGORI 1 & 2*				Ket
			TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	Selisih	
1	BTP KELAS I MEDAN	Eksisting	92,91%	94,48%	96,01%	1,53	Naik
		Penambahan (Aceh)			93,4%		
2	BALAI KELAS II PADANG	Eksisting	87,71%	84,34%	87,79%	3,45	Naik
		Penambahan (Teluk Bayur - Bukit Putus)			46,5%		
3	BALAI KELAS II PALEMBANG	Eksisting	91,67%	93,73%	97,04%	3,31	Naik
4	BTP KELAS I JAKARTA	Eksisting	87,68%	87,47%	88,29%	0,82	Naik
5	BTP KELAS I BANDUNG	Eksisting	85,64%	86,36%	87,39%	1,03	Naik

No	WILAYAH		NILAI TQI KATEGORI 1 & 2*				Ket
			TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	Selisih	
6	BTP KELAS I SEMARANG	Eksisting	98,99%	99,00%	99,21%	0,21	Naik
		Penambahan (Solo - Wonogiri)			72,89%		
7	BTP KELAS I SURABAYA	Eksisting	97,02%	97,17%	99,01%	1,84	Naik

Sumber data : Lampiran Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor KA.008/430/K3/DJKA/2025

Sebagai tindaklanjut evaluasi pengukuran TQI, dilakukan **penyesuaian aktivitas** telah disampaikan Surat Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : KA.008/430/K3/DJKA/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Evaluasi Hasil Pengukuran Jalan Rel dengan Kereta Ukur dan Accelerometer Triwulan III Tahun 2025 kepada Managing Director of Rolling Stock and Infrastructure PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Balai Teknik Perkeretaapian dengan nilai TQI sebesar 94,64%

Dari hasil evaluasi TQI periode I sampai dengan dengan periode III tahun 2025 disimpulkan bahwa, kegiatan peningkatan dan perawatan jalur kereta api mendukung keberhasilan dalam mempertahankan atau meningkatkan kategori TQI Kategori 1 dan Kategori 2.

Capaian *Track Quality Index* (TQI) juga didukung oleh penambahan panjang jalur yang diukur dari periode II sepanjang 5.958,95 Km dan periode III sepanjang 6.008 Km dengan penambahan sebagai berikut :

1. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Koridor/Petak Jalan Solo Kota - KArtasura sepanjang 4,8 Km dengan dan Solo Kota - Wonogiri sepanjang 31,85 Km
2. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan pada Koridor/Petak Jalan Kreung Geukeuh - Kreungmane sepanjang 11,20 Km
3. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang pada Koridor/Petak Jalan Teluk Bayur – Bukitputus

Selanjutnya keberhasilan didukung oleh tindaklanjut dari hasil evaluasi pengukuran periode kedua tahun 2025 oleh Balai Teknik Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), guna peningkatan realisasi TQI

periode 3 tahun 2025 sebagai langkah-langkah **penyesuaian Aktivitas/Strategi**.

Sebagai pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2 telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III. 20

Sebaran Jabatan Indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai dengan Standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2

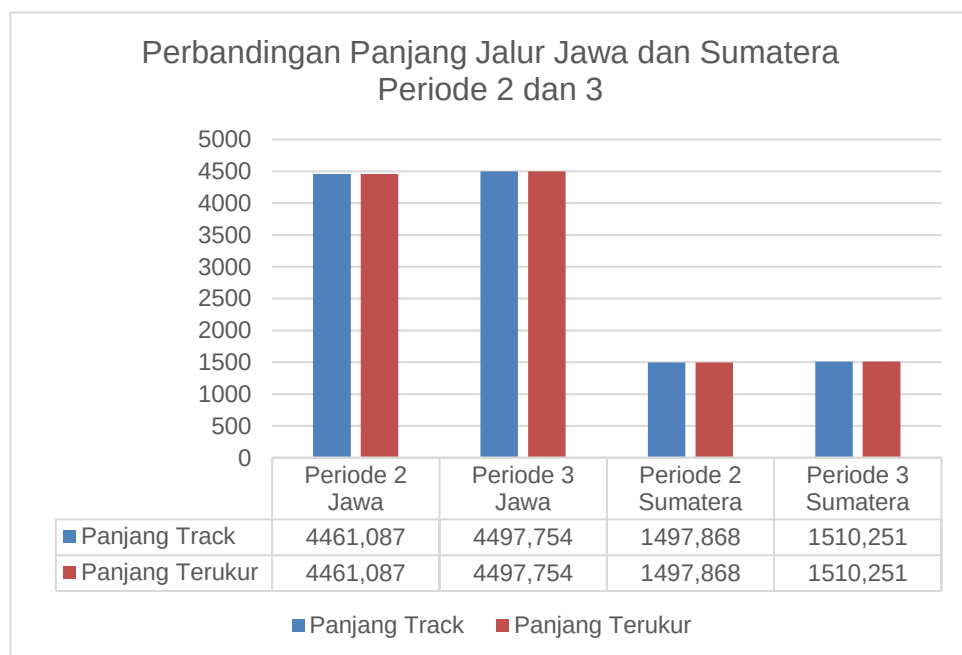
No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	2
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	7
3	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1
4	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	1
5	Perekayasa ahli Pertama	1
6	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
7	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	13
8	Penata Layanan Operasional	5
9	Petugas Transportasi Perkeretaapian	1

Perubahan budaya kinerja/Inovasi dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran *Track Quality Index* (TQI) antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (persero) secara berkala memberikan dampak yang baik dengan adanya mempetahankan nilai TQI dan peningkatan nilai TQI sebagai berikut :

- Kategori I : Realisasi Periode II tahun 2025 sepanjang 3.604,32 Km dan Realisasi Periode III tahun 2025 sepanjang 3.900,06 Km (terdapat peningkatan panjang TQI Kategori I di periode III tahun 2025 sepanjang +295,735 Km);
- Kategori II : Realisasi Periode II tahun 2025 sepanjang 1.979,87 Km dan Realisasi Periode III tahun 2025 sepanjang 1.786,12 Km (terdapat penambahan panjang TQI Kategori II di periode III tahun 2025 sepanjang -193,75 Km);

Atau dengan peningkatan kinerja sebesar 0,93% dari semula 93,71% pada pengukuran periode II tahun 2025 meningkat menjadi 96,64% pada pengukuran periode III tahun 2025.

Selain itu untuk pengukuran dengan menggunakan kereta ukur secara periodik ditahun 2025 dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) dengan perbandingan jalur KA terukur di Jawa dan Sumatera periode I s.d dan III tahun 2025 sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar III.20

Perbandingan pengukuran jalur kereta api per periode menggunakan kereta ukur di tahun 2025

Crosscutting Kinerja tahun 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Balai Teknik Perkeretaapian yaitu Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dengan hasil kinerja Pelaksanaan Evaluasi dari Hasil Pengukuran TQI dan Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 pada wilayah BTP terkait dengan hasil kinerja Pengelolaan pelaksanaan Perawatan dan Peningkatan Jalur Kereta api serta pengukuran TQI melalui penugasan dari BTP kepada PT. Kereta Api Indonesia (persero). Sedangkan ***Crosscutting Aktivitas*** sebagai berikut :

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan pengawasan dalam pengukuran jalur KA, Menerima hasil pengukuran TQI yang dilaksanakan badan usaha dan Melaksanakan Evaluasi dari hasil

- pengukuran TQI oleh Badan Usaha /PT. Kereta Api Indonesia (persero) dan Memberikan Rekomendasi atas hasil pengukuran jalur KA
2. Balai Teknik Perkeretaapian melaksanakan Pengawasan Perawatan dan Peningkatan Jalur Kereta api, Ikut serta dalam pelaksanaan evaluasi hasil pengukuran TQI, Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi;
 3. Badan Usaha (PT.KAI Persero) melaksanakan Pengukuran kualitas jalur kereta api/Track Quality Indeks serta pengolahan data hasil pengukuran, Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi.

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan Manajemen Risiko sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Persentase Jalur KA sesuai dengan TQI Kategori I dan II dengan hasil yaitu:

1. Identifikasi risiko sebanyak 26 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 4 risiko diatas selera risiko dan 22 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 4 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 8 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 8 kegiatan penanganan sebanyak 8 kegiatan penanganan yang telah selesai atau semua penanganan telah dilaksanakan

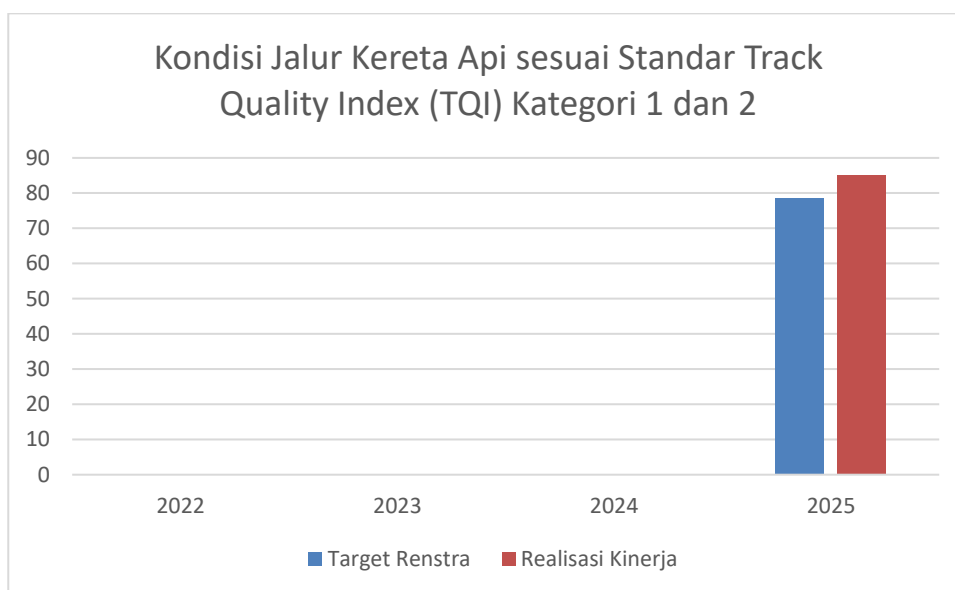
2.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 periode 2022 sampai dengan 2025 dengan akumulasi target sampai dengan tahun 2025 adalah 95% dan akumulasi realisasi sebesar 94,64% dengan persentase 99,60% yang tersebar pada wilayah Jawa dan Sumatera. Tabel perbandingan realisasi dan target kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel III. 21
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	87,10	92,87	94,00	95,02	91,37	93,85	95,02	94,64

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.21
Perbandingan Target dan Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori 1 dan Kategori 2

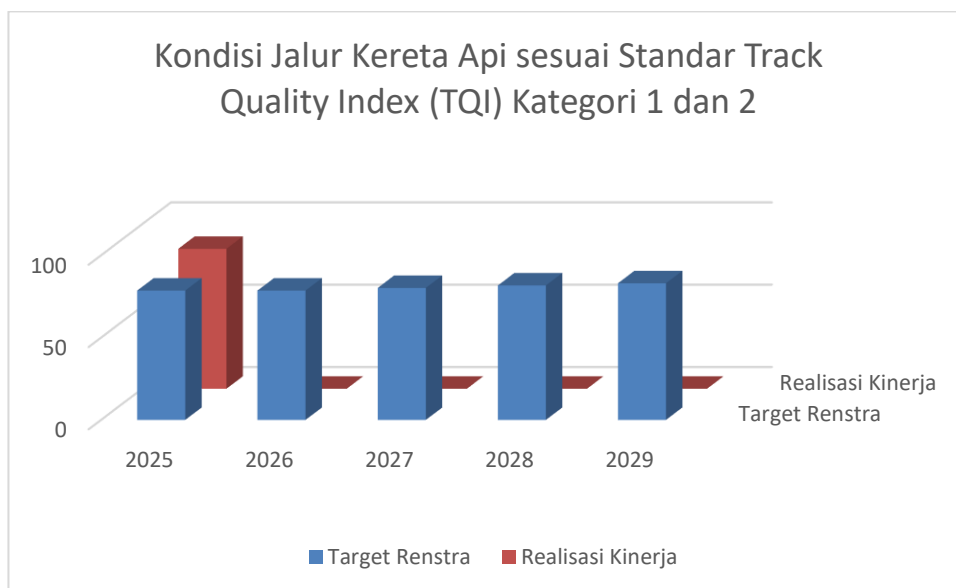
2.4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Kinerja Pada RENSTRA periode Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 22
 Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	94	95	96	97	98	94,64	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.22

Perbandingan Target renstra dan realisasi periode 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

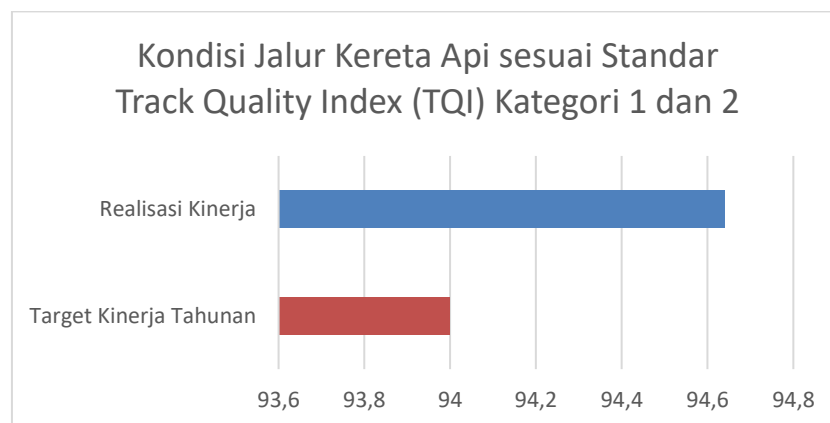
Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III. 23

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	94	94,64	100,68%

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 23

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Periode Renstra 2025

2.4.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Perbandingan kinerja level nasional untuk indikator kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 data pada periode Triwulan IV tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Rating Kondisi Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga, data (benchmarking) kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 24

Benchmarking Kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dan Rating Kondisi Jalan Nasional

UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	95,02	94,64	99,60
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	Rating Kondisi Jalan Nasional	%	97,00	95,22	98,16

Sumber Data : Kemantapan Jalan Tahun 2024 <https://data.pu.go.id/dataset/kemantapan-jalan-nasional>

Dari hasil penelusuran data rating kondisi jalan nasional yang digunakan *benchmarking* masih menggunakan data tahun 2024, dikarenakan data tahun 2025 belum tersedia. Berikut perbandingan Kategori dan Kualifikasi antara Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 data pada periode Triwulan IV tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Rating Kondisi Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai berikut :

Tabel III. 25

**Benchmarking Kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI)
Kategori 1 dan 2 dan Rating Kondisi Jalan Nasional**

Unit Kerja	Indikator Kinerja	Kategori	Nilai	Kualifikasi
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	Kategori 1	$TQI \leq 20$	Kecepatan : 100 s.d 120 km/jam Kondisi : Nyaman
		Kategori 2	$20 < TQI \leq 35$	Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam Kondisi : Aman
		Kategori 3	$35 < TQI \leq 50$	Kecepatan : 60 s.d 80 km/jam Kondisi : Waspada
		Kategori 4	$TQI > 50$	Kecepatan : 40 s.d 60 km/jam Kondisi : Bahaya
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	Rating Kondisi Jalan Nasional	Baik	$IRI \leq 4$	Diperlukan Pemeliharaan Rutin
		Sedang	$4 < IRI \leq 8$	Diperlukan Pemeliharaan Rutin
		Rusak Ringan	$8 < IRI \leq 12$	Diperlukan Pemeliharaan Berkala
		Rusak Berat	$IRI > 12$	Diperlukan Peningkatan/Rekonstruksi

2.4.7 Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 Indikator Kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Sebagai pelaksanaan penugasan Prioritas Nasional melalui RPJMN 2025-2029 Kegiatan Prioritas Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan AK Antar Barang, Direktorat Prasarana Perkeretapihan mengampu penugasan dari Indikator KP3 : Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dengan target RPJMN tahun 2025 sebesar 94% dan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 94,64%, perbandingan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Tabel II.26

Tabel Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dan Rating Kondisi Jalan Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	94	94,64	99,60%

Dari gambar diagram diatas perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Nasional/RPJMN tahun 2025 dengan hasil capaian kinerja 99,60%.

2.4.8 Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan/pengendalian sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Beberapa kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

- a. Standar TQI masih diperlukan pembahasan lanjutan dengan Setditjen Perkeretaapian;
- b. Sesuai dengan pelaksanaan pengukuran periode 4 tahun 2025 terdapat pengurangan Panjang jalur yang diukur yaitu diwilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan khususnya di Aceh tidak bisa dilakukan pengukuran dikarenakan jalur kereta api mengalami kerusakan terdampak bencana banjir;

2.4.9 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Rekomendasi Perawatan Prasarana Perkeretaapian oleh Balai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan wilayah dituangkan didalam evaluasi TQI periode IV;
2. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2;

3. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2;
4. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2;
5. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Pelaksanaan Perawatan Prasarana Perkeretaapian oleh Balai Teknik Perkeretaapian dan BUPP;
2. Penyusunan Timeline Pembahasan Standar TQI dan berkoordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Tim Evaluasi Pengukuran TQI Tahun 2026;
2. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
3. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 sesuai dengan tugas jabatan.

III.2. 5. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator Kinerja Kegiatan terdapat perubahan nomenklatur Indikator Kinerja, yang semula Persentase Pemenuhan

Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal berubah nomenkaltur menjadi Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik, perubahan berdasarkan arahan sebagaimana rapat sinkronisasi Kementerian Perhubungan dengan Bappenas serta penetapan rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian, target pada tahun 2025 terdapat perubahan yang semula 65,27% berubah menjadi sebesar 65,21% namun tidak ada perubahan target *interlocking* elektrik yang selesai di tahun 2025 tetap sebanyak 5 unit *interlocking* yang ditargetkan ditahun 2025. Penetapan target kinerja berdasarkan RPJMN periode 2025 – 2029 dan penetapan target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029.

4.5.1 Analisis Capaian Kinerja Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realiasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik sebesar 65,21% atau atau capaian sesuai dengan target tahun 2025. Penambahan *interlocking* elektrik yang selesai dibangun/ditingkatkan tahun 2025 sebanyak 5 unit *interlocking*.

Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	=	$\frac{\text{Jumlah Unit } \textit{Interlocking} \text{ Sistem Persinyalan Kereta Api berbasis Elektrik s.d Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Unit } \textit{Interlocking} \text{ Sistem Persinyalan Kereta Api pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029}} \times 100\%$
--	---	---

dengan rincian perhitungan capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	=	$\frac{(398+5) \text{ unit}}{618 \text{ unit}} \times 100\% = 65,21\%$
--	---	--

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV/tahun 2025 dengan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 100%, sesuai dengan target kinerja tahunan telah ditetapkan didalam rencana aksi tahun 2025.

Berikut merupakan rincian jumlah sistem persinyalan dengan *interlocking* elektrik dan sistem persinyalan dengan *interlocking* mekanik di wilayah Jawa dan Sumatera sebagai berikut :

Tabel III. 22
 Rincian Jumlah persinyalan elektrik dan mekanik wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2025

NO	WILAYAH KERJA	INTERLOCKING SISTEM PERSINYALAN			
		SISTEM PERSINYALAN (ELEKTRIK & MEKANIK)	ELEKTRIK	MEKANIK	IB
1	BTP KELAS I JAKARTA	63	62	1	51
2	BTP KELAS I BANDUNG	90	63	27	14
3	BTP KELAS I SEMARANG	120	105	15	13
4	BTP KELAS I SURABAYA	116	44	72	12
5	BTP KELAS I MEDAN	56	31	25	0
6	BTP KELAS II PADANG	12	0	12	0
7	BTP KELAS II PALEMBANG	82	28	54	10
8	BPKARSS	14	14	-	-
9	BPKASS	14	14	-	-
10	LRT JABODEBEK	16	16	-	-
11	LRT JAKARTA	6	6	-	-
12	MRT JAKARTA	13	13	-	-
13	KCIC	4	4	-	-
14	APMS	3	3	-	-
TOTAL		609	403	206	100

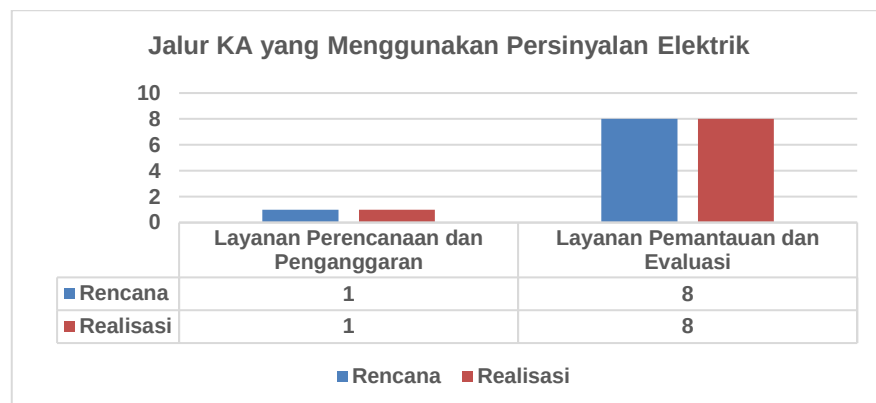
Realisasi kinerja tahun 2025 dengan penambahan 5 unit interlocking elektrik yang sudah selesai dan telah dilakukan pengoperasian yaitu pada Stasiun Serdang, Payakabung, Gelumbang, Karangendah, Lembak hasil

investasi PT. Kereta Api Indonesia (persero) di wilayah BTP Kelas 2 Palembang.

Untuk pelaksanaan indikator kinerja Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik Dengan Teknologi handal telah ditetapkan kegiatan pendukung indikator kinerja pada tahun anggaran 2025 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian, kegiatan pendukung yang menjadi pendukung indikator kinerja Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi handal diantaranya sebagai berikut:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Progres pelaksanaan kegiatan pendukung yang menjadi indikator kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana tergambar di grafik dibawah ini :



Gambar III. 23

Grafik Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik Tahun 2025

Detail pencapaian kinerja indikator kinerja berjenjang dari pelaksanaan kegiatan pendukung tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada lampiran Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025.

4.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik

Rata-rata realisasi capaian kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian

kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 100%. Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 100%.

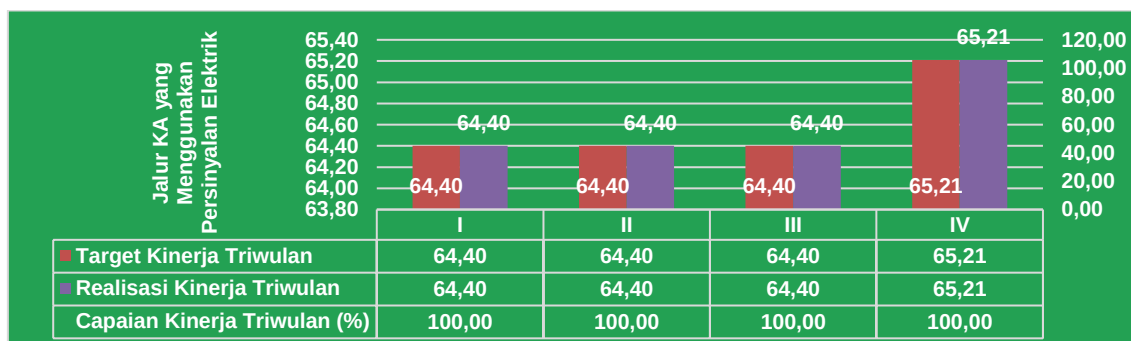
Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.28

Perbandingan capaian kinerja per triwulan Indikator kinerja kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	64,40	64,40	64,40	65,21	64,40	64,40	64,40	65,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 25

Grafik Capaian Kinerja Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik per triwulan

2.3.1 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target pada periode triwulan IV tahun 2025 sebesar 65,21%, Penetapan target 2025 mengacu

kepada target RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029. Dari hasil pengukuran realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 65,21% dengan penambahan sistem interlocking persinyalan elektrik di Stasiun Serdang, Stasiun Payakabung, Stasiun Gelumbang, Stasiun Karangendah, Stasiun Lembak telah dilaksanakan pada pengoperasian Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen 1 Lintas Lahat – Kertapati Sumatera Selatan hasil investasi PT. Kereta Api Indonesia (persero).



Gambar III.26

Dokumentasi Pengoperasian Sistem Persinyalan Kereta Api di Stasiun Payakabung

Penyesuaian aktivitas/strategi secara paralel Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menyelesaikan permohonan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terkait izin teknis pembangunan prasarana perkeretaapian umum Segmen 1 Lintas Lahat– Kertapati Sumatera.

Penyesuaian strategi yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja dan menetapkan aktivitas/kegiatan penanganan risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian Surat Rekomendasi dengan penambahan poin poin pada surat rekomendasi terkait "deadline penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan kembali hasil tindak lanjut ke direktorat prasarana perkeretaapian";
2. Pembentukan Tim Pemeriksaan Pemeliharaan Pekerjaan Sinyal dan Telekomunikasi;
3. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan item bersama pekerjaan Sinyal dan Telekomunikasi;

4. Pembentukan Tim Pemeriksaan Pemeliharaan Pekerjaan Gardu Traksi dan LAA;
5. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan item bersama pekerja Gardu Traksi dan LAA;
6. TOK/Sharing knowledge teknis jalur dan bangunan serta fasilitas operasi.

Selatan selain itu pada tahun 2025 secara berkala dilaksanakan **penyesuaian aktivitas** perhitungan target dan realisasi memanfaatkan data fasilitas operasi hasil sinkronisasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sebagai pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2 telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III.29
Sebaran Jabatan Indikator kinerja kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik

No	Jabatan Pengampu	Total pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	1
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	4
3	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	2
4	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	3
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
6	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	12
7	Penelaah Teknis Kebijakan	1
8	Petugas Transportasi Perkeretaapian	3
9	Penata Layanan Operasional	8
10	Pengelola Layanan Operasional	2
11	Pengadministrasi Perkantoran	1

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Sebagai pelaksanaan Indikator Kinerja yang mendukung kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan tugas dan fungsi serta proses bisnis sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik terdapat **crosscutting aktivitas** yaitu dalam pengendalian serta pengawasan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan Pengendalian perizinan Pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan/ peningkatan fasilitas operasi kereta api serta memberikan rekomendasi, Melaksanakan Pembinaan Bidang Fasilitas Operasi KA kepada Balai di Lingkungan DJKA serta Badan Usaha terkait. Pihak eksternal Balai/Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (persero) melaksanakan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum/Khusus, menindaklanjuti hasil pengawasan/ rekomendasi. Khusus untuk badan usaha penyelenggara Prasarana Perkeretaapian diwajibkan mengajukan izin teknis pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus sebelum melaksanakan pembangunan. Crosscutting aktivitas sebagaimana tertuang didalam Cross Functional Map (CFM) Proses bisnis HUB-06.04.02.CFM.01 Pelayanan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum dan Khusus dan HUB-08.04.01.CFM.02 Pengawasan Bidang Prasarana Perkeretaapian.

Untuk **crosscutting kinerja** dengan Balai Teknik Perkeretaapian/Badan Usaha (PT.KAI Persero) terdapat Indikator kinerja kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan Pembangunan/ peningkatan sistem persinyalan elektrik dan Balai Pengujian Indikator kinerja kegiatan terdapat Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

dengan hasil kinerja melakukan proses pengujian Fasilitas Operasi kereta api yang telah terbangun.

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan **Manajemen Risiko** sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 6 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 6 risiko diatas selera risiko dan 0 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 6 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penanganan risiko (format 8) sebanyak 12 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 12 kegiatan penanganan sebanyak 12 kegiatan penanganan yang telah selesai atau semua penanganan telah dilaksanakan

2.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik periode 2022 sampai dengan 2025 dengan akumulasi target sampai dengan tahun 2025 sebesar 65,21% dan akumulasi realisasi rasio sebesar 65,21% dengan persentase sebesar 100%. Penjelasan Tabel perbandingan periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III. 30
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik	%	58,11	63,92*	64,43*	65,21	58,11	63,99	64,43	65,21

* Nomenklatur indikator kinerja kegiatan Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2024 pada indikator Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.27
Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

2.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra periode Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.31

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik	%	65,21	65,53	66,34	67,96	70,23	65,21	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2020-2024 pada indikator Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.28

Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

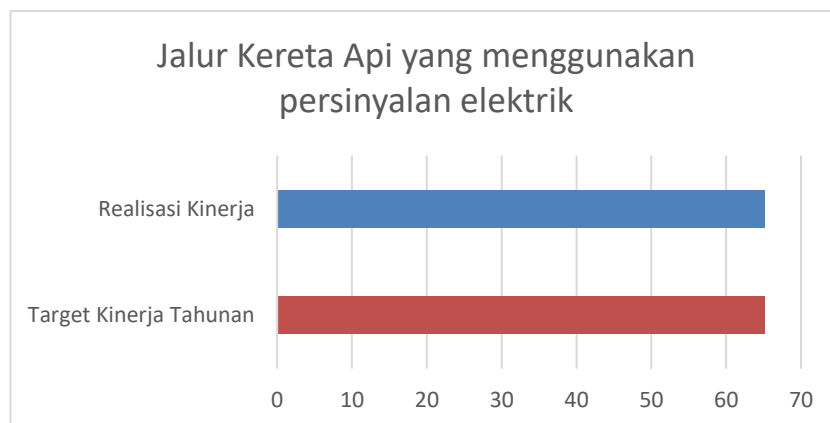
Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Renstra 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III.32

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik	%	65,21	65,21	100%

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja Renstra tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.29

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Periode Renstra 2025

2.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (*Benchmarking* Kinerja)

Dari hasil perbandingan kinerja level nasional untuk indikator kinerja Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik diketahui bahwa kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Sistem Perisnyalan negara india (*benchmarking*) kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut:

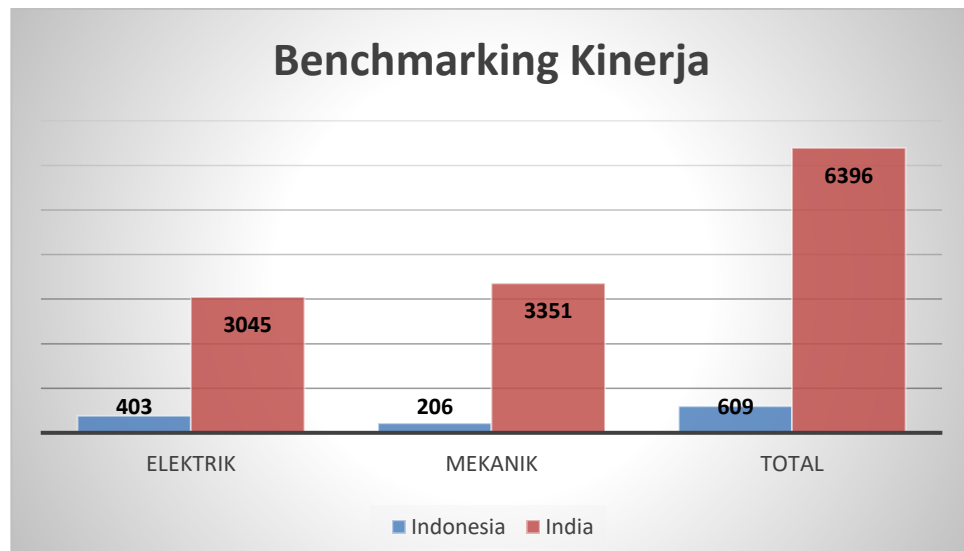
Tabel II. 11

Benchmarking Kinerja Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

NEGARA	PANJANG JALUR (KM)	JUMLAH INTERLOCKING	INTERLOCKING ELEKTRIK	INTERLOCKING MEKANIK	%
INDONESIA	6.915,12	609	403	206	66,17
INDIA	106.493	6.396	3.045	3.351	47,60

Sumber Data : Annual Report Indian Railways Years book 2022-2022
<https://www.thehinducentre.com/resources/69007872-Year-Book-2022-23-English.pdf>

Untuk diagram perbandingan benchmarking Realisasi Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik (Sistem Persinyalan di Indonesia) dengan negara India dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.30

Diagram Perbandingan Target dan Realisasi pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Negara India

Berdasarkan capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Indonesia memiliki total panjang jalur aktif sebesar 6.915, 12 km, yang secara signifikan lebih pendek dibandingkan dengan panjang jalur aktif India yang mencapai 106.493,00 km. Secara kuantitatif, panjang jalur aktif perkeretaapian Indonesia hanya setara dengan sekitar 0,065% dari total panjang jalur aktif perkeretaapian India.

Adapun sistem interlocking persinyalan di Indonesia terdiri dari 609 unit interlocking dengan sistem elektrik dan 403 unit interlocking dengan sistem mekanik sebanyak 206 unit dengan persentase 66,17%. Sementara itu, India memiliki 3.045 unit interlocking elektrik dan 3.351 unit interlocking mekanik, dengan persentase sistem interlocking elektrik sebesar 47,6% dari total sistem interlocking yang terpasang.

2.4.10 Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 Indikator Kinerja Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik

Sebagai pelaksanaan penugasan Prioritas Nasional melalui RPJMN 2025-2029 Kegiatan Prioritas Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan AK Antar Barang, Direktorat Prasarana Perkeretapihan mengampu penugasan dari Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik dengan target RPJMN tahun 2025 sebesar 65% dan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 65,21%, perbandingan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Tabel III.33
 Tabel Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Kondisi Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMN	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	65	65,21	100,32%

Dari gambar diagram diatas perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Nasional/RPJMN tahun 2025 dengan hasil capaian kinerja 100,32%.

2.3.5 Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik yaitu masih terdapat permohonan perizinan pembangunan prasarana perkeretaapihan umum yang belum selesai dikarenakan masih terdapat kekurangan data dukung perizinan.

2.3.6 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau

atau rekomendasi peningkatan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi/aktivitas/anggaran serta jabatan/pegawai sebagai berikut :

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik;
4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Penyelesaian permohonan perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
2. Berkoordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait penetapan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
3. Pengawasan kegiatan pendukung RPJMN prasarana perkeretaapian.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2025;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Perkeretaapian;

2. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
3. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik sesuai tugas jabatan.

III.2. 6. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian Perkeretaapian dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator Kinerja Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian Perkeretaapian dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, tidak ada perubahan nomenklatur atau target kinerja, target pada tahun 2025 sebesar 3,89. Penetapan target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029.

1.6.1 Analisis Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan IV tahun 2025, realisasi capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan realisasi kinerja 3,90 atau dalam range dengan Mutu Pelayanan A/ Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik. sedangkan persentase capaian kinerja sebesar 100,26% terhadap target kinerja triwulan IV/tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja periode triwulan IV tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja periode triwulan IV Tahun 2025 merupakan perhitungan dari rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode triwulan I-IV (bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2025). Dasar penentuan kategori penilaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.34
Tabel Nialai Skala Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analia smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	=	$\frac{\text{Jumlah Nilai IKM s.d Bulan ke - n}}{n}$
---	---	--

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

IKM Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Dit.Prasarana	=	$\frac{(3,75+4,0+3,91+4,0+3,80+3,84+3,87+3,97+3,73+3,98+4+3,98)}{12}$
	=	3,90

Sumber Data Nilai IKM Per Bulan : 1. Nilai IKM Triwulan I Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor :
 2. Nilai IKM Triwulan II Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor :
 3. Nilai IKM Triwulan III Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor :
 UM.006/240/K3/DJKA/2025
 4. Nilai IKM Triwulan IV Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor :

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV/Tahun 2025 sebesar 3,90 dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 3,89 didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 100,26% (*on the right track*).

1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 100,25%.

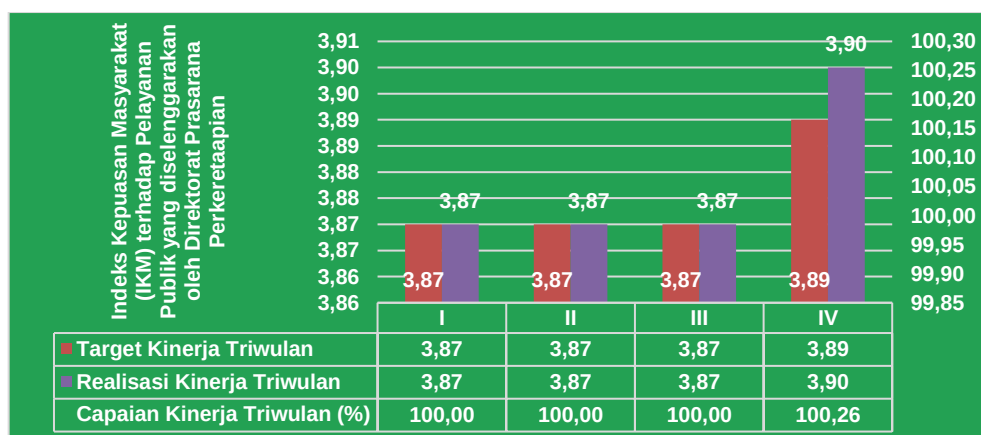
Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.35

Perbandingan capaian kinerja per triwulan Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	3,89	3,87	3,87	3,87	3,89	3,87	3,87	3,87	3,90	100,00	100,00	100,00	100,26	100,26

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.31

Grafik Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian per triwulan

Berikut merupakan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 dari hasil Survey Kepuasan masyarakat dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sebagai berikut

Tabel III.36
 Perbandingan Hasil Survey melalui aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IKM
 (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Prasarana
 Perkeretaapian

No	Bulan	Nilai IKM	Jml Respon	Informasi	Persyaratan	Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/ Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi Pengaduan
1.	Januari	3,75	5	3,76	3,76	3,76	3,64	4	3,64	3,64	3,89
2.	Februari	4,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Maret	3,91	6	3,90	4	3,90	3,90	4	3,80	3,90	3,90
4.	April	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Mei	3,80	3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
6.	Juni	3,84	5	3,88	3,88	3,88	3,88	3,76	3,52	3,88	3,88
7.	Juli	3,87	10	3,94	3,88	3,88	3,82	3,82	3,88	3,94	3,82
8.	Agustus	3,97	5	4	4	4	4	4	3,88	3,88	4
9.	September	3,73	11	3,73	3,78	3,78	3,73	3,67	3,73	3,67	3,73
10.	Oktober	3,98	15	4	3,92	3,96	4	4	3,96	4	4,96
11.	November	4	11	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Desember	4	11	4	3,96	4	4	4	4	4	4
Nilai Agregat		3,90	90								

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dilakukan kepada para pengguna jasa pelayanan bidang prasarana perkeretaapian periode dari Januari s.d Desember 2025.

1.6.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025.

Telah dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** yaitu penyelesaian proses perizinan bidang prasarana perkeretaapian periode triwulan IV tahun 2025 (Januari s.d Desember 2025) sebanyak 161 Pelayanan bidang prasarana perkeretaapian yang telah selesai/diterbitkan terdiri dari :

1. Pelayanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 65 Penetapan
2. Pelayanan Perizinan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum/Khusus sebanyak 1 Penetapan;
3. Pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 95 penetapan sertifikasi.

Penyesuaian strategi yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja dan menetapkan aktivitas/kegiatan penanganan risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan bahan konten yang akan dipublikasikan dan penyusunan dan sosialisasi rencana dan strategi komunikasi tahun 2025;
2. Usulan pengembangan aplikasi perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum atau khusus dengan menambahkan layanan perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian;
3. Arahan pimpinan secara rutin berkala terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi dan Sosialisasi anti gratifikasi melalui media sosial;
4. Monitoring dan inventaris izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan Sinkronisasi data izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian dengan Balai terkait;
5. Bersurat ke pemohon terkait perpanjangan perizinan;
6. Surat pemberitahuan untuk pengajuan izin pembangunan yang sudah terbangun (belum memiliki izin);
7. Asistensi dokumen jalur dan bangunan dan Surat penyampaian hasil asistensi.

Sebagai pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** dalam pemberian pelayanan bagi para pengguna jasa bidang Prasarana Perkeretaapian secara berkelanjutan

petugas/SDM yang menangani pelayanan bidang jasa prasarana perkeretaapian serta pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala.

Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yg diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III.37

Sebaran Jabat Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	5
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	15
3	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	5
4	Pembina jasa konstruksi ahli muda	1
5	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	1
6	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	2
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	6
8	Pranata Humas Ahli pertama	1
9	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	8
10	Perekayasa ahli Pertama	4
11	penata laksana jalan dan jembatan terampil	3
12	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	11
13	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	24
14	Petugas Transportasi Perkeretaapian	8

Selatan selain itu pada tahun 2025 secara berkala dilaksanakan **penyesuaian aktivitas** pelaksanaan survey kepuasan masyarkat kepada para pengguna jasa yang menajukan pelayanan bidang prasarana perkeretaapian.

Dari Laporan SKM capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan hasil analisis survei, dari Laporan SKM Periode Triwulan Ke-IV Tahun 2025 periode bulan Januari – Desember 2025 Analisis Hasil Survei Kualitas Pelayanan – IKM pada Direktorat Prasarana Perkeretaapaian pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2025, secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3,90

dalam skala 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik. Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2025. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

Sebagai **tahapan inovasi** untuk pelayanan bidang prasarana perkeretaapian telah dilaksanakan *launching* Aplikasi Perizinan Peropotongan dan Persinggungan Jalur KA dengan Bangunan Lain pada bulan Desember 2025 dengan mengundang Balai dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan para stakeholder pengguna jasa bidang prasarana perkeretaapian.

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan **Manajemen Risiko** sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 20 risiko;
Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 13 risiko diatas selera risiko dan 7 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
2. Dari 20 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 34 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan III dari 34 kegiatan penanganan sebanyak 34 kegiatan penanganan yang telah selesai atau semua kegiatan penanganan telah dilaksanakan.

Crosscutting kinerja Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan hasil kinerja penjumlahan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Crosscutting aktivitas terdapat hubungan aktivitas antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Balai Teknik Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian didalam dukungan kegiatan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu pada proses bisnis pemanfaatan Jalur Kereta Api Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan Penyelesaian pelayanan dibidang prasarana perkeretaapian untuk izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan Bangunan lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional, Melakukan verifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan serta penetapan gambar desain perizinan, Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Sedangkan balai Teknik Perkeretaapian melaksanakan pemeriksaan persetujuan gambar Teknik dan melaksanakan tinjauan lapangan terkait kesesuaian rencana Pembangunan dengan kondisi nyata di lapangan. Dan untuk Setditjen Perkeretaapian, Melaksanakan proses penyusunan dan pemeriksaan perizinan yang akan ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Dan untuk crosscutting aktiivitas pelaksanaan survey IKM terdapat keterkaitan hubungan aktivitas dengan Pusat Trasnportasi Berkelanjutan yaitu melaksanakan evaluasi secara berkala hasil pelaksanaan SKM dari unit kerja di lingkungan kemenhub. Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025,

sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

1.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

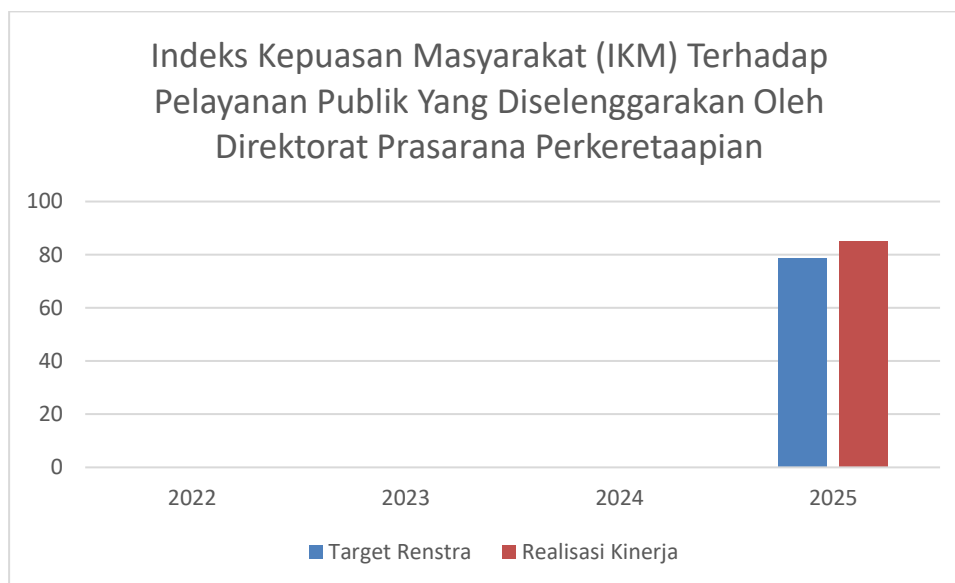
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2022 sampai dengan 2025 dengan akumulasi target sampai dengan tahun 2025 adalah 3,89 dan akumulasi realisasi sebesar 3,90. Tabel perbandingan realisasi dan target kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel III.38

Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	3,60	3,88	3,89	-	3,71	3,88	3,90

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.32

Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

1.6.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA Periode Tahun 2025 - 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

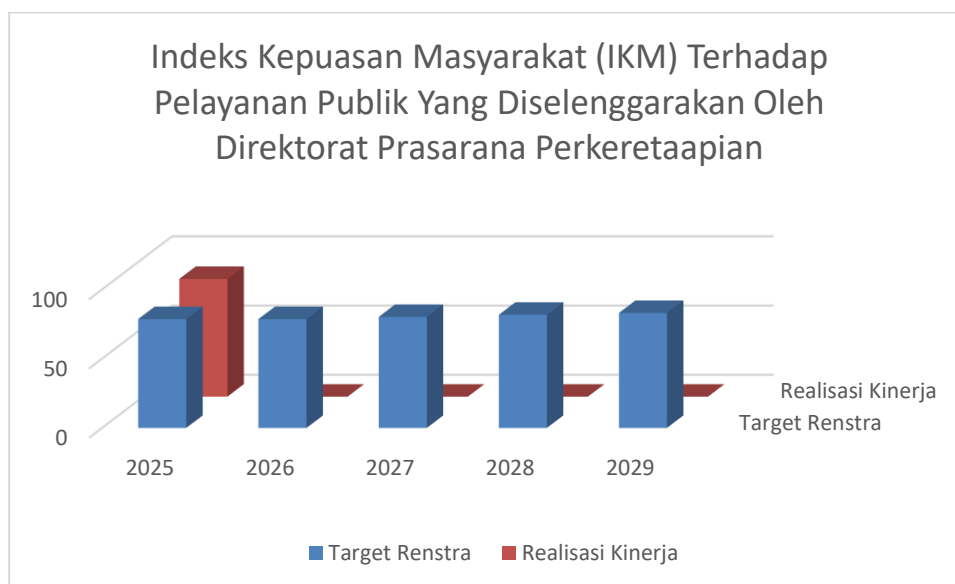
Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.39

Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,90	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.33

Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

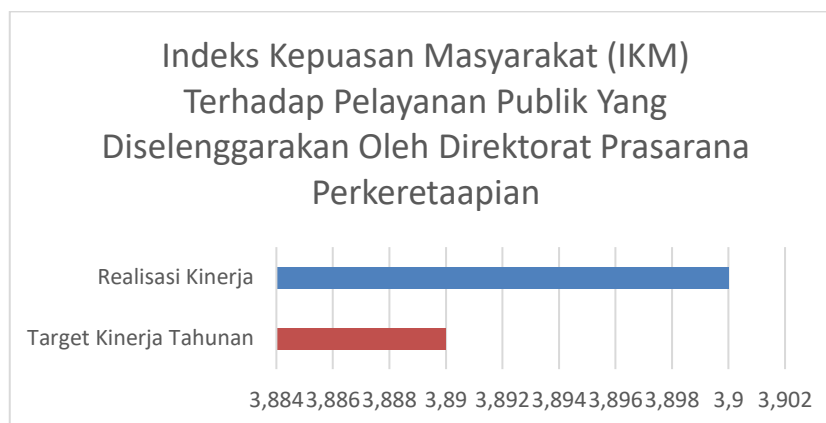
Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja akhir renstra (2025) didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III.40

Perbandingan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,90	100,26

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja renstra (2025) dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.34
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Periode Renstra 2025

1.6.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Dari hasil perbandingan kinerja level nasional untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan KSOP Utama Tanjung Priok serta KSOP Utama Tanjung Priok dengan perbandingan (benchmarking) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel III.41
Benchmarking Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode triwulan III

Unit Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai IKM Skala 100	Nilai IPK Skala 100
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,90
UPBU BANDARA BOMAKIA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan UPBU Bandara Bomakia	Nilai	3,85	4
KSOP UTAMA MAKASSAR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	Nilai	3,93	3,93

Sumber: KSOP Utama Tanjung Priok <https://www.instagram.com/p/DPWLG6QEgEv/?igsh=dXZsaWFoYmdtaHR2>
KSOP Utama Makassar <https://www.instagram.com/p/DPoLSUuj7ap/?igsh=Mnl2bjVzZGg0NTdw>

1.6.7 Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah

1. Ketidakpatuhan pemegang izin dalam melakukan perpanjangan izin perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain;
2. Ketidakpatuhan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dalam memenuhi ketentuan perizinan pembangunan prasarana pekerettaapian umum/khusus.

1.6.8 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya untuk peningkatan kinerja atau rekomendasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Pemanfaatan aplikasi Perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan bangunan lain untuk proses perizinan;
2. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

4. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
5. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Penyelesaian permohonan perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan Bangunan Lain;
2. Bersurat kepada para pemegang izin untuk mengajukan perpanjangan izin yang masa berlaku izin akan habis.'
3. Bersurat kepada Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian untuk mengajukan permohonan perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Perpotongan dan Persinggungan Jalur KA dengan Bangunan Lain;
2. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
3. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.

III.2. 7. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian terdapat perubahan target kinerja dengan target awal 50,34% berubah menjadi 50,58%. perubahan berdasarkan perhitungan baseline kinerja yang semula 1470 sertifikat menjadi 1046 sertifikat serta rencana penerbitan sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian 2025-2029 sebagaimana penetapan rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029. Target penerbitan tahun 2025 terdapat perubahan dari 85 sertifikat menjadi 89 sertifikat.

2.7.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan IV tahun 2025, realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebesar 50,85%, dengan penetapan sertifikat kelaikan prasarana tahun 2025 sebanyak 95 sertifikat terdiri dari 43 sertifikat kelaikan jalur dan bangunan kereta api dan 52 sertifikat kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana	=	$\frac{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dan kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$
--	---	--

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana	=	$\frac{(1046+95)}{2244} \times 100\% = 50,85\%$
--	---	---

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV/tahun

2025 sebesar 50,85% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 50,58% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 100,53% (on the right track).

Berikut merupakan rincian capaian kinerja jumlah sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode triwulan III tahun 2025:

Tabel III.42

Rincian Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

No	Uraian	Capaian Bulan	Jumlah (Sertifikat)
Sertifikat Kelaikan Jalur dan Bangunan KA			
1	Uji Pertama :		
a	Sertifikat Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian berupa Bangunan Stasiun Kereta Api (Kampung Juara dan Pauh Lima) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kereta Api Padang - Bukit Putus - Pauh Lima Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Februari	4
b	Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian Khusus berupa Jalur Kereta Api Rel Lingkar (Rail Loop) pada Train Loading Station (TLS) 5 Hasil Pekerjaan PT Bukit Asam Tbk	Juli	1
c	Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian berupa Jalur Kereta Api (Jalan Rel Km. 171+800 s.d. 172+500 antara Stasiun Blambangan Umpu - Stasiun Giham dan Jembatan BH 309 Km. 172+147 Bentang Total 103 m terdiri dari Bentang 76,5 m Tipe Rangka Baja WTP) hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Agustus	2
d	Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian berupa Jalur Kereta Api (Jalan Rel Km. 164+000 s.d 165+110 antara Stasiun Blambangan Umpu - Stasiun Giham dan Jembatan BH 289 Km. 164+640, Bentang 42 m Tipe Rangka Baja WTT) Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Agustus	2
e	Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian berupa Stasiun Kereta Api (Emplasemen dan Peron Stasiun Tanah Abang) pada Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I) Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Oktober	2
f	Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Jalur KA berupa Jembatan BH. 89 Eksisting Km. 14 + 654 (Jalur Hulu) Bentang 35,8 m, tipe Girder Beton dan BH. 107 eksisting Km 17+741 (Jalur Hilir) bentang 35,8 m, tipe Girder Beton antara Stasiun Maseng - Stasiun Cigombong lintas Bogor - Sukabumi Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Desember	2
2	Uji Berkala :		

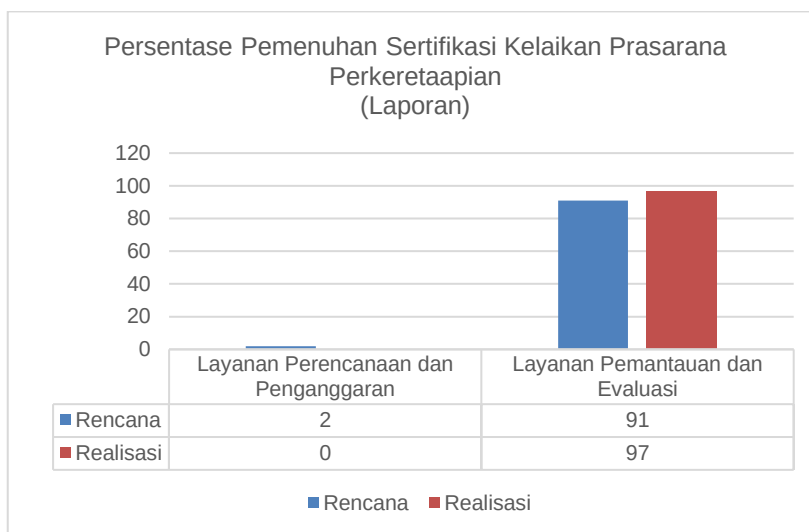
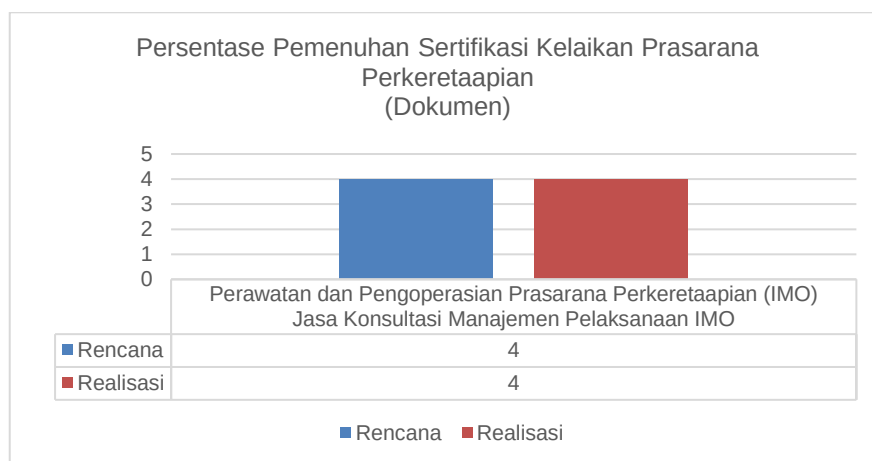
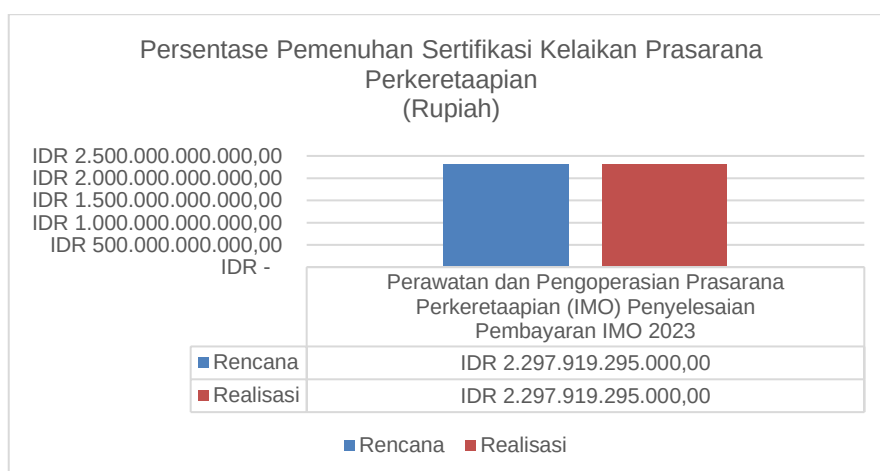
No	Uraian	Capaian Bulan	Jumlah (Sertifikat)
a	Sertifikasi Uji Berkala Prasarana Perkeretaapian berupa Bangunan Depo Pegangsaan Dua Light Rail Transit (LRT) Jakarta milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	November	1
b	Sertifikasi Uji Berkala Prasarana Perkeretaapian berupa Jalur Kereta Api pada Depo Pegangsaan Dua Light Rail Transit (LRT) Jakarta milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	November	25
3	Uji Komponen :		
a	Sertifikatn Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok untuk Jalur KA ballasted Lebar Jalan Rel 1067 mm Produksi PT Wijaya Karya Beton, Tbk.	Januari	1
b	Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton (Jalur Kereta Api Ballasted) untuk Lebar Jalan Rel 1067 mm Beban Gandar 18 Ton Produksi PT Balton Kurnia Abadi menggunakan Sistem Penambat Elastic Rail Clip tipe Material 60SI2MN Produksi PT Dibiya Upaya Persada	Maret	1
c	Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok untuk Jalur Kereta Api Ballasted Lebar Jalan Rel 1435 mm Produksi PT Wijaya Karya Beton Tbk	Juni	1
d	Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok untuk Jalur Kereta Api Ballasted Lebar Jalan Rel 1067 mm Produksi PT Jaya Beton Indonesia	November	1
Jumlah Sertikat kelaikan Jalur dan Bangunan KA			43
Sertifikat Kelaikan Fasilitas Operasi KA			
1	Uji Pertama		
a	Sertifikat uji pertama JPL Solo - Wonogiri (9 Januari 2025)	Januari	4
b	Sertifikat uji pertama Radio Telekomunikasi Jabodetebek (16 Januari 2025)	Januari	7
c	Sertifikat Uji Pertama JPL 172a Dan JPL 173 antara Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Nomor KP-DJKA 48 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025	Maret	2
d	Sertifikat Uji Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api berupa peralatan LAA Stasiun Tanah Abang (7 Oktober 2025)	Oktober	1
e	Sertifikat Uji Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api berupa peralatan Persinyalan Tanah Abang (7 Oktober 2025)	Oktober	1
f	Sertifikat Uji Pertama Gardu Traksi Tanjung Priok	November	1
g	Sertifikat Uji Pertama JPL Krueng Geukeuh - Muara Satu Medan	November	4
h	Sertifikat Uji Pertama JPL Elektrik Lintas Jakarta - Bogor dan Jakarta - Padalarang	Desember	6

No	Uraian	Capaian Bulan	Jumlah (Sertifikat)
2	Uji Berkala		
a	Sertifikasi Uji Berkala Listrik Aliran Bawah APMS Bandara Internasional Soekarno - Hatta : KP-s 33 Tahun 2025 tanggal 6 Maret 2025	Maret	3
b	Sertifikat Uji Berkala Gardu Traksi pada Lintas Solo - Yogyakarta di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Nomor KP-DJKA 110 Tahun 2025 tanggal 29 September 2025	September	8
c	Sertifikat Uji Berkala Peralatan Persinyalan dan Telekomunikasi di Solo Jebres - Kedung Banteng	September	12
d	Sertifikat Uji Berkala LRT Jakpro area Depo (22 Desember 2025)	Desember	3
Jumlah Sertikat kelaikan Fasilitas Operasi KA			52
Jumlah Sertikat kelaikan Prasarana Perkeretaapian			95

Sesuai dengan penetapan kegiatan pendukung tahun anggaran 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi pendukung Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian diantaranya sebagai berikut:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) Jasa Konsultasi Manajemen Pelaksanaan IMO;
4. Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) Penyelesaian Pembayaran IMO 2022.

Progres pelaksanaan kegiatan pendukung yang menjadi indikator kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana tergambar di grafik dibawah ini :



Gambar III.35

Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Detail pencapaian kinerja indikator kinerja berjenjang dari pelaksanaan kegiatan pendukung tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada lampiran Laporan Kinerja Tahun 2025.

2.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 100,13%.

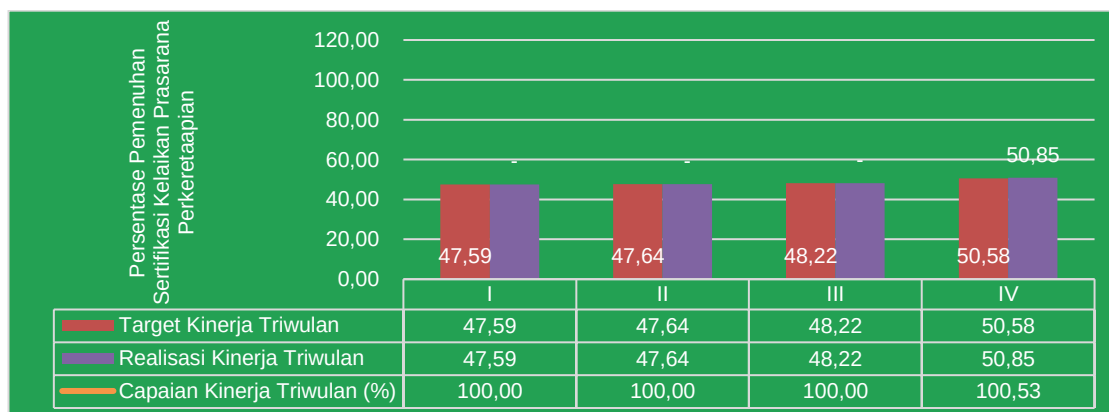
Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 100,53%. Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.43

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Nilai	50,58	47,59	47,64	48,22	50,58	47,59	47,64	48,22	50,85	100,00	100,00	100,00	100,53	100,53

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



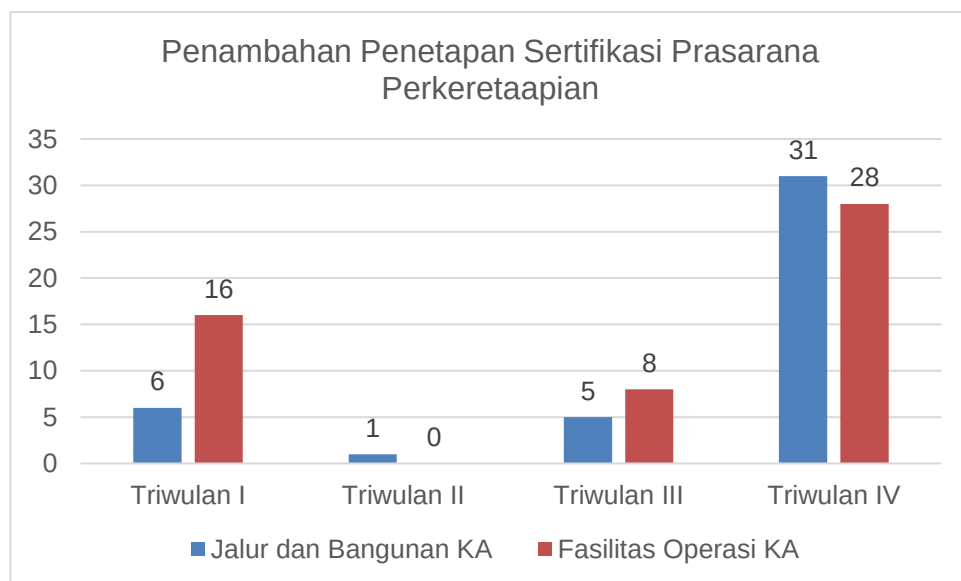
Gambar III.36

Diagram Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

1.5.2 Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan beberapa penyesuaian yaitu telah dilakukan **Penyesuaian Aktivitas/Strategi** dengan penetapan target pada revisi perjanjian kinerja berdasarkan penetapan rencana strategis dan penetapan revisi rencana aksi berdasarkan hasil monitoring evaluasi kinerja periode triwulan IV tahun 2025. Selain itu penyelesaian sertifikasi prasarana perkeretaapian tahun 2025 sebanyak 95 sertifikat terdiri dari 43 Sertifikat kelaikan jalur dan bangunan kereta api dan sebanyak 52 sertifikat kelaikan fasilitas operasi kereta api sebagai **penyesuaian aktivitas**.

Penambahan sertifikasi yang telah ditetapkan sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2025 sebagaimana gambar grafik dibawah ini :



Gambar III.37

Gambar grafik penambahan penetapan sertifikasi prasarana perkeretaapian Tahun 2025

Penyesuaian strategi yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja dan menetapkan aktivitas/kegiatan penanganan risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bersurat kepada Badan usaha, Balai Teknik, Balai Pengelola untuk menginventaris prasarana yang belum disertifikasi dan melakukan inventarisasi data sertifikasi prasarana perkeretaapian;
 2. Melakukan monitoring dan sinkronisasi terkait data inventarisasi sertifikasi prasarana perkeretaapian dan bersurat terkait pemberitahuan sertifikat prasarana akan habis masa berlakunya;
 3. Arahan pimpinan secara rutin berkala terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi dan sosialisasi anti gratifikasi melalui media sosial
- Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III.44

Sebaran Jabatan

Indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	3
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	7
3	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	5
4	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	1
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	4
6	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	7
7	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	11
8	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	13
9	Petugas Transportasi Perkeretaapian	3
10	Penata Layanan Operasional	18
11	Pengadministrasi Perkantoran	2
12	Pengelola Layanan Operasional	2

Pada tahun 2025 sesuai dengan pengukuran kinerja terdapat **penghapusan jabatan** fungsional dan pelaksana sesuai penetapan KM 34 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2024, jabatan yang dihapus adalah Pembina Jasa Konstruksi Ahli

Muda dan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama serta Penelaah Teknis Kebijakan. Penghapusan jabatan diusulkan untuk dihapus pada Subdit Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api serta Subdit Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api, hal ini dikarenakan kompetensi dan tugas pokok jabatan tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi kelaikan jalur, stasiun dan fasilitas operasi kereta api. Untuk penghapusan Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan diusulkan untuk dihapus pada Subdit Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api dengan pertimbangan serupa, yaitu ketiadaan relevansi tugas jabatan tersebut dengan fokus utama subdirektorat dalam hal standarisasi kelaikan teknis.

Crosscutting Kinerja tahun 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Balai Pengujian Perkeretaapian yaitu pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan dan Balai Pengujian Perkeretaapian dengan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja melakukan proses pengujian Prasarana Perkeretaapian yang telah terbangun.

Sedangkan **Crosscutting Aktivitas** Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan Melakukan Verifikasi kelengkapan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian, Pengawasan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian, Menerbitkan sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus Uji, Melaksanakan Pembinaan Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian kepada Balai di Lingkungan DJKA serta Badan Usaha terkait.
2. Balai Pengujian Perkeretaapian Melakukan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan permohonan pengujian baik uji pertama prasarana perkeretaapian maupun uji berkala prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan kereta api serta fasilitas operasi kereta api), Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil pengujian prasarana perkeretaapian;

3. Balai Terkait/Badan Usaha (PT.KAI, dll) melakukan permohonan pengujian, Penyiapan dokumen teknis kelengkapan permohonan pengujian, Menindaklanjuti hasil temuan pengujian.

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan Manajemen Risiko sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil yaitu:

1. Identifikasi risiko sebanyak 26 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 4 risiko diatas selera risiko dan 22 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 12 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 15 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 15 kegiatan penanganan sebanyak 14 kegiatan penanganan yang telah selesai dan sebanyak 1 Kegiatan penanganan belum berhasil dilaksanakan yaitu Launching Aplikasi Sertifikasi dikarenakan akan dilaksanakan redevelop aplikasi oleh Seditjen Perkeretaapian.

1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian periode 2022 sampai dengan 2025 dengan akumulasi target sampai dengan tahun 2024 (periode 2020-2024) sebesar 100% dan pencapaian tahun 2025 sebesar

50,85% (periode 2025-2029 direncanakan 100% pada tahun 2029)
Penjelasan Tabel perbandingan periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.45
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	85,37	94,80	100	50,58	87	94,97	100,79	50,85

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.38
Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

2.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Kinerja Pada RENSTRA periode Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian yang

berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.46
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,58	62,79	76,47	86,50	100,00	50,85	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.39

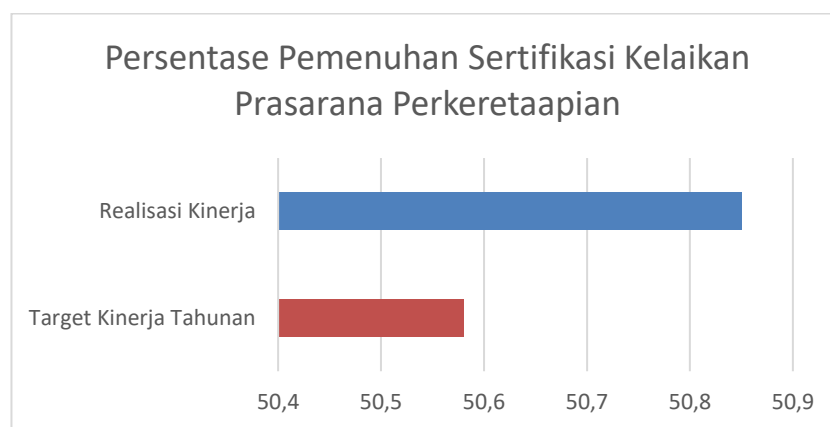
Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi periode tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III.47
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan
Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,58	50,85	100,53%

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini



Gambar III.40
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan
Prasarana Perkeretaapian

2.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (*Benchmarking* Kinerja)

Dari hasil perbandingan kinerja level nasional untuk Indikator Kinerja Kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan diketahui bahwa perbandingan kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.48
 Benchmarking Realisasi Sertifikat tahun 2025

Unit Kerja	Jenis Sertifikasi	Satuan	Jumlah
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jumlah Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	1.141
PEM PROV DKI JAKARTA	Sertifikat Laik Fungsi	Sertifikat	795

Sumber : LKIP 2024 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Prov. DKI Jakarta

2.5.4 Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 terdapat kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat temuan pengujian yang belum ditindaklanjuti oleh Balai Teknik Perkeretaapian/Badan usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;
2. Terdapat prasarana perkeretaapian yang memasuki masa berlaku uji pertama/berkala akan habis dan belum dilakukan pengajuan pengujian.

2.5.5 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran serta penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
2. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk

dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;

3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Akan bersurat kepada Balai Teknik Perkeretaapian/Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang masa berlaku uji pertama/berkala akan habis di tahun 2026 untuk melakukan pengajuan pengujian.
2. Akan dilakukan rapat pleno pembahasan hasil pengujian kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
3. Akan dilakukan pembahasan rencana pengujian prasarana perkeretaapian tahun 2026;
4. Akan dilakukan verifikasi dokumen persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Tim Evaluasi Pengukuran TQI Tahun 2026;
2. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
3. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.

III.2. 8. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian terdapat perubahan target kinerja semula sebesar 90,48% menjadi 79,55%, perubahan berdasarkan perhitungan baseline kinerja dari 73 dokumen NSPK/Peraturan menjadi 31 Dokumen NSPK/Peraturan serta urgensi penyusunan NSPK tahun 2025-2029 sebagaimana penetapan rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029. Untuk penambahan NSPK yang ditetapkan pada tahun 2025 tidak berubah sebanyak 4 NSPK yang direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2025.

1.6.9 Analisis Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan IV tahun 2025, realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 sebesar 79,55% atau persentase capaian kinerja sebesar 100% terhadap target tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	=	$\frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$
--	---	--

Perhitungan capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut :

Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	=	$\frac{(31+4)}{44}$	X 100%	= 79,55%
---	---	---------------------	--------	----------

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV/Tahun 2025 sebesar 79,55% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 79,55% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 100% (*on the right track*).

Rincian NSPK yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III.49
Rincian Jumlah NSPK yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024

NO	NSPK
Baseline s.d. tahun 2024	
1	PM 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas Dan Kegiatan Di Stasiun Kereta Api
2	PM 69 Tahun 2019 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi
3	Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait Pedoman Penyusunan Gambar Teknis jembatan Kereta Api Tipe Baja dan Beton
4	Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait Pedoman Penyusunan Gambar Teknis jalan rel kereta api
5	Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait Pedoman penyusunan AHS Jalan dan Bangunan KA
6	Spesifikasi teknik jalur dan bangunan kereta api (SK-K3DJKA 56 TAHUN 2021 Tanggal 31 Desember 2021 mengacu PM 60 Tahun 2012)
7	Spesifikasi Teknis Concrete Level Crossing tipe Narrow Gauge (SK-K3DJKA 82 TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022)
8	Petunjuk Teknis Pengisian Formulir Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan dan / Peningkatan Jalan Rel dan Jembatan KA (SK-K3DJKA 95 TAHUN 2022 Tanggal 26 Desember 2022)
9	PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
10	Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretapian Tahun 2021 tentang penetapan
11	Pedoman Penyusunan Gambar Teknis Fasilitas Operasi KA (SK-K3DJKA 99 Tahun 2022 Tanggal 27 Desember 2022
12	Spesifikasi Teknis pengadaan dan pemasangan EWS perlintasan Sebidang kereta Api (SK-K3DJKA 20 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022)
13	Spesifikasi teknik pintu perlintasan sebidang (SK-K3DJKA 23 TAHUN 2022 tanggal 14 Maret 2022)
14	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 154 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan Pengoperasian dan Perawatan Fasilitas Operasi
15	Perdirjen Nomor KA.405/SK.103/DJKA/11/11 tentang Pendelegasian kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Sertifikat Uji Berkala Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian.

NO	NSPK
16	PerdirjenKA.405/SK.17/DJKA/12/16 Tahun 2016 tentang Cara dan prosedur Pengesahan kualitas sistem dan komponen fasilitas Pengoperasian Kereta Api
17	PM 23 TAHUN 2022 - Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
18	PM 91 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
19	PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
20	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
21	PM 21 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
22	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: HK.205/SK.34/DJKA/20 tentang Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan bangunan Lain berbasis teknologi informasi
23	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
24	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 22 Tahun 2021 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
25	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi
26	Keputusan Dirjen Nomor KA.005/SK.35/DJKA/V/2019 tentang Standar Pelayanan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian
27	Peraturan Menteri PM 60 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi
28	PM 59 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
29	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
30	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
31	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 219 Tahun 2024 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
CAPAIAN TAHUN 2025	
1	KP-DJKA 47 Tahun 2025 Tanggal 26 Maret 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Pada Balai Teknik Perkeretaapian
2	SK-K3DJKA 28 Tahun 2025 Tanggal 23 April 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian
3	SK-K3DJKA 52 Tahun 2025 tanggal 1 September 2025 hal Pengesahan Dokumen Spesifikasi Teknis Peralatan Persinyalan Mekanik Kereta Api
4	SOP Kegiatan Pemeriksaan dan Perawatan Prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

1.6.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

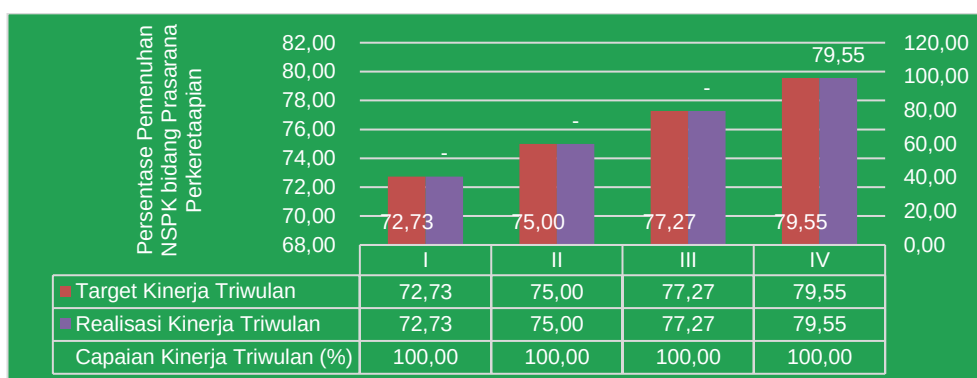
Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 100%.

Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.50
Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,55	72,73	75,00	77,27	79,55	72,73	75,00	77,27	79,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.41
Diagram perbandingan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

1.6.11 Analisis Keberhasilan dalam Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sesuai

dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah **penyesuaian strategi** yaitu penetapan target pada revisi perjanjian kinerja berdasarkan penetapan rencana strategis dan penetapan revisi rencana aksi berdasarkan hasil monitoring evaluasi kinerja periode triwulan III tahun 2025. Sesuai dengan kerangka regulasi rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian dilakukan **penyesuaian strategi** beberapa penyusunan NSPK terkendala Naskah Akademis dan kajian revisi peraturan Menteri target penyelesaian dilakukan penyesuaian sesuai dengan tahapan proses bisnis setelah dilakukan Naskah Akademis dan kajian revisi peraturan Menteri. Selain itu penyelesaian penyusunan pembahasan berkelanjutan samapi dengan penetapan NSPK tahun 2025 sebanyak 4 NSPK/Pedoman/Kebijakan sebagai **penyesuaian aktivitas**.

Penyesuaian strategi yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan **manajemen risiko** yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja.

Sebagai tahapan penyusunan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan proses bisnis untuk penyusunan Pedoman Standar TQI telah dinaikan ketahapan selanjutnya pembahasan dengan Setditjen Perkeretaapian.

Terkait dengan kebutuhan kajian dan penyusunan naskah akademik telah dilakukan **penyesuaian anggaran** yaitu buka blokir untuk anggaran penyusunan kajian dan telah diusulkan anggaran pada RKA tahun 2026.

Sebagai pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III.51

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	4
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	13
3	Pembina Jasa Konstruksi Muda	1
4	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	4
5	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli pertama	1
6	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	1
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	3
8	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	6
9	Perekayasa ahli Pertama	2
10	penata laksana jalan dan jembatan terampil	1
11	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	6
12	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	32
13	Petugas Transportasi Perkeretaapian	6
14	Penata Layanan Operasional	14
15	Pengadministrasi Perkantoran	1
16	Penelaah Teknis Kebijakan	1
17	Pengelola Layanan Operasional	1

Keberhasilan pencapaian kinerja dengan melakukan pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja, sebagaimana dijelaskan pada Bab III Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan pada tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Crosscutting Kinerja tahun 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja penetapan dokumen NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan hasil kinerja Penetapan regulasi dan kebijakan.

Sedangkan **Crosscutting Aktivitas** Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan penyusunan/ revisi dokumen teknis bidang prasarana perkeretaapian, Menyiapkan perumusan konsep NSPK dibidang Prasarana Perkeretaapian, Melakukan sosialisasi terhadap NSPK yang telah di tetapkan.
2. Balai Pengujian Perkeretaapian Melakukan Melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen NSPK yang sebelumnya telah disusun, Melakukan proses penetapan legislasi dan pembahasan sesuai dengan proses bisnis legislasi peraturan;

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan **Manajemen Risiko** sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 4 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 0 risiko diatas selera risiko dan 4 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 0 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 0 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 0 kegiatan penanganan sebanyak 0 kegiatan penanganan yang telah selesai

1.6.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian periode 2022 sampai dengan 2025 dengan akumulasi target sampai dengan tahun 2024 (periode 2020-2024) sebesar 100% dan pencapaian tahun 2025 sebesar 79,55% (periode 2025-2029 direncanakan 100% pada tahun 2029) Penjelasan

Tabel perbandingan periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.52
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	%	82,43	89,19	100	79,55	79,73	91,89	105,26	79,55

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 42
Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian

1.6.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Kinerja RENSTRA periode tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target

Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.53
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	79,55	86,36	93,18	100,00	79,55	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Keterangan : Target Renstra berdasarkan penyesuaian target kinerja Perjanjian Kinerja pertahun

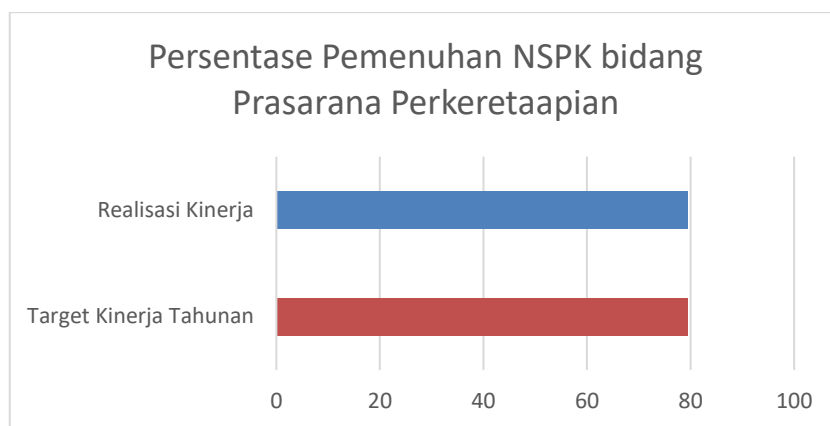
Gambar III. 43
Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi periode tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian

Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja akhir periode renstra (2025) didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III. 54
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	79,55	100

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja akhir periode renstra (2025) dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.44
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian

1.6.14 Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan II tahun 2024 indikator kinerja kegiatan terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan penanganan/pengendalian sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Beberapa kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah yaitu:

1. Penyusunan Revisi Peraturan Menteri masih membutuhkan kajian dan penyusunan naskah akademik;
2. Blokir Anggaran dan tidak disetujui usulan buka blokir anggaran pada tahun 2026 untuk penyusunan Kajian.

1.6.15 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran serta penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian;
2. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Koordinasi dan pembahasan dengan Setditjen Perkeretaapian terkait lanjutan pembahasan Penyusunan Standar TQI;
2. Akan dilakukan rapat pleno pembahasan hasil pengujian kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
3. Akan dilakukan pembahasan rencana pengujian prasarana perkeretaapian tahun 2026;
4. Akan dilakukan verifikasi dokumen persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
4. Usulan Buka Blokir Anggaran Kajian Penyusunan NSPK.

5. Usulan Kajian pada pagu Kebutuhan TA 2027 sesuai dengan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Rencana Strategis untuk dukungan penyusunan NSPK.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Tim Evaluasi Pengukuran TQI Tahun 2026;
2. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
3. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.

III.2. 9. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tidak ada perubahan target yaitu 83,20 atau kategori A. fokus pemenuhan pada komponen perencanaan Sub Komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan nilai BB, tidak ada perubahan target penetapan rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029

2.7.1 Analisis Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan IV tahun 2025, realisasi capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 83,20 dengan hasil penilaian unit sampel yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	=	(Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x 15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)
---	---	--

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	=	25,20 + 25,20 + 12,30 + 20,50 = 83,20
---	---	---------------------------------------

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV/tahun 2025 sebesar 83,20% dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 83,20% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 100% (*on the right track*).

Dari hasil penilaian Mandiri yang telah dilakukan internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan di tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui aplikasi SILAKI Ditjen Perkeretaapian sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel III.55
 Hasil Penilaian Implementasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	PENILAIAN MANDIRI	EVALUASI TINGKAT DJKA	EVALUASI TINGKAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,20	25,20	25,20
	1.1 Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6,00	6,00	6,00
	1.2 Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20	7,20	7,20
	1.3 Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	12,00	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	26,10	26,10	25,20
	1.1 Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	6,00	6,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	PENILAIAN MANDIRI	EVALUASI TINGKAT DJKA	EVALUASI TINGKAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	1.2 Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	8,10	7,20
	1.3 Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	12,00	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,3	12,3	12,30
	1.4 Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	2,70	2,70
	1.5 Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	3,60	3,60
	1.6 Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	6,00	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,50	21,25	20,50
	1.7 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	4,50	4,50
	1.8 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	6,75	6,00
	1.9 Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00	10,00	10,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,10	84,85	83,20

Dengan tahapan penilaian AKIP Tahun 2025 sebagai berikut :

Table III.56

Hasil Penilaian Evaluasi Internal di Tingkat Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Komponen	Bobot	Penilaian Mandiri	Evaluasi Tingkat DJKA	Evaluasi Tingkat Kementerian Perhubungan
Perencanaan Kinerja	30	25,20	25,20	25,20
Pengukuran Kinerja	30,00	26,10	26,10	25,20
Pelaporan Kinerja	15,00	12,3	12,3	12,30
Evaluasi	25,00	20,50	21,25	20,50
Total	100	84,10	84,85	83,20

Untuk capaian kinerja pada Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 dengan nilai akhir 83,20 dari target tahun 2025 yaitu sebesar 83,20.

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 sebesar 83,20

dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 83,20 didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 100% (*on the right track*)

2.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 100%.

Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.57
Perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan
Indikator kinerja kegiatan Nilai (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	-	-	-	83,20	-	-	-	83,20	-	-	-	100,00	100,00

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.45
Grafik Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian per triwulan

2.7.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu penetapan target tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2025 dengan peningkatan nilai pada komponen perencanaan Sub Komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan nilai BB.

Sebagai tindaklanjut pengukuran kinerja dan laporan kinerja triwulan III tahun 2025 telah dilakukan **penyesuaian strategi** yaitu penyesuaian pagu anggaran berdasarkan pagu efektif (siswa anggaran efisiensi TA 2025) serta Rencana Aksi periode triwulan III – IV tahun 2025, sebagai tindaklanjut penetapan dokumen Penetapan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja telah dilakukan publikasi melalui aplikasi e-SAKIP Revisi Menpan RB. Pada periode triwulan IV telah dilakukan **penyesuaian aktivitas** yaitu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait evaluasi AKIP tingkat Kementerian Perhubungan dan telah ditetapkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja sampel di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dalam hal ini yaitu Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.

Penyesuaian strategi yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja dan menetapkan aktivitas/kegiatan penanganan risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi data prasarana perkeretaapian dengan Balai;

2. Sosialisasi SOP Bidang SAKIP dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Penambahan indikator IKK AKIP pada SKP pegawai
4. Penyusunan Pohon Kinerja Tahun 2025
5. Penyusunan form reviu laporan kinerja secara berjenjang dan Reviu penyusunan laporan kinerja dan Reviu berjenjang data kinerja dan pengukuran kinerja
6. Penetapan SK Tim Penyusun standar pemberian reward dan punishment kinerja dan Penyusunan standar pemberian reward dan punishment kinerja serta sosialisasi penerapan pemberian reward dan punishment kinerja
7. Implementasi pemberian reward dan punishment kinerja
8. Monitoring kinerja bulanan/triwulanan
9. Reviu/Update peta jabatan/nomenklatur jabatan
10. Nota Dinas perihal informasi pengumpulan data kehadiran biometrik dan laporan bulanan pada aplikasi e- kinerja

Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai pada jabatan Penelaah Teknis Kebijakan (3 orang), Perencana (2 orang), Pengolah Data Dan Informasi (1 orang), Pranata Komputer (1 orang).

Berdasarkan *bezzetting* kebutuhan pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025, guna mendukung pencapaian kinerja pada indikator Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian masih terdapat kekurangan pegawai yang menempati jabatan fungsional yaitu pada jabatan fungsional Perencana Ahli Pertama. sesuai dengan formasi jabatan fungsional pada tahun 2025, telah dilakukan penempatan jabatan fungsional perencana ahli pertama dengan jumlah sebanyak 1 orang, sehingga update posisi *bezzetting* pegawai pada jabatan perencana ahli pertama s.d tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.58

Bezzeting Pegawai Jabatan Perencana Ahli Pertama

JABATAN	FORMASI	Bezetting (B)	Kebutuhan (K)	+/-
Perencana Ahli Pertama	CPNS 2025	2	7	5

Kehadiran Perencana diharapkan mendorong penerapan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*), sinkronisasi antarunit kerja, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Selain itu mampu mendongkrak dan meningkatkan nilai pengawasan kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian pertahun sesuai dengan target Rencana Startegis Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Penyesuaian organisasi tahun 2025 yaitu dengan telah dilakukan pembentukan tim Penyelenggaraan SAKIP Dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretapaian sesuai dengan penetapan Surat Keputusan Nomor SK-K3DJKA 8 Tahun 2025 dan Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan AKIP tahun 2025 dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan penetapan Surat Keputusan Nomor SK-K3DJKA 29 Tahun 2025.

Keberhasilan terhadap pencapaian nilai AKIP tahun 2025 didukung oleh **Penerapan inovasi kinerja dan perubahan budaya kinerja** yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pembahasan secara berkala Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Bulanan dengan para penanggungjawab kinerja dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana kebijakan Direktur Prasarana Perkeretaapian sesuai Nota Dinas : 0800/K3/I/2025 tanggal 29 Januari 2025 dan secara berkala dilakukan pembahasan monitoring kinerja triwulanan dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Implementasi pemberian penghargaan kepada unit kerja dan pegawai sesuai dengan Pedoman Pemberian Penghargaan (Reward)

dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang terdiri dari beberapa kategori yaitu :

- i. Unit dengan kinerja terbaik
- ii. Unit kerja dengan Kepatuhan pelaporan Kinerja
- iii. Pegawai dengan Kinerja terbaik
- iv. Pegawai terdisiplin.

Dan pemberian penghargaan disampaikan pada saat pelaksanaan apel pegawai.

Penerapan inovasi kinerja dan budaya kinerja memberikan dampak positif, hal ini dapat dibuktikan dengan dari hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan yang dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian, Direktorat Prasarana meraih urutan pertama tingkat kepatuhan unit kerja dalam pelaporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan peringkat kedua tingkat kepatuhan unit kerja dalam pelaporan kinerja Triwulan III Tahun 2025.

Untuk perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian **terdapat peningkatan kinerja**. Rata-rata capaian Tahun 2025 sebesar 101,21% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun sebelumnya sebesar 101,13%.

Dalam penyelenggaraan SAKIP tahun 2025 telah dilakukan monitoring kinerja secara berkala dengan hasil rekomendasi **penyesuaian anggaran** dimana pada tahun 2025 dari pagu total terdapat kebijakan efisiensi anggaran dan secara berkala telah dilakukan usulan buka blokir anggaran dan telah disetujui buka blokir sehingga pada tahun 2025 secara umum pekerjaan dan kegiatan tahun anggaran 2025 bisa dilaksanakan dan capaian kinerja nilai kinerja anggaran dengan capaian *on the right track*.

Crosscutting Kinerja tahun 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Nilai hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan indikator kinerja Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian dimana keterkaitannya adalah nilai AKIP Unit kerja berkontribusi pada nilai AKIP DJKA, dimana formulasi perhitungan realisasi capaian kinerja pencapaian kinerja tata kelola Pemerintahan DJKA salah satunya komponen Nilai AKIP DJKA. Pada tahun 2022 s.d 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian unit kerja sampe yang berkontribusi pencapaian nilai AKIP DJKA.

dan Peningkatan Jalur Kereta api serta pengukuran TQI melalui penugasan dari BTP kepada PT. Kereta Api Indonesia (persero).

Sedangkan **Crosscutting Aktivitas** Indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut :

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian Melakukan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berupa Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja, Melakukan penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menyiapkan data dukung yang diperlukan.
2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penilaian mandiri yang telah dilakukan sebelumnya oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Inspektorat Jenderal Melakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penilaian mandiri yang telah dilakukan sebelumnya oleh sampel dari DJKA.

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan **Manajemen Risiko** sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 24 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 9 risiko diatas selera risiko dan 15 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);

3. Dari 9 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 12 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 12 kegiatan penanganan sebanyak 12 kegiatan penanganan yang telah selesai atau semua kegiatan penanganan telah dilaksanakan.

2.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

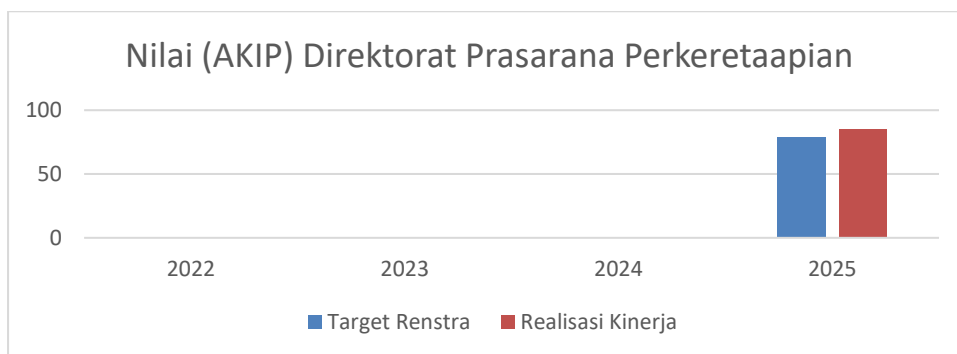
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2022 sampai dengan 2025 dengan akumulasi target sampai dengan tahun 2025 adalah 83,20% dan akumulasi realisasi sebesar 83,20% dengan persentase 100% yang tersebar pada wilayah Jawa dan Sumatera. Tabel perbandingan realisasi dan target kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel III.59

Indikator kinerja kegiatan Nilai (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2022	2024	2025	2022	2022	2024	2025
Nilai (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	81	84	83,20	80,81*	83,95	82,10	83,20

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.46

Pebandingan Target dan Realisasi Periode 2022-2025 Indikator Kinerja Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.7.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA Periode Tahun 2025 - 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.60

Indikator kinerja kegiatan Nilai Indikator kinerja kegiatan Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,50	84,40	85,45	86,40	83,20	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.47

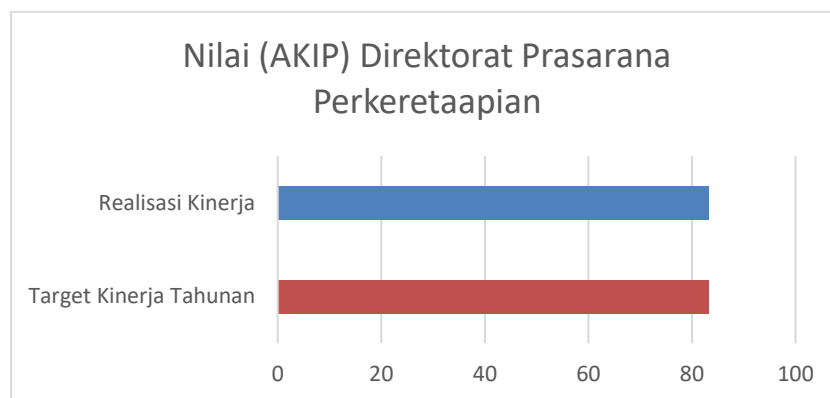
Perbandingan Target renstra dan realisasi periode 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III. 61
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator kinerja kegiatan Nilai (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,20	100%

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Periode Renstra 2025

2.7.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Perbandingan kinerja level nasional untuk indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian data pada periode Triwulan IV tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Inspektorat Jenderal data (benchmarking) kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 62
 Benchmarking Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat
 Prasarana Perkeretaapian

Unit Kerja	Indikator Kinerja	Komponen	2024	Penilaian Kinerja 2025	
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Perencanaan Kinerja (30%)	82,10	25,20	83,20
		Pengukuran Kinerja (30%)		25,20	
		Pelaporan Kinerja (15%)		12,30	
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)		20,50	
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Perencanaan Kinerja (30%)	82,95	24,90	83,72
		Pengukuran Kinerja (30%)		25,53	
		Pelaporan Kinerja (15%)		12,41	
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)		20,88	
INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Jenderal	Perencanaan Kinerja (30%)	82,30	25,20	82,50
		Pengukuran Kinerja (30%)		25,20	
		Pelaporan Kinerja (15%)		12,60	
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)		19,50	

Sumber data : 1. Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor : PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
 2. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Inpektorat Jenderal melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor : KP. 904/5/22/ITJEN/2025 tanggal 24 September 2025.

Pada penilaian AKIP tahun 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian menjadi unit sampel penilaian tingkat Kementerian Perhubungan untuk nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.7.7 Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Beberapa kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana

Perkeretaapian adalah sebagai berikut penambahan Indiktor Kinerja pada Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian Amanah dari RPJMN.

2.7.8 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian Strategi, Aktivitas, Anggaran, Penyesuaian Jabatan/Pegawai untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Pelaksanaan Rekomendasi Peningkatan Kinerja dan Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja secara berkala;
2. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana;
3. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana;
5. Evaluasi Capaian Rencana Strategis periode pelaksanaan tahun 2025.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Penyusunan Cascading dan Pohon Kinerja Berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Penyusunan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan periode tahun 2025;
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana sesuai dengan tugas jabatan.

III.2. 10. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat perubahan target kinerja dengan target awal dengan nilai 15 berubah menjadi dengan nilai 19, perubahan penetapan target berdasarkan penetapan rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029. Target penerbitan tahun 2025 dan hasil penilaian Maturitas Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2025.

2.8.1 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan IV tahun 2025, realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 20, hasil penilaian berdasarkan penilaian oleh Tim Inspektorat Jenderal pada tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	$= \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 1}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 1}} + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 2}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 2}} + \dots + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 15}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 15}}$
--	---

Sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	$= \frac{4}{2} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{2}{1} + \frac{2}{1} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{3} + \frac{3}{3} + \frac{2}{2} + \frac{4}{2} + \frac{4}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} = 20$
--	--

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV/tahun 2025 sebesar 19 dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 20 didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 105,26% (*on the right track*).

2.8.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 105,26%.

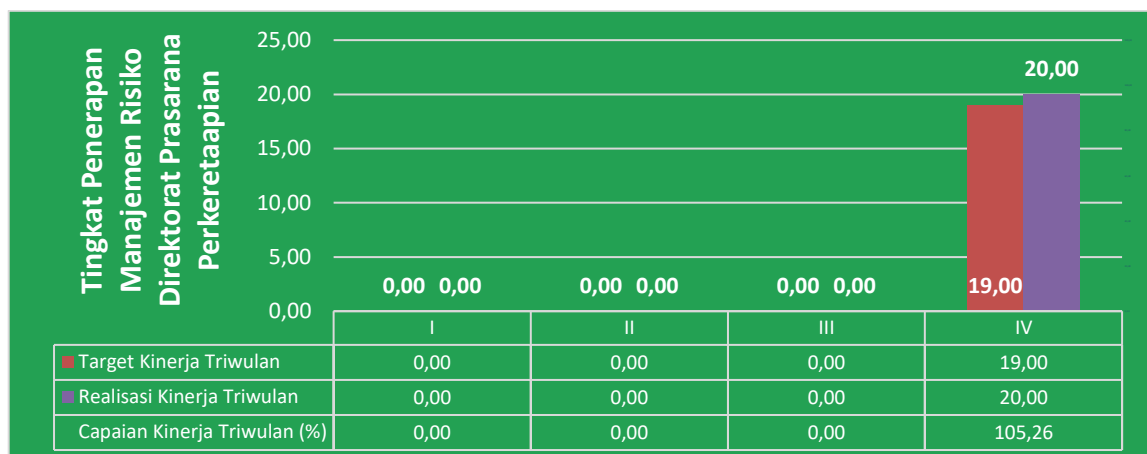
Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 105,26%.

Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.63
Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-	20,00	-	-	-	105,26	105,26

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja pertriwulan dan tahunan pada indikator Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.48

Grafik Capaian Kinerja Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.8.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan beberapa penyesuaian yaitu telah dilakukan **Penyesuaian Aktivitas/Strategi** dengan penetapan target pada revisi perjanjian kinerja berdasarkan penetapan rencana strategis dan penetapan

revisi rencana aksi berdasarkan hasil monitoring evaluasi kinerja periode triwulan III tahun 2025.

Selain itu penyelesaian sertifikasi prasarana perkeretaapian tahun 2025 sebanyak 95 sertifikat terdiri dari 43 Sertifikat kelaikan jalur dan bangunan kereta api dan sebanyak 52 sertifikat kelaikan fasilitas operasi kereta api sebagai **penyesuaian aktivitas**. **Penyesuaian organisasi** tahun 2025 telah dilakukan penetapan struktur manajemen risiko yang terdiri dari Lini Pertama yaitu Unit Pengelola risiko, Lini Kedua yaitu Unit Manajemen Risiko dan Unit ketiga adalah Inspektorat Jenderal (Inspektorat II) sesuai dengan penetapan Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian selaku Pemilik Risiko Nomor SK-K3DJKA 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Struktur Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026.

Penyesuaian strategi yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja dan menetapkan aktivitas/kegiatan penanganan risiko, pada tahun 2025 telah ditetapkan piagam manajemen risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang terdiri dari identifikasi serta penilaian risiko sebanyak 155 risiko, jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 63 risiko atau 40,65% dari total populasi risiko, dan risiko yang berada diatas selera risiko telah disusun rencana penanganan risiko menghasilkan 117 kegiatan penanganan. Selain itu untuk **strategi** pelaksanaan manajemen risiko pada level pejabat administrator sampai dengan level jabatan fungsional/pelaksana pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terdapat indikator kinerja individu terkait dengan Manajemen Risiko sebagai dukungan capaian kinerja. Keberhasilan penyelenggaraan manajemen risiko pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian juga didukung **penyesuaian aktivitas** secara berkala dilakukan pemantauan penanganan risiko, dan sampai triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan penanganan sebanyak 115 kegiatan dan 2 kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran tidak tersedia dan perubahan kebijakan.

Crosscutting Aktivitas antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan Mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan Manajemen Risiko sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, Mengidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan, Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian, mengelola, melakukan pemantauan, dan pelaporan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko
2. Inspektorat Jenderal melaksanakan Melaksanakan Penilaian dan Evaluasi Manajemen Risiko pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Melakukan Pengawasan Internal

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 5 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 0 risiko diatas selera risiko dan 5 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 0 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penanganan risiko (format 8) sebanyak 0 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 0 kegiatan penanganan sebanyak 0 kegiatan penanganan yang telah selesai.

2.8.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum bisa dibandingkan dikarenakan penilaian maturitas

Manajemen Risiko baru dilaksanakan pada tahun 2025. Tabel perbandingan realisasi dan target kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel III.64

Indikator kinerja kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	19	-	-	-	20

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.49

Pebandingan Target dan Realisasi Periode 2022-2025 Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.8.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA Periode Tahun 2025 - 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja

terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 65
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	19	20	21	22	23	20	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.50
Perbandingan Target renstra dan realisasi periode 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

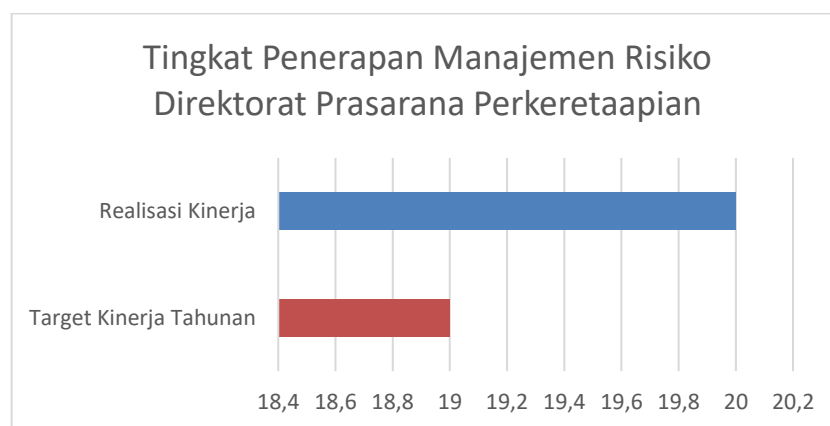
Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III.66

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	19	20	105,26%

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.51

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Periode Renstra 2025

2.8.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Perbandingan kinerja level nasional untuk indikator kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian data pada periode Triwulan IV tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Rating Kondisi Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga, data (benchmarking) kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.67

Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

UNIT KERJA	MATURITAS MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN IV TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	20
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEKERETAAPIAN	23
POLITEKNIK ILMU PELAYANAN SEMARANG	24

2.8.7 Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi periode Triwulan IV Tahun 2025 terhadap indikator kinerja kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian, masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan penanganan guna memitigasi potensi risiko tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Kendala pada indikator kinerja tersebut antara lain terdapat dua kegiatan penanganan risiko yang tidak terlaksana akibat adanya perubahan kebijakan. Kegiatan penanganan berupa penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) MRT East–West tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan tidak dilakukannya slicing loan oleh Bappenas. Selain itu, kegiatan penanganan berupa launching Aplikasi Sertifikasi tidak terlaksana karena akan dilakukan redevelop aplikasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Di samping itu, dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penanganan risiko masih ditemukan ketidaksesuaian antara risiko yang diidentifikasi dengan rencana penanganannya, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masing-masing pengelola risiko sehingga diperlukan adanya pelaksanaan bimbingan teknis manajemen risiko guna meminimalisir adanya ketidaksesuaian penanganan risiko berserta memperkaya SDM yang qualify dalam Manajemen Risiko.

2.8.8 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian Strategi, Aktivitas, Anggaran, Penyesuaian Jabatan/Pegawai untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Kondisi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Kondisi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko;
5. Sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Penyusunan Form 5 dan Form 8 sebagai lampiran piagam Manajemen Risiko;
2. Pemantauan penanganan Risiko tahun 2026.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.

III.2. 11. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Good Governance dan Clean Goverment di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian tidak ada perubahan target yaitu 85,75%. Penetapan target kinerja penetapan rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 dengan formulasi perhitungan mengacu kepada PMK 62 Tahun 2022 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas

pelaksanaan anggaran yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu (Aplikasi SMART Kemenkeu).

2.7.1 Analisis Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

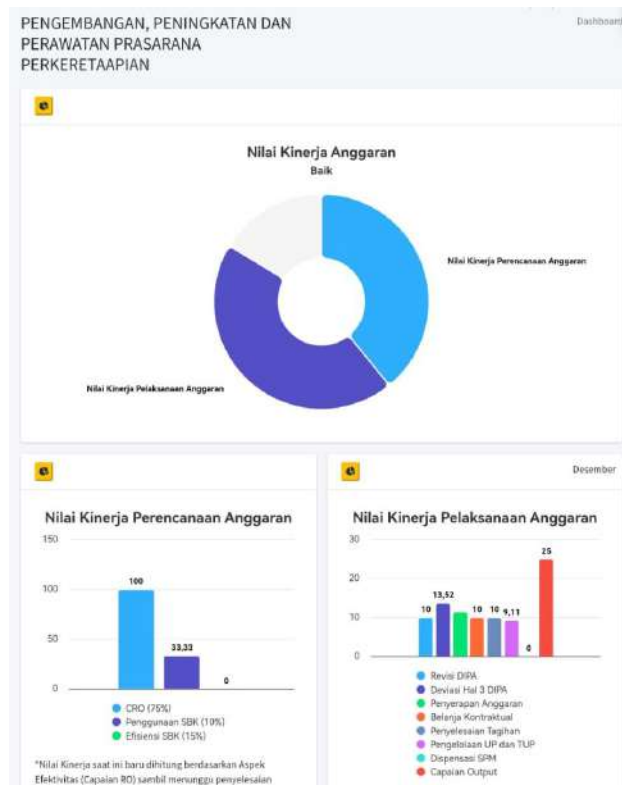
Dari hasil pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2025, realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 83,66 berdasarkan pada aplikasi SMART periode bulan Desember 2025. Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	$= \frac{\text{Nilai Perencanaan Anggaran} + \text{Nilai Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran}}{2}$
--	--

Terdiri dari:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	+	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
1. Efektivitas Capaian RO sebesar 75% 2. Efisiensi : a. Penggunaan SBK sebesar 10% b. Efisiensi SBK sebesar 15%		1. Kualitas Perencanaan Anggaran : a. Revisi DIPA sebesar 10% b. Deviasi Hal III DIPA sebesar 15% 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran : b. Penyerapan Anggaran sebesar 20% c. Belanja Nomenklatur sebesar 10% d. Penyelesaian Tagihan sebesar 10% e. Pengelolaan UP dan TUP sebesar 10% 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Capaian output sebesar 25% 4. Dispensasi SPM (Pengurangan)

Sehingga capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART sebagai berikut :



Gambar. III.57

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui aplikasi SMART Kemenkeu

Atau dengan perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	$= \frac{78,33 + 88,99}{2}$	$= 83,66$
--	-----------------------------	-----------

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV sebesar 83,66% dengan target kinerja Triwulan IV sebesar 85,75% didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 97,56% (on the right track).

2.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan

target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 97,94%.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 83,66%.

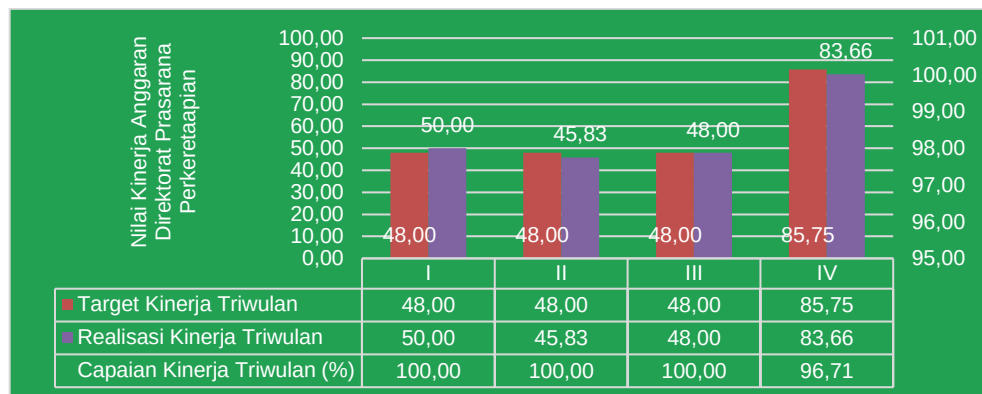
Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.68

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dit. Prasarana

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,75	48,00	48,00	48,00	85,75	50,00	45,83	44,30	83,66	100,00	100,00	100,00	96,71	97,56

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.53

Diagram perbandingan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dit. Prasarana

2.7.3 Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu telah dilakukan **penyesuaian strategi**

yaitu perubahan rencana aksi sebagaimana penetapan revisi kegiatan perjanjian kinerja tahun 2025 dan telah dilakukan revisi halaman III DIPA Tahun Anggaran 2025 berkala.

penyesuaian aktivitas dengan telah dilakukan secara berkala dilakukan input capaian Rincian Output (RO) pada aplikasi SAKTI sehingga mendukung capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu sebesar 88,99 dengan raihan komponen Nilai Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 25 dan Nilai Perencanaan Anggaran sebesar 78,33 dengan raihan komponen Nilai Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 100 dan, *dashboard* nilai perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagai berikut :

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan10entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	022.98.467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	78,33	100,00	33,33	0,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya



Kementerian
Keuangan

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN**

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	133	022	467484	Nilai	100,00	90,11	56,81	100,00	100,00	91,10	100,00	88,99	100%	0,00	88,99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	13,52	11,36	10,00	10,00	9,11	25,00				
					Nilai Aspek	95,00			86,98			100,00				

Gambar III.54

Rincian Nilai Kinerja Perencanaan dan Nilai Kinerja Pelaksanaan anggaran 2025

Selain itu keberhasilan kinerja didukung dengan raihan nilai penggunaan efisiensi Standar Biaya Khusus (SBK) sebesar 33,33 pada Nilai Perencanaan Anggaran yaitu.

Sebagai pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapihan telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai Sesuai dengan pengukuran kinerja pelaksanaan Indikator kinerja **Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapihan** telah

dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III.69
Sebaran jabatan di indikator nilai kinerja anggaran

No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	3
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas keuangan negara	1
3	Pranata keuangan APBN/Pengawas Keuangan negara	1
4	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	3
5	Penelaah teknis Kebijakan	1

Penyesuaian strategi yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja dan menetapkan aktivitas/kegiatan penanganan risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bersurat kepada penyedia terkait kelengkapan dokumen persyaratan
2. Surat edaran kepada penyedia terkait pengajuan penagihan
3. Surat penolakan usulan revisi anggaran

Terhadap anggaran yang telah diefisiensi/ blokir telah dilakukan **penyesuaian strategi/anggaran** dengan mengusulkan buka blokir anggaran sesuai dengan Revisi DIPA/POK ke 4 Tahun 2025 anggaran terblokir sebesar Rp. 396.604.292.000,- telah diusulkan buka blokir anggaran dan telah disetujui sehingga blokir berkurang menjadi sebesar Rp. 7.508.302.000,-.

Penyesuaian organisasi tahun 2025 yaitu dengan telah dilakukan pembentukan pengelola anggaran tahun 2025 sebagaimana Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : SK-SPPPPKA 1 Tahun 2025 dan telah dilakukan revisi beberapa kali pada tahun 2025 yaitu salah satunya untuk mengakomodir kegiatan urban transport serta kekurangan pembayaran pembangunan LRT Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK-SPPPPKA 14 Tahun 2025 dan revisi terakhir untuk mengakomodir pembayaran *backlog* perawatan prasarana perkeretaapian tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SK-SPPPPKA 24 Tahun 2025

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Crosscutting Kinerja tahun 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan indikator kinerja Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana keterkaitannya adalah nilai Kinerja Anggaran berkontribusi pada nilai kinerja anggaran DJKA, dimana formulasi perhitungan realisasi capaian kinerja pencapaian kinerja tata kelola Pemerintahan DJKA salah satunya komponen Nilai Kinerja Anggaran DJKA.

Sedangkan **Crosscutting Aktivitas** Indikator kinerja kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut :

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian Melaksanakan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pagu efektif pada rencana aksi atas perjanjian kinerja;
2. Kementerian Keuangan Melakukan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh KPPN Tipe A1 Jakarta 1 dan Nilai Perencanaan Anggaran melalui aplikasi SMART oleh Direktorat Jenderal Anggaran
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran/Audit pada Direktorat.

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan Manajemen Risiko sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko

berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 17 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 9 risiko diatas selera risiko dan 8 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 9 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 12 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 12 kegiatan penanganan sebanyak 12 kegiatan penanganan yang telah selesai atau semua kegiatan penanganan telah selesai dilaksanakan

2.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2022 – 2025 dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan **Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian** periode 2022 sampai dengan 2025 dengan akumulasi target sampai dengan tahun 2024 (periode 2020-2024) sebesar 91,76% dan pencapaian tahun 2025 sebesar 83,55% (periode 2025-2029). Penjelasan Tabel perbandingan periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel III.70
 Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	99,93	89,50	91,76	85,75	99,96	91,65	96,67	83,66

Keterangan : terdapat perbedaan formulasi perhitungan pada periode renstra 2020-2024 dan renstra 2025-2029 sesuai dengan manual indikator pada renstra

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.55

Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2025 – 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dit. Prasarana Perkeretaapian

2.7.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA periode tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.71

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dit. Prasarana

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,75	85,75	85,85	85,95	86,05	83,66	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.56

Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

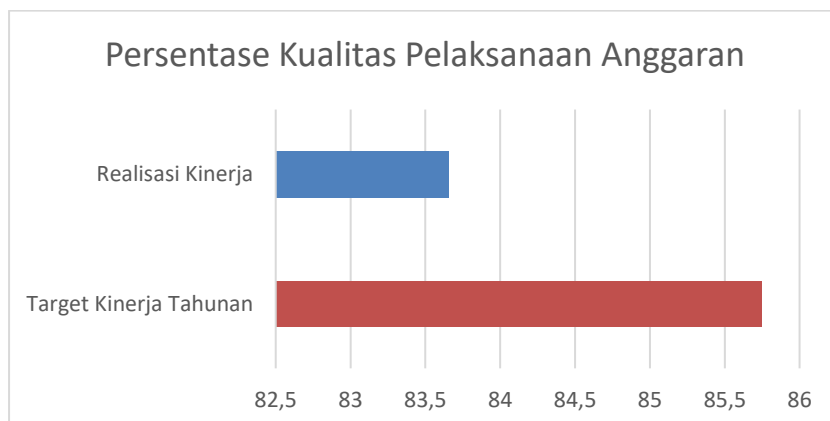
Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III. 72

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2029	
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,75	83,66	97,56%

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini



Gambar III.57

Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

2.7.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Dari hasil perbandingan realisasi indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Level Nasional) diketahui bahwa perbandingan (benchmarking) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel III.73
 Benchmarking Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelaksanaan Anggaran

UNIT KERJA	SATUAN	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Nilai	78,33	88,99	83,66
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	50,25	80,83	65,54
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	Nilai	55,39	94,41	74,90

2.7.7 Kendala Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian yaitu belum adanya penggunaan SBKU pada penilaian perencanaan anggaran.

2.7.8 Upaya Peningkatan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana sebagai berikut :

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
4. Usulan buka blokir anggaran TA 2026;
5. Revisi Volume Output TA 2026
6. Penyusunan volume output pada usulan anggaran berdasarkan Standar Biaya Keluaran Umum.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Pengisian CRO secara berkala pada aplikasi SAKTI ;
2. Percepatan proses pelelangan untuk pekerjaan kontraktual.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian. sesuai dengan tugas jabatan.

III.2. 12. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian tidak ada perubahan target kinerja yaitu sebesar 100%. Perubahan hanya terdapat besaran potensi penerimaan PNBP tahun 2025 yang semula berdasarkan perjanjian kinerja awal tahun 2025 sebesar Rp. 908.250.000 terdapat perubahan berdasarkan realisasi PNBP menjadi Rp. 10.229.627.677,-, penyesuaian hanya dilakukan pada Rencana Aksi perbulan di tahun 2025.

Perubahan juga berdasarkan Rekomendasi Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 agar capaian kinerja *on the right track*. Penetapan target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029.

2.8.1 Analisis Capaian Kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode IV tahun 2025, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 100%, atau Realisasi bulan Januari – Desember 2025 sebesar Rp. 10.229.627.677,-. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Realisasi PNBP	=	$\frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan}}$	X 100 %
---------------------------------	---	--	---------

Sehingga Perhitungan Capaian Kinerja Sebagai berikut:

Persentase Realisasi PNBP	=	$\frac{10.229.627.677}{10.229.627.677}$	X 100 %	= 100
------------------------------	---	---	---------	-------

2.8.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Prasarana Perkeretaapian

Rata-rata realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode

triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 100%.

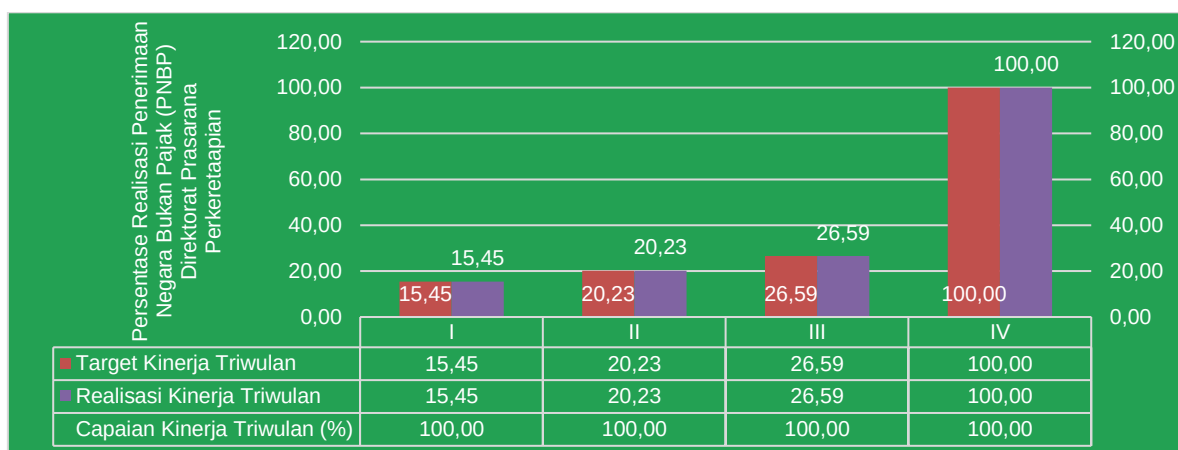
Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 100%.

Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.74
Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	100,00	15,45	20,23	26,59	100,00	15,45	20,23	26,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.58
Diagram perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

2.8.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung langkah-langkah yang telah dilakukan **penyesuaian aktivitas/strategi** yaitu dilakukan evaluasi potensi penerimaan PNBP tahun 2025 dan perubahan rencana aksi pada revisi perjanjian kinerja tahun 2025. Selain itu keberhasilan capaian kinerja didukung **penyesuaian aktivitas** yaitu penyelesaian perizinan perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain, perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum dan sertifikasi prasarana perkeretaapian

1. Pelayanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 1 Penetapan perizinan;
2. Pelayanan Perizinan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum/Khusus sebanyak 65 Penetapan perizinan;
3. Pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 95 penetapan sertifikasi.

Dari Januari - Desember 2025, dilakukan koordinasi untuk pembayaran PNBP kepada stakeholder pengguna jasa bidang prasarana perkeretaapian sebagai **penyesuaian aktivitas** secara berkala yang telah dilaksanakan. Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) perjenisnya sebesar Rp. 10.229.627.677- sebagai berikut :

1. Akun 425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp. 60.200.000,-
2. Akun 425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya sebesar Rp. 3.428.920.000,-
3. Akun 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp. 6.487.980.753,-
4. Akun 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 184.510.275,-
5. Akun 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 68.016.649,-

Sebagai pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Persentase Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** Sesuai dengan pengukuran kinerja

pelaksanaan Indikator kinerja **Persentase Realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian** telah dilakukan penyesuaian jabatan/pegawai untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai dengan detail sebagai berikut :

Tabel III.75
 Sebaran jabatan di indikator PNBP

No	Jabatan Pengampu	Total Pegawai
1	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	5
2	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	13
3	Pembina Jasa Konstruksi Muda	1
4	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	5
5	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	1
6	Perekayasa Ahli Pertama	3
7	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	2
8	Pranata Komputer Ahli Pertama	5
9	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	8
10	penata laksana jalan dan jembatan terampil	3
11	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	11
12	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	28
13	Petugas Transportasi Perkeretaapian	7
14	Pranata keuangan APBN/Pengawas Keuangan negara	1
15	Pranata keuangan APBN/Pengawas Keuangan negara	1

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Crosscutting Kinerja tahun 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan indikator kinerja Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

dimana keterkaitannya adalah Realisasi PNBP berkontribusi pada Pencapaian tata kelola Pemerintahan DJKA, dimana formulasi perhitungan realisasi capaian kinerja pencapaian kinerja tata kelola Pemerintahan DJKA salah satunya komponen Tingkat Pencapaian Realisasi PNBP DJKA.

Sedangkan Crosscutting Aktivitas Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut :

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan Penyelesaian pelayanan dibidang prasarana perkeretaapian untuk izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan Bangunan lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional, Melakukan verifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan serta penetapan gambar desain perizinan, Menerbitkan billing pembayaran PNBP, Melakukan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan penyetoran PNBP
2. Kementerian Keuangan Melakukan Penilaian Indikator Kinerja Memverifikasi penyetoran PNBP dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan PNBP pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan **Manajemen Risiko** sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 7 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 4 risiko diatas selera risiko dan 3 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 4 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 5 kegiatan penanganan.

Sampai dengan triwulan III dari 5 kegiatan penanganan sebanyak 5 kegiatan penanganan yang telah selesai dan sebanyak 0 Kegiatan penanganan yang masih berproses sampai dengan triwulan IV.

2.8.4 Perbandingan Target Dan Capaian Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian periode 2022 sampai dengan 2025 dengan akumulasi target sampai dengan tahun 2025 adalah 100% dan akumulasi realisasi sebesar 100% dengan persentase 100% target kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel III.76

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	%	100	100	100	100	58,37	80,54	99,02	100

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.59

Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2025 – 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

2.8.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA periode tahun 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Indikator Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.77
Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.60
Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi periode tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

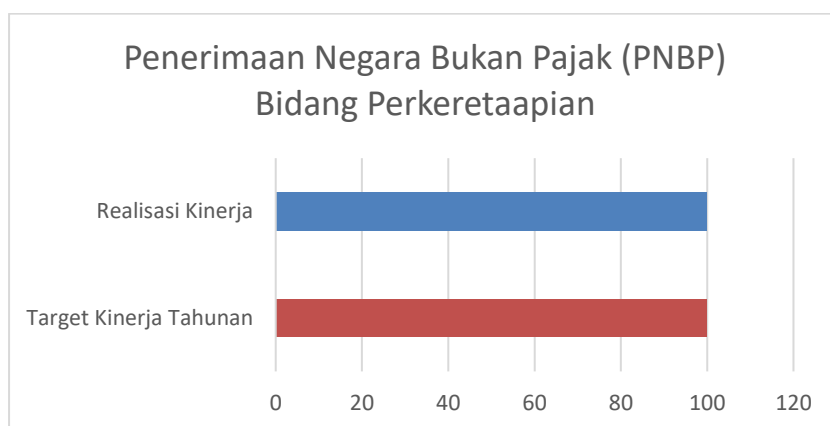
Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III.78

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	100	100%

Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 61

Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

2.8.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Dari hasil perbandingan realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian dengan realisasi kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level Nasional) dengan perbandingan (benchmarking) kinerja terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel III.79

Benchmarking Kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana	Rupiah	Rp. 10.229.627.677
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rupiah	Rp. 1.370.319.865
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rupiah	Rp. 35.243.498.000

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Per Eselon I dan Laporan PNBP Direktorat Prasarana Periode Bulan September 2025

2.8.7 Kendala Pelaksanaan pada Indikator Kinerja Kegiatan Perolehan Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 indikator kinerja kegiatan Perolehan Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi yaitu masih ada pemegang izin yang belum melakukan perpanjangan izin.

2.8.8 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Perolehan Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana;

2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana;
 3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana.
- b. Penyesuaian Aktivitas :**
1. Pengenaan PNBP kepada stakeholder pemegang izin yang selesai melakukan perizinan;
- c. Penyesuaian Anggaran :**
1. Usulan Penggunaan Anggaran dari sumber PNBP;
- d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :**
1. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
 2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana sesuai dengan tugas jabatan.

III.2. 13. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat perubahan target dengan target awal 79 menjadi 78,56. Penetapan perubahan target berdasarkan penetapan renstra 2025-2029.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2022 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan.

2.13.1 Analisis Capaian Kinerja Persentase Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari hasil pengukuran kinerja periode IV tahun 2025, Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 85,02. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target kinerja sesuai dengan Revisi ketiga Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan formulasi perhitungan kinerja sesuai dengan analisa smart dan manual indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	$= (Nilai\ pengelolaan\ arsip\ dinamis \times 70\%) + (Nilai\ sumber\ daya\ kearsipan \times 30\%)$
--	---

Sehingga Perhitungan Capaian Kinerja Sebagai berikut:

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	$= (59,514 \times 70\%) + (25,506 \times 30\%) = 85,02$
--	---

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV/Tahun 2025 sebesar 85,02 dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 78,56 didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 108,22% (*on the right track*).

2.13.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Triwulan & Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Realisasi kinerja terhadap target kinerja triwulanan dan target kinerja tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan untuk periode triwulanan realisasi capaian kinerja per triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan target kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan IV capaian kinerja periode triwulanan tahun 2025 mencapai persentase 100%.

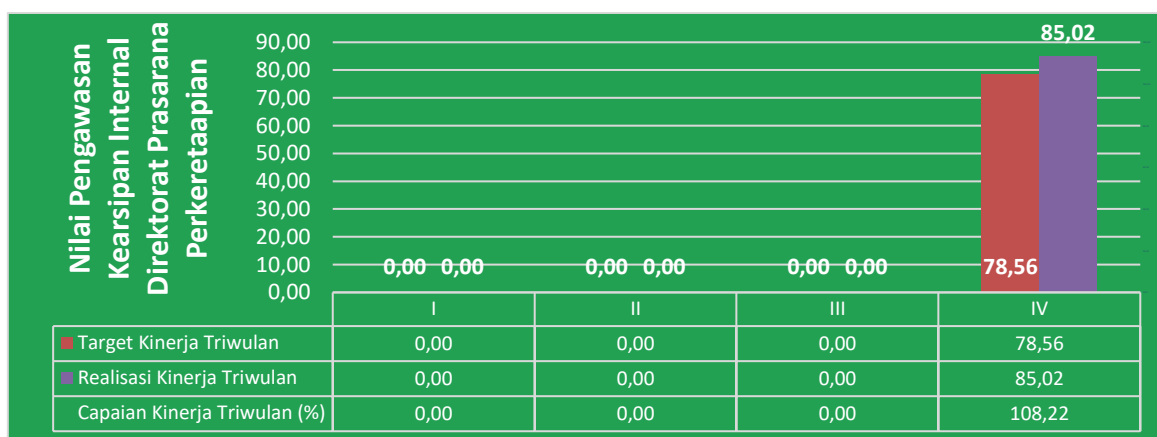
Sedangkan untuk perbandingan realisasi capaian kinerja tahunan terhadap target tahunan capaian kinerja tahun 2025 mencapai persentase 108,22%. Secara jelas perbandingan target triwulanan dan tahunan dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.80

Perbandingan capaian kinerja per triwulan
Indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,56	-	-	-	78,56	-	-	-	85,02	-	-	-	108,22	108,22

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja per triwulan dan tahunan pada indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.62

Diagram perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

2.13.3 Analisis Kerhasilan Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian didukung pengelolaan arsip dinamis dan dukungan sumber daya kearsipan berjalan efektif, telah dilakukan **penyesuaian strategi** dengan melakukan penguatan prasarana arsip vital, percepatan transformasi arsip elektronik melalui SRIKANDI, serta pembenahan penataan arsip di gudang.

Penyesuaian strategi yaitu mengintegrasikan antara manajemen kinerja dengan manajemen risiko yaitu dengan melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap target kinerja dan menetapkan aktivitas/kegiatan penanganan risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan SK Tim Pengelola Arsip Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Sosialisasi SOP Penciptaan dan Penerimaan Naskah Dinas dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Penyampaian surat edaran himbauan tertib arsip.

Dari hasil audit pengawasan kearsipan memperlihatkan kontribusi kuat pada Aspek Sumber Daya Kearsipan yaitu dukungan SDM serta prasarana/sarana dan perbaikan pada Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. **Penyesuaian aktivitas** pada tahun 2025 juga mendukung keefektifan capaian kinerja yaitu :

1. Pemindahan dan Penataan Arsip Vital Proyek LRT Jabodebek (PSN), Keberhasilan utama berasal dari langkah penyelamatan arsip vital melalui pemindahan terjadwal ke Kantor Pusat Arsip Kemenhub Soreang dan penataan/manuver fisik berbasis daftar kendali. Sampai Tahap 5, pemindahan dengan status “selesai manuver data dan fisik arsip” mencapai 937 kontainer. Output penataan/manuver fisik mencatat 3.863 item dengan 1.508 box arsip. Dampaknya langsung terhadap penilaian: penguatan pengelolaan arsip vital dan peningkatan (temu balik) arsip proyek strategis, sekaligus memperkuat bukti dukung akuntabilitas pembangunan prasarana;
2. Penataan dan Pemasangan AC pada Ruang Arsip Vital LRT Jabodebek pada Gedung Pusat Arsip Kemenhub, Upaya ini memperkuat perlindungan fisik arsip vital, berupa rencana penyekatan area $\pm 250 \text{ m}^2$ pada ruang arsip lantai 3 Gedung Pusat Arsip Kemenhub serta pemasangan AC split 6 unit untuk menjaga kestabilan suhu ruang simpan. Dampaknya terhadap penilaian: meningkatkan pemenuhan standar prasarana dan sarana kearsipan, terutama aspek keamanan dan preservasi arsip vital.
3. Sosialisasi Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Ditpraska, Kegiatan sosialisasi dan uji coba penggunaan SRIKANDI dilaksanakan terjadwal lintas unit/subdirektorat dan satuan kerja (agenda Juli 2025),

untuk memastikan pemahaman konseptor dan alur naskah dinas berbasis SPBE. Dampaknya terhadap penilaian: memperkuat kesiapan proses penciptaan arsip elektronik (naskah dinas) agar sesuai tata naskah dinas serta terdokumentasi sebagai arsip dinamis autentik.

4. Penataan Arsip Tidak Teratur menyasar kondisi gudang yang menampung >1.000 kontainer bercampur antara arsip dan non-arsip, sehingga menyulitkan temu balik dan meningkatkan risiko kehilangan/kerusakan. Pelaksanaan penataan di Gudang Jalan Kesehatan berlangsung sekitar 6 minggu dan menuntaskan 495 kontainer, kemudian terpetakan menjadi: 152 kontainer arsip (31%), 120 kontainer non-arsip duplikasi (24%), dan 223 kontainer non-arsip lain-lain (45%).

Keberhasilan didukung **penyesuaian kebijakan** yaitu merupakan **perubahan budaya kinerja dan inovasi** dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian yaitu Implementasi Serentak SRIKANDI sejak Agustus 2025 Implementasi serentak menjadi pengungkit nilai pada area arsip elektronik. Indikator audit pada bagian elektronik menunjukkan:

- Naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI berada pada rentang >90%–100% (berdasarkan sampel audit).
- Tindak lanjut naskah dinas oleh pimpinan/unit pengolah melalui SRIKANDI berada pada rentang >70%–90% dengan rata-rata persentase tindak lanjut tercatat 84,21%.

Dampaknya terhadap penilaian: menguatkan aspek penciptaan arsip dan pengendalian naskah dinas elektronik, sekaligus memperjelas jejak proses (audit *trail*) dalam tata kelola administrasi.

Penyesuaian organisasi tahun 2025 yaitu dengan telah dilakukan pembentukan tim Pengelola Arsip dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor SK-K3DJKA 9 Tahun 2025 dan pembentukan tim Penataan Arsip Tidak Teratur di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor SK-K3DJKA 54 Tahun 2025.

Sebagai pelaksanaan Indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan **penyesuaian jabatan/pegawai** untuk mengampu indikator kinerja berjenjang pada Sasaran Kinerja Pegawai pada jabatan Arsiparis sebanyak 3 orang. Selain itu untuk penguatan kompetensi pegawai telah dilaksanakan Sertifikasi Arsiparis oleh ANRI yang memperkuat kompetensi teknis dan bobot penilaian pada subaspek Sumber Daya Manusia Kearsipan. Dampaknya terhadap penilaian: meningkatkan legitimasi kapasitas SDM (kompetensi terstandar) dan memperkuat keberlanjutan pembinaan internal. Sesuai dengan *bezzeting* masih terdapat kekurangan pegawai yang menempati jabatan fungsional yaitu pada jabatan fungsional Arsiparis Ahli Pertama. sesuai dengan formasi jabatan fungsional pada tahun 2025, telah dilakukan penempatan jabatan fungsional arsiparis ahli pertama dengan jumlah sebanyak 1 orang, sehingga update posisi *bezzeting* pegawai pada jabatan perencana ahli pertama s.d tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III. 81

Bezzeting Pegawai Jabatan Arsiparis Ahli Pertama

JABATAN	FORMASI	<i>Bezetting</i> (B)	Kebutuhan (K)	+/-
Arsiparis Ahli Pertama	CPNS 2025	3	3	0

Selain itu keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan pengukuran dan pelaporan kinerja dengan telah dilaksanakan rekomendasi peningkatan kinerja setiap periode pelaporan kinerja tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Laporan Kinerja tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai dengan baik atau *on the right track*.

Crosscutting Aktivitas Indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Prasarana Perkeretaapian Perkeretaapian sebagai berikut :

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian Melakukan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan penilaian pengawasan Kearsipan Internal Direktorat

Prasarana Perkeretaapian Melaksanakan kegiatan penyusutan arsip direktorat prasarana perkeretaapian.

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan **Manajemen Risiko** sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko, telah diidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil yaitu :

1. Identifikasi risiko sebanyak 8 risiko;
2. Analisis dan evaluasi risiko sebanyak 2 risiko diatas selera risiko dan 6 di bawah selera risiko (selera risiko sasaran keselamatan 5/sangat rendah, sasaran non keselamatan 11/rendah);
3. Dari 2 risiko yang memiliki nilai risiko diatas selera risiko telah disusun rencana penangan risiko (format 8) sebanyak 4 kegiatan penanganan. Sampai dengan triwulan IV dari 4 kegiatan penanganan sebanyak 4 kegiatan penanganan yang telah selesai atau semua kegiatan penanganan telah selesai dilaksanakan.
- 4.

2.13.4 Perbandingan Target Dan Capaian Realisasi Periode 2022 – 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2022 sampai dengan 2025 belum dapat dilakukan perbandingan indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian baru terakomodir di renstra 2025-2029 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel III.82
 Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	78,56	-	-	-	85,02

Untuk diagram perbandingan capaian kinerja periode 2022 sampai dengan 2025 pada indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.63

Perbandingan Target Dan Realisasi Periode 2025 – 2029 Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.13.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target RENSTRA periode tahun 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, telah ditetapkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berorientasi *outcome*. Untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja terhadap target Renstra periode tahun 2025-2029 dengan hasil perbandingan realisasi kinerja terhadap target di dalam periode Renstra sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.83

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,56	78,56	80,19	81,70	83,03	85,02	-	-	-	-

Untuk diagram perbandingan realisasi kinerja terhadap target periode renstra 2025-2029 pada indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III.64

Perbandingan Target Dalam Renstra Dengan Realisasi periode tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

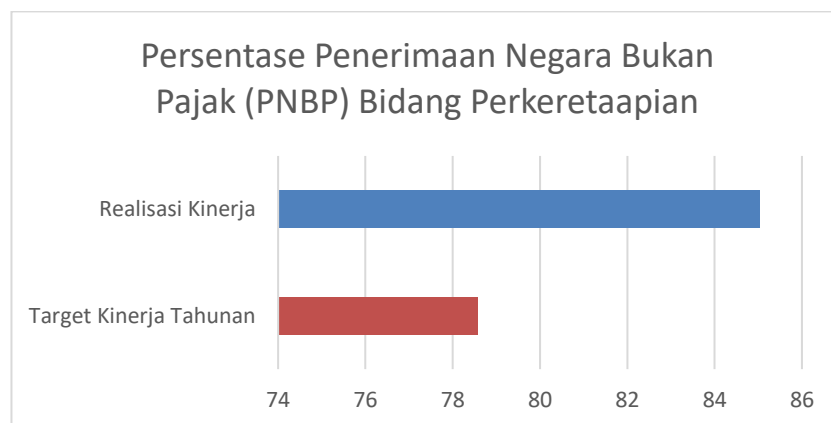
Sedangkan untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 didapatkan hasil perbandingan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III.84

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		2025	2025	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	78,56	85,02	108,22%

U Untuk diagram untuk pengukuran perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja periode renstra tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar III. 65

Perbandingan Target Renstra Dengan Realisasi tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

2.13.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Level Nasional (Benchmarking Kinerja)

Dari hasil perbandingan realisasi indikator kinerja kegiatan **Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian** dengan perbandingan (benchmarking) kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.85

Benchmarking Kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Nilai
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,02
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT	Indeks Pengawasan Kearsipan Perhubungan Tahun 2025	Nilai	87,04

Sumber data : Laporan LAKI Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025

2.13.7 Kendala Pelaksanaan pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana

Dari hasil monitoring dan evaluasi periode triwulan IV tahun 2025 indikator kinerja kegiatan **Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana** terdapat kendala dan perlu dilakukan penanganan sehingga kemungkinan risiko tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan dapat diatasi.

Kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan **Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian** belum

dilaksanakannya penataan arsip tidak teratur Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara keseluruhan dan pemberkasan arsip elektronik masih belum optimal.

2.13.8 Upaya Mengatasi Kendala pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sebagai upaya mencapai target kinerja pada laporan kinerja, telah disusun rekomendasi peningkatan kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Strategi:

1. Memperkuat fokus pemenuhan indikator audit pada aspek yang bobotnya tinggi, khususnya pengelolaan arsip elektronik (SRIKANDI), arsip vital, dan SDM kearsipan.
2. Menetapkan rencana aksi peningkatan nilai pengawasan kearsipan berbasis gap analysis (temuan/indikator yang belum maksimal), lengkap dengan target, PIC, dan tenggat waktu.
3. Mendorong konsolidasi tata kelola kearsipan lintas unit kerja melalui rapat monitoring rutin dan pelaporan capaian bulanan sebagai bukti dukung audit.

b. Penyesuaian Aktivitas:

1. Menyusun dan menerapkan SOP pemberkasan elektronik serta standar pengunggahan/penamaan dokumen di SRIKANDI untuk memastikan arsip mudah ditelusuri dan konsisten antar unit kerja.
2. Melaksanakan monitoring kepatuhan SRIKANDI (naskah dinas masuk/keluar, tindak lanjut, dan pengarsipan) dengan rekap laporan bulanan dan umpan balik kepada unit yang belum tertib.
3. Melanjutkan program penataan arsip tidak teratur secara bertahap serta memperluasnya ke arsip aktif-inaktif di unit kerja/satker, disertai pembaruan daftar arsip.
4. Memutakhirkan skema pengelolaan arsip vital (identifikasi–perlindungan–penyimpanan–alih media–daftar arsip vital) termasuk penguatan kondisi ruang simpan dan kontrol lingkungan.

5. Menyiapkan paket bukti dukung audit secara terstruktur (BA, daftar arsip, laporan kegiatan, foto sebelum-sesudah, rekap SRIKANDI, SK tim) agar siap saat pengawasan.

c. Penyesuaian Anggaran:

1. Mengalokasikan anggaran prioritas untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap nilai pengawasan, seperti pembinaan/monitoring SRIKANDI, penataan arsip, penyusutan arsip, pemeliharaan ruang simpan arsip vital, dan alih media arsip prioritas.
2. Mengoptimalkan efisiensi anggaran melalui konsolidasi penyimpanan (pengurangan kebutuhan gudang/sewa) dan pemanfaatan sarana yang sudah tersedia secara maksimal.
3. Menyusun kebutuhan anggaran berbasis output yang terukur (jumlah kontainer/box/item tertata, jumlah unit patuh SRIKANDI, jumlah arsip vital terdata/terlindungi) agar justifikasi anggaran kuat.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai:

1. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.
2. Menetapkan PIC pengelola arsip pada tiap subdit/satker untuk pengendalian kepatuhan SRIKANDI dan pembinaan pemberkasan, serta memastikan ada pengganti (backup) untuk menjaga keberlanjutan.
3. Mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan/sertifikasi teknis kearsipan (prioritas bagi arsiparis) agar penguatan SDM tercermin pada penilaian.

III.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

III.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam laporan monitoring kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pengukuran terkait dengan efisiensi sumber daya. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan dengan pengukuran terhadap efisiensi anggaran dan efisiensi Sumber daya Manusia sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam proses pelaksanaan kegiatan periode Triwulan IV Tahun 2025, sesuai dengan perhitungan efisiensi mengacu kepada peraturan menteri keuangan nomor: 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



Tabel III.86

Efisiensi Anggaran Per Masing-Masing Indikator Periode IV Tahun 2025

RO	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	100%	93.279.566.000,00	0,00	93.279.566.000,00	93.279.566.000,00
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	100%	2.430.411.000,00	1.434.519.730,00	2.430.411.000,00	995.891.270,00
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	100%	2.297.919.295.000,00	2.297.919.295.000,00	2.297.919.295.000,00	0,00
Jalur Kereta Api	100%	81.066.625.655,00	81.066.625.655,00	81.066.625.655,00	0,00
Infrastruktur Perkeretaapian	100%	1.456.860.000,00	1.456.860.000,00	1.456.860.000,00	0,00
Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	100%	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	100%	60.376.841.000,00	0,00	60.376.841.000,00	60.376.841.000,00
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	1.550.945.000,00	1.508.007.772,00	1.550.945.000,00	42.937.228,00
Layanan Perkantoran	100%	12.320.058.000,00	8.860.243.265,00	12.320.058.000,00	3.459.814.735,00
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	359.993.000,00	348.490.114,00	359.993.000,00	11.502.886,00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	1.539.010.000,00	1.510.611.503,00	1.539.010.000,00	28.398.497,00
Layanan Manajemen Keuangan	100%	179.612.000,00	173.649.280,00	179.612.000,00	5.962.720,00
Jumlah		2.552.579.216.655,00	2.394.278.302.319,00	2.552.579.216.655,00	158.300.914.336,00
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum(Alokasi\ Anggaran\ RO \times Capaian\ RO) - Realisasi\ Anggaran\ RO}{\sum(Alokasi\ Anggaran\ RO)} \times 100\%$				6,202%	

3.1.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam mendukung reformasi birokrasi dengan melakukan efisiensi sumber daya manusia yang semakin berkualitas.

Analisis Efisiensi SDM dapat dirancang dengan mengukur seberapa optimal SDM yang tersedia mampu menghasilkan output yang sesuai atau melebihi standar kinerja yang ditetapkan. Dengan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} \times \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} \right) \times 100\%$$

Sehingga untuk perhitungan Efisiensi Sumber Daya Manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian didapatkan hasil sebagai berikut :

1. SDM Yang tersedia : 253
2. Kebutuhan SDM Sesuai ABK : 355
3. Output Aktual : 100
4. Target Output : 100
5. Efisiensi SDM = $((253/355) \times (100/100)) \times 100\%$

$$= 71,27\%$$

Nilai Efisiensi SDM Direktorat Prasarana sebesar 71,27% dengan Output Aktual per Target Output sebesar 100%.

III.4 Dukungan Program Prioritas Nasional

Pada Tahun 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan amanah kegiatan program prioritas nasional dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Indikator KP1: Panjang Jalur yang Beroperasi

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, realisasi pembangunan jalur kereta api berhasil melampaui target RPJMN 2025. Total panjang jalur rel yang tercapai sebesar 6.915,12 KM dari target 6.928 KM.

Progres yang mempengaruhi capaian ini pada akhir tahun 2025 yaitu :

- Terdapat update data panjang jalur hasil sinkronisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan masing masing Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil terdapat pengurangan lintas tidak aktif pada lintas muaro kalaban - sawah lunto dan cipatat - padalarang sepanjang 21 Km
- Terdapat potensi pengurangan panjang rel beroperasi akibat bencana sumatera utara
- Pekerjaan pembangunan jalur ganda KA solo balapan - kalioso masih terdapat pembebasan lahan yang terkendala di gudang gilingan

Adapun, sebaran jalur KA berdasarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	WILAYAH KERJA	LINTAS RAYA TERDATA			PANJANG LINTAS	LINTAS CABANG		PANJANG LINTAS	PANJANG TOTAL
		SINGLE	DOUBLE	DDT		SINGLE	DOUBLE		
1	BTP KELAS I JAKARTA	094+453	547+001	058+612	700+066	000+364	002+000	002+364	702+430
2	BTP KELAS I BANDUNG	287+087	758+392	000+000	1045+479	000+091	000+000	000+091	1045+570
3	BTP KELAS I SEMARANG	312+875	1273+058	000+000	1585+933	003+190	000+000	003+190	1589+123
4	BTP KELAS I SURABAYA	574+558	686+130	000+000	1260+688	007+209	000+000	007+209	1267+897
5	BTP KELAS I MEDAN	572+423	064+178	000+000	636+601	001+964	000+000	001+964	638+565
6	BTP KELAS II PADANG	107+221	003+866	000+000	111+087	000+000	000+000	000+000	111+087
7	BTP KELAS II PALEMBANG	350+510	589+594	000+000	940+104	007+602	000+000	007+602	947+706
8	BPKAR SUMSEL	001+051	044+698	000+000	045+749	003+000	000+000	003+000	048+749
9	BPKA SULSEL	090+132	000+000	000+000	090+132	000+000	000+000	000+000	090+132
10	MRT JAKARTA	000+000	031+400	000+000	031+400	000+687	000+000	000+687	032+087
11	LRT JAKARTA	000+000	011+600	000+000	011+600	000+814	000+000	000+814	012+414
12	LRT JABODEBEK	000+000	098+430	000+000	098+430	000+000	000+000	000+000	098+430
13	KCJB	000+000	304+930	000+000	304+930	000+000	000+000	000+000	304+930
14	FREEPORT	026+000	000+000	000+000	026+000	000+000	000+000	000+000	026+000
TOTAL		2416+310	4413+277	058+612	6888+199	024+921	002+000	026+921	6915+120

2. Indikator KP2: Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, realisasi persinyalan elektrik sebesar 65,21% dari target RPJMN tahun 2025 sebesar 65% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persinyalan Elektrik Sebanyak 403
- b. Persinyalan Mekanik Sebanyak 206
- c. Jumlah Persinyalan Sebanyak 609

Dengan penambahan pada tahun 2025 yaitu peningkatan persinyalan pada Stasiun Serdang, Stasiun Payakabung, Stasiun Gelumbang, Stasiun Karangendah, dan Stasiun Lembak.

3. Indikator KP3: Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, persentase Jalur KA sesuai dengan TQI Kategori I dan II sebesar 94,64% dengan target RPJMN 2025 sebesar 94%, dengan rincian :

Realisasi hasil TQI periode III Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 94,64% dengan panjang jalur 5.686,18 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari :

- a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.900,059 KM
- b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.786,116 KM

Realisasi hasil TQI periode II Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 5,36% dengan panjang jalur 321,83 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari :

- c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 277,190 KM
- d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 44,640 KM

Dari hasil pengukuran periode II dan periode III terdapat Kenaikan kategori sebagai berikut:

Kategori I dan II periode II sepanjang 5.584,19 KM atau 93,71% dan pada periode III meningkat menjadi sepanjang 5.686,18 KM atau 94,64%.

Kategori III dan IV periode II sepanjang 374,77 KM atau 6,29% dan pada periode III menurun menjadi sepanjang 321,83 KM atau 5,36%

4. Pro.P – Tata Kelola Pengembangan Perkeretaapian

A. Engineering Services for Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I

Sesuai dengan Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri PPN/Bappenas No KU.304/1/1/MHB/2024 tanggal 29 November 2024 Telah Dilaksanakan Rapat pada Februari 2025 tentang Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Penggunaan sebagian Pinjaman IP-591 melalui Belanja Kementerian Perhubungan disepakati bahwa Pelaksanaan Engineering Services Phase I Stage II (dari Kembangan sampai Tomang) dan Phase II (dari Kembangan sampai Balaraja dan Medan Satria sampai Cikarang) ditunda dan akan dikerjakan pada Slicing Loan selanjutnya untuk Menghindari Keterlambatan Hibah Daerah sebagaimana telah disampaikan Surat Menteri PPN/Bappenas Nomor : T-02956/Dt8.3/PD.04.02/02/2025 perihal Penyampaian Notula Rapat Pembahasan Tindak Lanjut usulan Penggunaan Sebagian Pinjaman IP-591 melalui Belanja Kementerian Perhubungan.

B. Surabaya Regional Railway Line (Phase I)

Kegiatan SRRL fase I merupakan prioritas nasional yang tertuang dalam lampiran IV RPJMN 2025-2029

Loan Agreement SRRL telah ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 dengan nilai Loan sebesar EUR 230.000.000 dan nilai Grant sebesar EUR 6.000.000,- .Dengan Ruang Lingkup Pekerjaan:

a) Basic & Detail Engineering Design

b) Civil Work and Railway System (Lintas Sidoarjo - Pasar Turi ± 23.1 km)

c) Review Dokumen Feasibility Study (Fase 2)

Masih dilakukan revidi kembali terhadap draft ToR PMIC oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dari hasil diskusi antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan KfW dan pararel dengan pelaksanaan penyusunan dokumen pra kualifikasi sebagai bentuk percepatan pelaksanaan kegiatan pelelangan PMIC SRRL

Telah dilaksanakan rapat penetapan pelelangan paket RDC dan disahkan oleh KPA satker pada tanggal 22 desember 2025

Telah dilakukan Pengesahan Revisi Anggaran buka blokir DIPA sebesar 15 Milyar pada tanggal 8 Oktober 2025 oleh Direktur Jenderal Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Nomor Surat : S856/AG/AG.3/2025

Telah dilaksanakan permohonan pendapat hukum terhadap draft kontrak RDC SRRL guna mempercepat proses penandatanganan kontrak, dengan nomor surat : KA.008/230/SPPPPKA/DJKA tanggal 23 desember 2025

Nilai Loan PMIC sebesar EUR 12.840.801

Pelaksanaan Grant PMIC sejalan dengan Loan PMIC sehingga progres Grant PMIC menunggu pelaksanaan kontrak PMIC dengan nilai Grant sebesar EUR 4.050.000

Anggaran Loan SRRL senilai 15 Milyar yang telah dibuka blokir tidak dapat terserap pada TA 2025 dikarenakan belum tandatangan kontrak, sementara Rp.40.139.651.000 masih terblokir

C. Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I

Total Budget Loan JPY 16.322.000.000 (Construction JPY 12.500.000.000, Consulting Service JPY 3.197.000.000, Contingency JPY 625.000.000), saat ini masih di tahap engineering services, dengan masa berlaku Loan IP 563 sampai dengan Juni 2026.

Realisasi Laporan konsultan sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 14 laporan dari target 14 Laporan di tahun 2025 atau 100% yang terdiri dari 12 dokumen Monthly report consultant terdiri dari laporan bulanan dari bulan januari sampai dengan desember 2025, 1 dokumen BED report, 1 dokumen BED Drawing terdiri dari 36 konten basic engineering design for jabodetabek railway capacity enhancement.

Telah dilakukan rapat pembahasan penyelesaian dokumen DED pada 22 desember 2025 dengan undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian dengan nomor : UM.207/183/K3/DJKA/2025 tanggal 19 desember 2025

Telah disampaikan dokumen BED yang telah disahkan oleh Plt Direktur Prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian melalui Nota Dinas Nomor : 592/K3/XII/2025 tanggal 29 desember 2025 perihal Lapooran Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Jabodetabek Railway Capacity Enhancement

Pagu tahun 2025 sebesar 93m tidak dapat terserap karena secara timeline awal pada tahun 2025 ini sudah memasuki tahap supervisi, sedangkan saat ini masih dalam progres penyelesaian dokumen BED dan DED (design stage).

III.5 CAPAIAN LAINNYA

Pada Tahun 2025 Periode Triwulan I sampai dengan triwulan IV Direktorat Prasarana Perkeretaapian capaian lainnya yang diterima oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah :

1. Peringkat III dalam Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dan Peringkat I Kepatuhan Pelaporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Gambar III.66

Penyerahan Penghargaan Peringkat III Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

2. Pada Periode Triwulan II terdapat capaian lainnya yang diterima oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah peringkat II Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	97,50	98,00	97,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	95,00	100,00	97,50
3	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	93,75	94,67	94,21
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	86,25	98,00	92,13
5	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	98,00	90,25
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	91,25	84,67	87,96
7	Direktorat Sarana Perkeretaapian	78,75	96,67	87,71
8	Direktorat LLAKA	85,00	89,83	87,42
9	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	88,75	80,50	84,63
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	78,75	87,33	83,04
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	72,50	86,67	79,59
12	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	63,75	94,67	79,21
13	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50,00	86,00	68,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	78,75	50,67	64,71
15	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,00*	36,67	18,34

Gambar III.67

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/2/10/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025

3. Pada Periode Triwulan III terdapat capaian lainnya yang diterima oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah Peringkat I Kepatuhan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 diperoleh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	97,50	100,00	98,75
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	97,50	100,00	98,75
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	97,50	100,00	98,75
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	97,50	94,00	95,75
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	91,25	92,67	91,96
6	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	82,50	96,00	89,25
7	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	85,00	90,00	87,50
8	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	80,00	94,00	87,00
9	Balai Perawatan Perkeretaapian	73,75	98,00	85,88
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	87,50	83,33	85,42
11	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	73,75	90,00	81,88
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	92,50	64,67	78,59
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	85,00	68,67	76,84
14	Direktorat Sarana Perkeretaapian	53,75	67,33	60,54
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	56,25	26,67	41,46

Keterangan:

*) Evaluasi pemanfaatan aplikasi kinerja periode Triwulan II 2025 (posisi 15 Agustus 2025).

**) Rincian hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja terlampir.

Gambar III.68

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/3/8/K1/DJKA/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025

- Periode Triwulan IV terdapat capaian lainnya yang diterima oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah peringkat I Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	97,50	100,00	98,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	96,25	100,00	98,13
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	96,25	100,00	98,13
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	95,00	92,00	93,50
5	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	88,75	95,33	92,04
6	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	91,25	88,67	89,96
7	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	82,50	96,00	89,25
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	93,75	84,00	88,88
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	87,50	86,00	86,75
10	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	90,00	83,33	86,67
11	Balai Perawatan Perkeretaapian	73,75	98,00	85,88
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	85,00	83,33	84,17
13	Direktorat Sarana Perkeretaapian	62,50	81,33	71,92
14	Balai Pengujian Perkeretaapian	65,00	42,00	53,50
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	52,50	45,33	48,92

Keterangan:

^{*)} Evaluasi pemanfaatan aplikasi kinerja periode Triwulan III 2025 (posisi 18 November 2025).

^{**)} Rincian hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja terlampir.

Gambar III.69

Peringkat Tingkat Kepatuhan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025

III.6 REALISASI ANGGARAN

III.6.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Dokumen Revisi Ke-III Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan DIPA/POK Revisi Ke-14 dengan pagu sebesar Rp. 2.552.579.217.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Limaratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan anggaran terblokir sebesar Rp. 7.508.302.000,00 sehingga anggaran efektif sebesar Rp. 2.545.070.915.000,00.

Realisasi anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian s.d Triwulan IV (Bulan Desember 2025) sebesar Rp2.394.248.414.418,00 atau sebesar 93,79% jika dibandingkan dengan DIPA atau sebesar 94,07% jika dibandingkan dengan anggaran efektif dan Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar 100% dengan rincian realisasi per triwulan IV sebagai berikut:



Tabel III.68

Realisasi Anggaran Unit Kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian TA. 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA	%
1	BELANJA PEGAWAI	-	-			
2	BELANJA BARANG	2.317.656.184.000	2.313.181.788.418	99,81	4.474.395.582	0,19
3	BELANJA MODAL	234.923.033.000	81.066.626.000	34,51	153.856.407.000	65,49
	- RUPIAH MURNI	81.166.626.000	81.066.626.000	99,88	100.000.000	0,12
	- PHLN	153.756.407.000	-		153.756.407.000	100,00
	JUMLAH	2.552.579.217.000	2.394.248.414.418		158.130.802.582	



Tabel III.69
Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rev III PK (POK-14)	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Rp60.476.841.000	Rp5.237.190.000	Rp55.239.651.000	Rp0	0%
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Rp587.278.000	Rp0	Rp587.278.000	Rp562.820.554	96%
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	Rp93.279.566.000	Rp0	Rp93.279.566.000	Rp0	0%
		Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp49.953.361	100%
		Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	Rp316.877.000	Rp0	Rp316.877.000	Rp312.405.315	99%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Rp2.301.004.513.000	Rp0	Rp2.301.004.513.000	Rp2.299.973.131.017	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rev III PK (POK-14)	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Persentase
	Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Rp28.244.000	Rp0	Rp28.244.000	Rp27.943.950	99%
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Rp203.747.000	Rp0	Rp203.747.000	Rp203.235.550	100%
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Rp58.050.000	Rp0	Rp58.050.000	Rp53.538.600	92%
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Rp96.574.101.000	Rp2.271.112.000	Rp94.302.989.000	Rp93.065.386.071	96%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-



BAB IV

PENUTUP

MERANGKAI REL, MENGHUBUNGKAN INDONESIA



BAB IV PENUTUP

IV.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Sebagaimana telah disusun langkah-langkah guna peningkatan pencapaian kinerja di periode sebelumnya (triwulan III tahun 2025), telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi peningkatan kinerja Triwulan III tahun 2025 (periode sebelumnya) sebagaimana dijelaskan pada Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel IV. 1
Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana		
a.	Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh Konsultan terhadap kegiatan Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Detail Engineering Design	Telah dilakukan proses pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh Konsultan terhadap kegiatan Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Detail Engineering Design
b.	Akan dilakukan percepatan proses pengecekan dan asistensi sehingga pengesahan DED yang masih berproses dapat sesuai dengan rencana aksi tahun 2025	Telah dilakukan percepatan proses pengecekan dan asistensi dengan penambahan PIC sehingga pengesahan DED yang masih berproses dapat sesuai dengan rencana aksi tahun 2025
c.	Perlu penambahan PIC untuk pemeriksaan gambar untuk percepatan pengesahan DED	Telah dilakukan penambahan PIC untuk pemeriksaan gambar untuk percepatan pengesahan DED yang semula 2 menjadi 3 orang
d.	Akan dilakukan usulan efektif Loan dan usulan buka blokir pada kegiatan Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	Telah dilakukan usulan efektif loan dan buka blokir kegiatan SRRL penetapan pada Revisi DIPA POK ke 10 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp55.139.651000,00
e.	Pengusulan buka blokir anggaran tahap ke II dari anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang terblokir yaitu dalam hal ini kegiatan DED yang akan dilakukan untuk kegiatan pembayaran Backlog IMO	Telah dilakukan permohonan revisi blokir efisien anggaran kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat Menteri Perhubungan Nomor : KU.002/1/12/MHB/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025,



Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
		dan telah disetujui melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B - 11/M/SDK/SA.00/11/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Tanggapan atas Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025
f.	Akan dilakukan evaluasi target kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2025-2029	Telah dilakukan evaluasi Target Kinerja dan Revisi Perjanjian kinerja serta Rencana Aksi Tahun 2025 dengan penetapan Rev III PK 2025 pada bulan desember berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029
IKK Kondisi Jalur KA Sesuai Standar <i>Track Quality Index (TQI)</i> Kategori 1 dan 2)		
a.	Akan bersurat ke PT KAI terkait dengan permintaan data pengukuran Jalan Rel dengan KA Ukur Periode III dan kelengkapan hasil pengukuran TQI dengan KA Ukur di Jawa dan Sumatera	Telah Bersurat Kepada PT KAI terkait dengan permintaan data pengukuran Jalan Rel dengan surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : KA.008/2/11/K3/DJKA/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Persetujuan Rute dan Jadwal Pengukuran Indeks Kualitas Jalan Rel Tahun 2025
b.	Evaluasi hasil pengukuran TQI Periode III Tahun 2025 dengan Balai Teknik Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (persero)	Telah dilaksanakan evaluasi pengukuran TQI periode TW III pada 5 s.d 7 November 2025 dan telah bersurat kepada Managing Director of Rolling Stock and Infrastructure PT Kereta Api Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Para Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Penyampaian Evaluasi Hasil Pengukuran Jalan Rel dengan Kereta Ukur dan Accelerometer Triwulan III Tahun 2025 pada 21 November 2025
c.	Berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia terkait dengan percepatan kontrak Perawatan/IM pada Balai Teknik Perkeretaapian	Kontrak perawatan/IM Balai Teknik Perkeretaapian tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kontrak perawatan serta realokasi anggaran IM Balai untuk pembayaran Backlog Perawatan Prasarana/IMO Tahun 2023
IKK Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik		
a.	Akan dilakukan Tinjauan Lapangan Permohonan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	Telah dilaksanakan tinjauan lapangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum segmen I Lintas Lahat - Kertapati Sumatera Selatan



Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
	Segmen I Lahat s.d. Kertapati oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)	oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Bukit Asam pada tanggal 23 s.d 24 Oktober 2025;
IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian		
a.	Akan dilakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) indikator terendah serta menyusun rekomendasi dan rencana aksi pelaksanaan rekomendasi	Telah dilakukan diskusi dan koordinasi internal pembahasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bersama Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk membahas rencana tindak lanjut indikator terendah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tanggal 13 Oktober 2025
b.	Menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa bidang prasarana perkeretaapian dalam melakukan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung	Telah dilakukan pelayanan informasi secara langsung maupun tidak langsung yang sopan, responsif dan informatif kepada pengguna jasa bidang prasarana perkeretaapian
c.	Melakukan survey kepuasan Masyarakat kepada para pengguna jasa Prasarana Perkeretaapian setiap bulan	Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara rutin dan berkala (periode bulanan)
d.	Launching/Penerapan aplikasi perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan bangunan lain	Telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan uji aplikasi perizinan pemanfaatan prasarana perkeretaapian dengan mengundang pengguna jasa bidang prasarana perkeretaapian pada tanggal 22 Desember 2025
e.	Aplikasi Sertifikasi akan dilakukan pembahasan ruang lingkup pengembangan modul sertifikasi perkeretaapian untuk integrasi proses bisnis di Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian	Telah dilakukan rapat koordinasi pembahasan integrasi aplikasi sertifikasi dilingkungan DJKA, integrasi proses bisnis di Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian, untuk pelaksanaan integrasi aplikasi tahun 2026 akan dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian
f.	Melakukan Pembaruan atau update terhadap standar pelayanan	Telah dilakukan pembahasan lanjutan terkait pembaruan dokumen Standar Pelayanan Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada 13 Oktober 2025 dalam koordinasi internal pembahasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bersama Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Penetapan Standar Pelayanan unit kerja akan dilakukan pada Triwulan I tahun 2026



Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian		
a.	Akan dilakukan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait dengan penetapan sertifikasi prasarana perkeretaapian yang masih berproses pada tahun 2025	Telah dilaksanakan koordinasi dengan sisditjen terkait proses yang penetapan atau persetujuan SK untuk uji pertama atau uji berkala yang masih berproses di sesditjen dengan hasil telah ditetapkan sertifikat periode triwulan IV sehingga target sertifikat telah tercapai
b.	Berkoordinasi dengan Sesditjen Perkeretaapian terkait dengan rencana integrasi aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian	Telah dilakukan rapat koordinasi pembahasan integrasi aplikasi sertifikasi dilingkungan DJKA, integrasi proses bisnis di Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian, untuk pelaksanaan integrasi aplikasi tahun 2026 akan dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian
c.	Akan dilaksanakan Kick Off Meeting Penyelesaian Selisih Kekurangan Pembayaran Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2024	Telah dilakukan Kick of Meeting Penyelesaian Selisih Kekurangan Pembayaran Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara TA 2024 pada tanggal 9 Oktober 2025 di RR Jayakarta kantor Daop 1 Jakarta yang dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, BTP di lingkungan DJKA dan PT KAI (Persero).
d.	Akan dilakukan evaluasi target kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2025-2029	Telah dilakukan evaluasi Target Kinerja dan Revisi Perjanjian kinerja serta Rencana Aksi Tahun 2025 dengan penetapan Rev III PK 2025 pada bulan desember berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029
e.	Monitoring pengujian berkala bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api lintas Ngawi - Surabaya	Telah dilaksanakan Uji Berkala dengan hasil masih harus untuk dilakukan tindak lanjut pengujian berkala karena ada beberapa item yang masih temuan, dan pelaksanaan tindak lanjut pengujian dilaksanakan setelah dilakukan perbaikan oleh operator
f.	Akan dilakukan optimalisasi sisa anggaran sebagai Langkah-langkah akhir tahun	Telah dilakukan optimalisasi sisa anggaran dengan telah ditetapkan Revisi DIPA/POK ke 13 dan Revisi DIPA/POK ke 14 TA 2025
IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian		
a.	Lanjutan Pembahasan NSPK di tahun 2025	Telah dilasakana pembahasan pleno Standar Pedoman Penentuan Kategori Indeks Kualitas Jalan Rel (Track Quality Index) pada tanggal 17 Desember 2025 dan telah dikirim Nota Dinas dari Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian kepada Sesditjen



Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
		Perkeretaapian terkait Standa Pedoman Penentuan KAtegori Indeks Kualitas Jalan Rel
b.	Akan dilakukan pembahasan dengan konsultan independent untuk penentuan formulasi kategori TQI dan proses penetapan Standar TQI	Telah disampaikan Nota Dinas Plt. Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah I Nomor: 85/K3/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil Rapat Pleno Pengesahan Pedoman Penentuan Kategori Indeks Kualitas Jalan Rel (Track Quality Index)
c.	Berkoordinasi dengan BPKARSS terkait dengan penyusunan SOP Pemeriksaan dan Perawatan Prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Telah dilaksanakan konsinyering pembahasan SOP Kegiatan Pemeriksaan dan Perawatan Prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada 30 Juli 2025 dengan jumlah SOP pemeriksaan dan perawatan bangunan sejumlah 31 SOP dan SOP pemeriksaan dan perawatan jalur sejumlah 22 SOP. Tim Evaluasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah selesai melakukan evaluasi SOP Kegiatan Pemeriksaan dan Perawatan Prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan telah terbit KP-DJKA 116 Tahun 2025 terkait SOP Kegiatan Pemeriksaan dan Perawatan Prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
d.	Evaluasi Target Kinerja tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja kedua Tahun 2025	Telah dilakukan evaluasi Target Kinerja dan Revisi Perjanjian kinerja serta Rencana Aksi Tahun 2025 dengan penetapan Rev III PK 2025 pada bulan desember berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029
IKK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian		
a.	Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu dengan penyesuaian Kebijakan akan dilakukan penyelesaian penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 serta Revisi Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi atas Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029 melalui SK Direktur Prasarana Nomor 74.1 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 2. Telah dilakukan evaluasi Target Kinerja dan Revisi Perjanjian kinerja serta Rencana Aksi Tahun 2025 dengan penetapan Rev III PK 2025 pada bulan desember berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029
b.	Pembahasan monitoring rencana aksi atas revisi PK periode bulan Oktober 2025;	Telah dilakukan pembahasan monitoring rencana aksi atas revisi PK periode bulan Oktober dan November



Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
c.	Pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan (Reward) terhadap Unit Kerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun Pedoman Reward melalui SK-K3DJKA 62 tahun 2025 2. Telah dilaksanakan implementasi tahapan penilaian pemberian reward 3. Pemberian penghargaan melalui apel pagi kepada unit kerja dan pegawai pada tanggal 8 Desember 2025 dan penyampaian melalui nota dinas nomor 557/K3/XII/2025 kepada seluruh kasubdit, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tanggal 5 Desember 2025
IKK Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian		
a.	Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas dari manajemen Risiko Tahun 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota Dinas Permohonan Identifikasi Risiko Tahun 2026 pada tanggal 3 November 2025 2. Reviu dan Finalisasi Penyusunan Form 5 Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 pada tanggal 10 - 11 November 2025 3. Koordinasi Identifikasi Risiko dan Penyusunan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 tanggal 17 November 2025
b.	Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi untuk kegiatan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan penyusunan laporan manajemen risiko periode triwulan IV Tahun 2025	Telah dilaksanakan pembahasan Pemantauan Penanganan Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Triwulan IV Tahun 2025 pada tanggal 22 - 23 Desember 2025
IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian		
a.	Monitoring penyerapan anggaran secara berkala serta penyesuaian Rencana Penarikan Anggaran dan Revisi Hal III DIPA TA 2025	Telah dilakukan Monitoring penyerapan anggaran secara berkala serta penyesuaian Rencana Penarikan Anggaran dan Revisi Hal III DIPA TA 2025 dengan ditetapkannya DIPA/POK Revisi ke-14 tahun 2025
b.	Evaluasi Target Kinerja dan Revisi Perjanjian kinerja serta Rencana Aksi Tahun 2025	Telah dilakukan evaluasi Target Kinerja dan Revisi Perjanjian kinerja serta Rencana Aksi Tahun 2025 dengan penetapan Rev III PK 2025 pada bulan desember berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029



Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
c.	Pengisian komponen Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi SAKTI	Telah dilaksanakan Pengisian komponen Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi SAKTI dengan nilai capaian output akhir sebesar 100 pada pelaksanaan anggaran dan nilai CRO 25 pada perencanaan anggaran
d.	Bersurat kembali sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan terkait kegiatan pembayaran LRT Sumatera Selatan yang menegaskan bahwa perlunya membuka blokir pembayaran LRT Sumatera Selatan sesuai dengan hasil reviu BPKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Perhubungan telah bersurat kepada Menteri Keuangan perihal Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan TA. 2025 pada tanggal 1 Desember 2025 menyampaikan bahwa Presiden RI pada prinsipnya dapat menyetujui usulan dimaksud, untuk dapat diproses lanjut sesuai arahan Presiden dan selanjutnya untuk menghindari birokrasi yang berulang, dimohon klarifikasinya terhadap prosedur persetujuan apabila persetujuan dimaksud telah diberikan langsung dari Presiden kepada Menteri Keuangan; 2. Telah dilaksanakan Sisa Pembayaran LRT Sumatera Selatan sebesar Rp 81.066.626.000 pada tanggal 22 Desember 2025, terdiri dari Pekerjaan Konstruksi, Biaya Perizinan, Interest During Construction (IDC) dan Interest During Payment (IDP).
e.	Akan dilakukan revisi halaman tiga DIPA dan Revisi DIPA Buka Blokir kegiatan SRRL	Revisi Hal III DIPA TA 2025 dengan ditetapkannya DIPA/POK Revisi ke-14 tahun 2025 dan untuk buka blokir kegiatan SRRL penetapan pada Revisi DIPA POK ke 10 Tahun Anggaran 2025
f.	Buka Blokir Anggaran yang diefisiensi di tahun 2025 untuk pembayaran Backlog IMO	Telah dilakukan Buka Blokir anggaran efisiensi untuk pembayaran Backlog IMO dengan ditetapkannya DIPA/POK Revisi ke-14 tahun 2025
g.	Penarikan uang muka untuk kontraktual kegiatan Jasa Konsultan Manajemen IMO dan Uang Muka RDC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan penarikan uang muka Kegiatan Jasa Konsultasi Manajemen IMO TA 2025 pada tanggal 1 Oktober sebesar 20% senilai Rp.261.226.734,- 2. Untuk penarikan uang muka paket pekerjaan Railway Design Consultant (RDC) belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025 dikarenakan tahapan kontrak masih dilaksanakan pembahasan drfat kontrak



Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
IKK Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Prasarana Perkeretaapian		
a.	Identifikasi perizinan yang telah ditetapkan dari tahun 2010 sampai dengan 2024	Telah dilaksanakan Identifikasi perizinan yang telah ditetapkan dari tahun 2010 sampai dengan 2024
b.	Penarikan PNBP untuk perizinan dan sertifikasi yang telah ditetapkan	<p>Telah dilakukan penarikan PNBP untuk perizinan dan sertifikasi yang ditetapkan dengan nilai realisasi s.d. Bulan Desember 2025 sebesar Rp. 10.229.627.677,- sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akun 425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp. 60.200.000,- b. Akun 425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya sebesar Rp. 3.428.920.000,- c. Akun 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp. 6.487.980.753,- d. Akun 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 184.510.275,- e. Akun 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 68.016.649,-
IKK Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian		
a.	Akan dilaksanakan monitoring lanjutan penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2025, penggunaan aplikasi SRIKANDI sub aspek penciptaan arsip Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menghasilkan naskah dinas dengan rincian : 62 Nota Dinas, 132 Surat Dinas. 37 Surat Tugas, 57 Surat Undangan, 9 Surat Keputusan 2. Telah dilaksanakan pemberkasan arsip melalui aplikasi SRIKANDI pada bulan oktober, dengan jumlah 100 berkas
b.	Penataan Arsip tidak teratur Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pada bulan Oktober Tahun 2025. dilaksanakan penataan arsip tidak teratur pada tanggal 20-30 Oktober 2025 sebesar 56% atau sebanyak 254 box arsip; 2. Telah dilaksanakan rapat persiapan penataan arsip tidak teratur, tanggal 15 Oktober 2025, berdasarkan surat undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor:



Rekomendasi Peningkatan Kinerja		Tindak Lanjut Rekomendasi
		<p>UM.001/88/K3/DJKA/2025, tanggal 14 Oktober 2025.</p> <p>3. Telah dilaksanakan survei bersama tim penataan arsip tidak teratur di Gudang penyimpanan arsip tanggal 16 Oktober 2025, dalam rangka mengidentifikasi kondisi awal arsip tidak teratur, mencakup volume, jenis, lokasi penyimpanan, serta tingkat keteraturan arsip, sebagai dasar penyusunan rencana penataan dan pemilahan arsip di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.</p>
c.	Penataan Arsip LRT Sumatera Selatan di Soreang Bandung	<p>1. Pada tahun 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah melaksanakan penataan arsip vital</p> <p>2. Pada Bulan Januari Tahun 2025 lanjutan dari penataan arsip vital Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahap kedua dengan hasil 604 item dan 305 box arsip;</p> <p>3. Pada Bulan April Tahun 2025 lanjutan dari penataan arsip vital Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahap ketiga dengan hasil 897 item dan 272 box arsip;</p> <p>4. Pada Bulan Juli Tahun 2025 lanjutan dari penataan arsip vital Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahap keempat dan kelima dengan hasil 1138 item dan 390 box arsip;</p> <p>5. Pada Bulan Agustus 2025, dilaksanakan pemberkasan arsip sejumlah 101 berkas.</p> <p>6. Pada Bulan September Tahun 2025 lanjutan dari penataan arsip vital Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahap keenam dengan hasil 773 item dan 385 box arsip</p>

Data Dukung Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode sebelumnya dapat di lihat pada <https://s.id/DakungTLRekomendasiTW3>



IV.2 KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi serta analisis capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :



Tabel IV. 2
Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	24,14	100
	Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km	6.928,00	6.915,12	99,81
Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	32,20	33,90	105,28
	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	95,02	94,64	99,60
	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	65,21	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,90	100,26
Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,58	50,85	100,53
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	79,55	100
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,20	100
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	19,00	20,00	105,26
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,75	83,66	97,56
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,56	85,02	108,22
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2025					101,27

*Data Dukung Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Tahun 2025 dapat di lihat pada <https://s.id/DataDukungIndikatorKinerja2025>



- c. Hasil Monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja terdapat capaian kinerjanya tahun 2025 Kinerja permasing-masing indikator telah tercapai *On the Right Track* sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebanyak 13 indikator kinerja.
- d. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta pelaporan kinerja yang telah disusun memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran serta penyesuaian jabatan/pegawai dalam mencapai kinerja berikutnya;
- e. Monitoring dan evaluasi kinerja internal dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilaksanakan dan sangat penting dilakukan agar capaian kinerja dapat dimonitor secara berkala baik periode bulanan maupun triwulanan serta dapat menemukan kendala atau hambatan pelaksanaan kinerja agar dapat disusun rencana pengendalian kendala/upaya atau rekomendasi peningkatan kinerja;
- f. Pada tahun 2025 telah terdapat perubahan budaya kinerja dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini kondisi sebelum adanya perubahan budaya kinerja dan setelah pelaksanaan budaya kinerja dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja yaitu diantaranya:

Tabel IV.3
Informasi Perubahan Budaya Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Informasi Perubahan Budaya Kinerja			
Substansi	Sebelum	Sesudah	Dampak/Manfaat
Budaya Aparatur	Tingkat kepatuhan Pelaporan Kinerja periode tahun 2024 sangat rendah	Perubahan budaya kinerja yaitu dengan menetapkan kebijakan pembahasan capaian kinerja perbulan melalui Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0080/K3/II/2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Bulanan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Terdapat perubahan budaya kinerja setelah dilaksanakan kebijakan pembahasan capaian kinerja periode bulanan yang berdampak pada tingkat kepatuhan pelaporan kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk periode Triwulan 1 dengan nilai kepatuhan 97,50 (Surat Sedtitjen Perkeretaapian nomor : PR.205/2/10/K1/DJKA/2025) dan untuk periode Triwulan 2 dengan



Informasi Perubahan Budaya Kinerja			
Substansi	Sebelum	Sesudah	Dampak/Manfaat
			<p>nilai kepatuhan 98,75% (Surat Sesditjen Perkeretaapian Nomor : PR.205/3/8/K1/DJKA/2025 tanggal 25 Agustus 2025) serta untuk periode Triwulan 3 dengan nilai kepatuhan 98,13% (Surat Sesditjen Perkeretaapian Nomor : PR.205/4/17/K1/DJKA/2025 tanggal 28 November 2025)</p> <p>Dampak dari perubahan budaya kinerja memberikan peningkatan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 101,27% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun sebelumnya sebesar 101,13%.</p>
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	Ketersediaan data kinerja capaian Realisasi Indikator Kinerja TQI tidak tepat waktu	Perubahan budaya kinerja yaitu dengan menetapkan kebijakan Evaluasi Hasil Pengukuran TQI dengan Kereta Ukur melalui Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : SK-K3DJKA 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Jalan Rel (track Quality Index) dengan Kereta Ukur	<p>Terdapat perubahan budaya kinerja setelah dilaksanakan kebijakan Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Jalan Rel (Track Quality Index) dengan Kereta Ukur yang berdampak kualitas pelaksanaan pengukuran capaian Indikator Kinerja TQI dan ketersediaan data kinerja yang tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan, selain itu dampak dari pelaksanaan evaluasi hasil pengukuran jalan rel untuk dapat mengetahui kualitas/kondisi jalan rel existing yang perlu dilaksanakan perawatan sehingga pelayanan dan keselamatan perjalanan kereta api terjamin. Pada tahun 2025 evaluasi hasil pengukuran jalan rel dengan kereta ukur telah dilaksanakan secara berkala dengan dikeluarkannya surat Direktur Prasarana Perkeretaapian pada periode tahun 2025 melalui surat Nomor :</p>



Informasi Perubahan Budaya Kinerja			
Substansi	Sebelum	Sesudah	Dampak/Manfaat
			KA.008/5/6/K3/DJKA/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Penyampaian Evaluasi Hasil Pengukuran Jalan rel dengan KA Ukur periode I Tahun 2025 dan surat nomor : KA.008/131/K3/DJKA/2025 tanggal 18 September 2025 perihal Penyampaian Evaluasi Hasil Pengukuran Jalan Rel dengan KA Ukur Periode ke II tahun 2025 serta surat nomor : KA.008/430/K3/DJKA/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Evaluasi Hasil Pengukuran Jalan Rel dengan KA Ukur Periode ke III tahun 2025
Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan pegawai	Kinerja belum menjadi dasar utama dalam pemberian penghargaan; penghargaan bersifat insidental, belum terukur, dan belum berbasis capaian kinerja individu maupun unit kerja	Pemberian penghargaan kepada pegawai dan unit kerja dilaksanakan secara terstruktur dan transparan berdasarkan capaian indikator kinerja yang terukur, selaras dengan perjanjian kinerja dan target organisasi. Implementasi pemberian penghargaan kepada unit kerja dan pegawai sesuai dengan Pedoman Pemberian Penghargaan (Reward) dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang terdiri dari beberapa kategori yaitu : a) Unit dengan kinerja terbaik b) Unit kerja dengan Kepatuhan pelaporan Kinerja c) Pegawai dengan Kinerja terbaik d) Pegawai terdisiplin.	Penerapan inovasi kinerja dan budaya kinerja memberikan dampak positif, hal ini dapat dibuktikan dengan dari hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan yang dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian, Direktorat Prasarana meraih urutan pertama tingkat kepatuhan unit kerja dalam pelaporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan peringkat kedua tingkat kepatuhan unit kerja dalam pelaporan kinerja Triwulan III Tahun 2025. Dampak dari perubahan budaya kinerja memberikan peningkatan rata-rata capaian kinerja, untuk perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat



Substansi	Informasi Perubahan Budaya Kinerja		
	Sebelum	Sesudah	Dampak/Manfaat
		Dan pemberian penghargaan disampaikan pada saat pelaksanaan apel pegawai.	peningkatan kinerja. Rata-rata capaian Tahun 2025 sebesar 101,27% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun sebelumnya sebesar 101,13%.
Kebijakan Implementasi Srikandi	Administrasi persuratan belum terpusat dalam satu aplikasi dan sebagian besar masih dilakukan manual, sehingga pengecekan status tindak lanjut serta penyusunan rekap untuk pelaporan membutuhkan waktu lebih lama.	Implementasi serentak menjadi pengungkit nilai pada area arsip elektronik. Indikator audit pada bagian elektronik menunjukkan: a) Naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI berada pada rentang >90%–100% (berdasarkan sampel audit). b) Tindak lanjut naskah dinas oleh pimpinan/unit pengolah melalui SRIKANDI berada pada rentang >70%–90% dengan rata-rata persentase tindak lanjut tercatat 84,21% .	Dampaknya terhadap penilaian: menguatkan aspek penciptaan arsip dan pengendalian naskah dinas elektronik, sekaligus memperjelas jejak proses (audit <i>trail</i>) dalam tata kelola administrasi. Peningkatan nilai pengawasan kearsipan Tahun 2025 sebesar 85,02 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai pengawasan kearsipan tahun sebelumnya sebesar 78,56.

IV.2 KESIMPULAN

Sebagai penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja pada laporan kinerja telah disusun upaya peningkatan kinerja atau rekomendasi peningkatan kinerja sebagai acuan aktivitas pelaksanaan kinerja, adapun penyesuaian aktivitas dan anggaran guna peningkatan kinerja sebagai berikut:

IKK Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian.
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian;
4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan pendapat hukum terhadap draft kontrak *Railway Design Consultant* (RDC) antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Biro Hukum;
2. Penandatanganan Kontrak Railway Design Consultant (RDC) antara konsultan terpilih dengan PPK MRT SRRL

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Perkeretaapian;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan pegawai.

IKK Persentase Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi;

3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi;
4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Sinkronisasi data prasarana dengan Balai Teknik Perkeretaapian/ Satuan Pelayanan dan pengembalian data primer di lokasi-lokasi yang mengalami perubahan pada GAPEKA.
2. Pengawasan kegiatan pendukung RPJMN Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi secara berkala.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Perkeretaapian;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan pegawai.

IKK Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Pelayanan Prasarana Perkeretaapian;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian;
4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.



b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Pembahasan pengecekan dan asistensi lanjutan DED Jabodetabek *Railways Enhancement*;
2. Pengawasan perbaikan hasil asistensi DED Jabodetabek *Railways Capacity Enhancement*.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Perkeretaapian;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan pegawai

IKK Jalur Kereta Api Sesuai dengan Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Rekomendasi Perawatan Prasarana Perkeretaapian oleh Balai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan wilayah dituangkan didalam evaluasi TQI periode IV;
2. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2;
3. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2;
4. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2;
5. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Pelaksanaan Perawatan Prasarana Perkeretaapian oleh Balai Teknik Perkeretaapian dan BUPP;
2. Penyusunan Timeline Pembahasan Standar TQI dan berkoordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Tim Evaluasi Pengukuran TQI Tahun 2026;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 sesuai dengan tugas jabatan.

IKK Jalur Kereta Api yang menggunakan Persinyalan Elektrik, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik;
4. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Penyelesaian permohonan perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
2. Berkoordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait penetapan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
3. Pengawasan kegiatan pendukung RPJMN prasarana perkeretaapian.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana Perkeretaapian;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik sesuai tugas jabatan.

IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Pemanfaatan aplikasi Perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan bangunan lain untuk proses perizinan;
2. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
5. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Penyelesaian permohonan perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan Bangunan Lain;
2. Bersurat kepada para pemegang izin untuk mengajukan perpanjangan izin yang masa berlaku izin akan habis.'
3. Bersurat kepada Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian untuk mengajukan permohonan perizinan pembangunan prasarana pekerettaapian umum/khusus.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Perpotongan dan Persinggungan Jalur KA dengan Bangunan Lain;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.

IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
2. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Akan bersurat kepada Balai Teknik Perkeretaapian/Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang masa berlaku uji pertama/berkala akan habis di tahun 2026 untuk melakukan pengajuan pengujian.
2. Akan dilakukan rapat pleno pembahasan hasil pengujian kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
3. Akan dilakukan pembahasan rencana pengujian prasarana perkeretaapian tahun 2026;
4. Akan dilakukan verifikasi dokumen persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.

IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian;
2. Penyusunan cascading kinerja berjenjang dan Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Koordinasi dan pembahasan dengan Setditjen Perkeretaapian terkait lanjutan pembahasan Penyusunan Standar TQI;
2. Akan dilakukan rapat pleno pembahasan hasil pengujian kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
3. Akan dilakukan pembahasan rencana pengujian prasarana perkeretaapian tahun 2026;
4. Akan dilakukan verifikasi dokumen persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian.

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Usulan Buka Blokir Anggaran Kajian Penyusunan NSPK.
2. Usulan Kajian pada pagu Kebutuhan TA 2027 sesuai dengan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Rencana Strategis untuk dukungan penyusunan NSPK.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.

IKK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Pelaksanaan Rekomendasi Peningkatan Kinerja dan Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja secara berkala;
2. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana;
3. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana;
5. Evaluasi Capaian Rencana Strategis periode pelaksanaan tahun 2025.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Penyusunan Cascading dan Pohon Kinerja Berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Penyusunan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan periode tahun 2025;
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP Dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana sesuai dengan tugas jabatan.

IKK Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Kondisi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Kondisi Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko;
5. Sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Penyusunan Form 5 dan Form 8 sebagai lampiran piagam Manajemen Risiko;
2. Pemantauan penanganan Risiko tahun 2026.

c. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.

IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
4. Usulan buka blokir anggaran TA 2026;
5. Revisi Volume Output TA 2026;
6. Penyusunan volume output pada usulan anggaran berdasarkan Standar Biaya Keluaran Umum.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Pengisian CRO secara berkala pada aplikasi SAKTI ;
2. Percepatan proses pelelangan untuk pekerjaan kontraktual.



c. Penyesuaian Anggaran :

1. Penyesuaian Anggaran terhadap penetapan Revisi DIPA/POK Tahun 2026;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026;
3. Revisi Hal. 3 DIPA TA 2026 berdasarkan Rencana Penarikan Anggaran (RDP) TA 2026.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian. sesuai dengan tugas jabatan.

IKK Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi :

1. Penetapan Target Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana;
2. Dialog Kinerja berjenjang dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dukungan kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana;
3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana.

b. Penyesuaian Aktivitas :

1. Pengenaan PNBP kepada stakeholder pemegang izin yang selesai melakukan perizinan;

c. Penyesuaian Anggaran :

1. Usulan Penggunaan Anggaran dari sumber PNBP;

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai :

1. Penetapan Pengelola Anggaran TA 2026;
2. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana sesuai dengan tugas jabatan.

IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rekomendasi:

a. Penyesuaian Strategi

1. Memperkuat fokus pemenuhan indikator audit pada aspek yang bobotnya tinggi, khususnya pengelolaan arsip elektronik (SRIKANDI), arsip vital, dan SDM kearsipan;
2. Menetapkan rencana aksi peningkatan nilai pengawasan kearsipan berbasis gap analysis (temuan/indikator yang belum maksimal), lengkap dengan target, PIC, dan tenggat waktu;
3. Mendorong konsolidasi tata kelola kearsipan lintas unit kerja melalui rapat monitoring rutin dan pelaporan capaian bulanan sebagai bukti dukung audit.

b. Penyesuaian Aktivitas

1. Menyusun dan menerapkan SOP pemberkasan elektronik serta standar pengunggahan/penamaan dokumen di SRIKANDI untuk memastikan arsip mudah ditelusuri dan konsisten antar unit kerja;
2. Melaksanakan monitoring kepatuhan SRIKANDI (naskah dinas masuk/keluar, tindak lanjut, dan pengarsipan) dengan rekap laporan bulanan dan umpan balik kepada unit yang belum tertib;
3. Melanjutkan program penataan arsip tidak teratur secara bertahap serta memperluasnya ke arsip aktif-inaktif di unit kerja/satker, disertai pembaruan daftar arsip;
4. Memutakhirkan skema pengelolaan arsip vital (identifikasi–perlindungan–penyimpanan–alih media–daftar arsip vital) termasuk penguatan kondisi ruang simpan dan kontrol lingkungan;
5. Menyiapkan paket bukti dukung audit secara terstruktur (BA, daftar arsip, laporan kegiatan, foto sebelum-sesudah, rekap SRIKANDI, SK tim) agar siap saat pengawasan.

c. Penyesuaian Anggaran

1. Mengalokasikan anggaran prioritas untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap nilai pengawasan, seperti pembinaan/monitoring SRIKANDI, penataan arsip, penyusutan arsip, pemeliharaan ruang simpan arsip vital, dan alih media arsip prioritas.
2. Mengoptimalkan efisiensi anggaran melalui konsolidasi penyimpanan (pengurangan kebutuhan gudang/sewa) dan pemanfaatan sarana yang sudah tersedia secara maksimal.
3. Menyusun kebutuhan anggaran berbasis output yang terukur (jumlah kontainer/box/item tertata, jumlah unit patuh SRIKANDI, jumlah arsip vital terdata/terlindungi) agar justifikasi anggaran kuat.

d. Penyesuaian Jabatan/Pegawai:

1. Penetapan SKP Pegawai sebagai pengampu kinerja berjenjang Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas jabatan.
2. Menetapkan PIC pengelola arsip pada tiap subdit/satker untuk pengendalian kepatuhan SRIKANDI dan pembinaan pemberkasan, serta memastikan ada pengganti (backup) untuk menjaga keberlanjutan.
3. Mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan/sertifikasi teknis kearsipan (prioritas bagi arsiparis) agar penguatan SDM tercermin pada penilaian.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN



DJKA
Membangun
Perkeretaapian
Nasional



ditpraska



Dit Prasarana KA



djka.kemenhub.go.id/ditprasaranaka